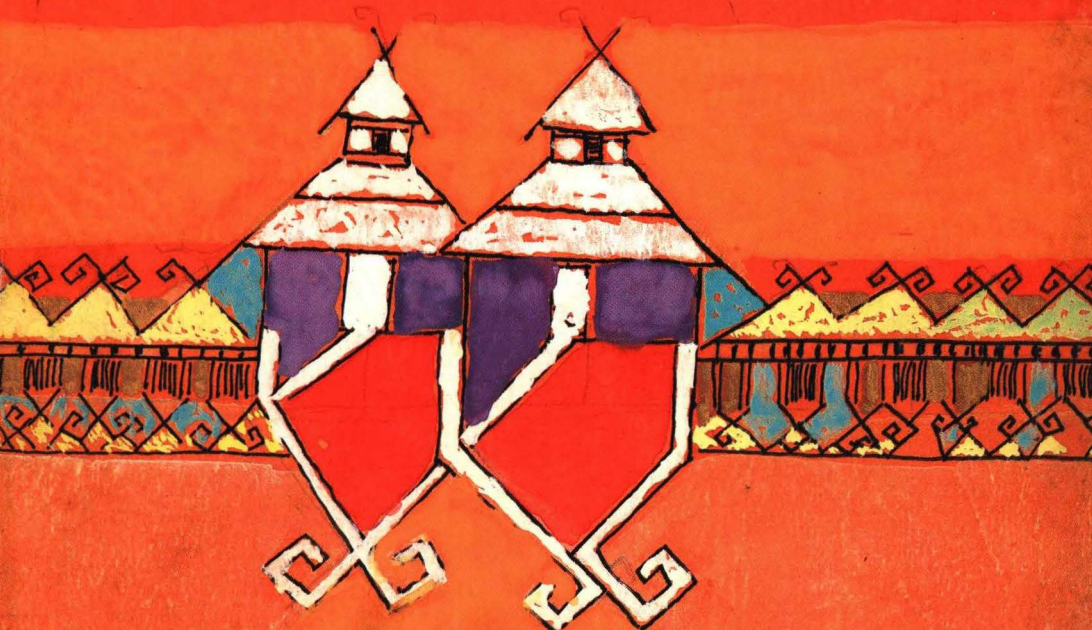
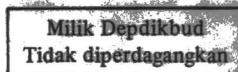
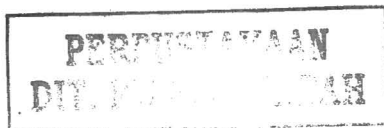




PERKAMPUNGAN DI PERKOTAAN SEBAGAI WUJUD PROSES ADAPTASI SOSIAL DAERAH SULAWESI TENGGARA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PERKAMPUNGAN DI PERKOTAAN SEBAGAI WUJUD PROSES ADAPTASI SOSIAL DAERAH SULAWESI TENGGARA

Peneliti/Penulis :

1. Drs. Tibe Hafid
2. Drs. Rayen Ibrahim
3. Drs. Gusarmin Sofyan
4. Anwar. K.
5. A. Pattah

Penyempurna/Editor :

1. Dra. Mc. Suprapti
2. Drs. Djenen M.Sc.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1985**

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan Daerah diantaranya ialah naskah : Perkampungan Di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Daerah Sulawesi Tenggara tahun 1982/1983.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Tenaga ahli perorangan, dan para peneliti/penulis.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Agustus 1985.
Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ahmad Yunus
NIP. 130.146.112

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1982/1983 telah berhasil menyusun naskah Perkampungan Di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial Daerah Sulawesi Tenggara .

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Agustus 1985

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR PETA	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Pokok Masalah	1
B. Metode Penelitian	2
C. Susunan Karangan	5
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA KENDARI	
A. Lokasi dan Keadaan Fisik Kota Kendari ...	10
B. Sejarah Pertumbuhan Kota Kendari dan Perkampungannya	14
BAB III. GAMBARAN UMUM KAMPUNG-KAMPUNG	
A. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Serta Kon- disi Fisik	32
B. Pola-Pola Umum Kehidupan Sosial dan Ekonomi	35
BAB IV. GAMBARAN KHUSUS KAMPUNG-KAMPUNG	
A. Kampung Benu-Benua	39
B. Kampung Lepo-Lepo	82
BAB V. KESIMPULAN	118
DAFTAR KEPUSTAKAAN	123
LAMPIRAN	
Tabel-Tabel	124

DAFTAR PETA

Nomor Peta	Halaman
1. Kota Administratif Kendari.	7
2. RK III, Kelurahan Benu-Benua	8
3. RK II, Kelurahan Lepo-Lepo.	9

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
II.1. Jumlah Kelurahan, Luas, Rumah Tangga, dan Rata-Ratanya Per Kelurahan dan Anggauta Rumah Tangga Pada Tiga Kecamatan di Kota Kendari, 1979 – 1981.....	124
II.2. Jumlah Penduduk Kota Kendari Per Kelurahan, 1979 – 1981.....	125
II.3. Jumlah Penduduk Kota Kendari Per Kecamatan Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, 1980..	126
II.4. Jumlah Penduduk Warga Asing (Cina) di Kota Kendari Menurut Jenis Kelamin, 1981 – 1982	127
II.5. Banyaknya Sekolah di Kota Kendari Menurut Jenjang dan Statusnya, 1982	128
II.6. Banyaknya Penduduk Kota Kendari Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan, 1982. ...	128
II.7. Persentase Penduduk Kota Kendari Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha, 1981	129
IV.1. Responden Menurut Identitas	130
IV.2. Responden Menurut Pendidikan Nonformal dan Pengalaman Keterampilan	131
IV.3. Responden Menurut Tempat Lahir, Asal Suku Bangsa, Asal Penduduk Sebelum Menetap dan Pindah ke Kampung Bersangkutan Serta Alasan Pindah	132
IV.4. Responden Menurut Keadaan Rumah	133
IV.5. Responden Menurut Status Pemilikan Tanah dan Bangunan	134
IV.6. Responden Menurut Pemilikan Kamar Mandi, Jamban, Pembuangan Sampah, Sumber Air Bersih, dan Sumber Penerangan	135
IV.7. Responden Menurut Pemilikan Luas Halaman, Jenis Batas Halaman, dan Batas Depan Rumah	136

IV.8. Responden Menurut Pemilikan Alat Rumah Tangga, dan Peralatan Komunikasi/Transportasi.	137
IV.9. Responden Menurut Penghasilan Kotor dan Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Per Bulan	138
IV.10. Responden Menurut Cara Penambahan Pendapatan dan Cara Memperoleh Bantuan Keuangan	139
IV.11. Responden Menurut Cara Pemanfaatan Uang Yang Lebih.	140
IV.12. Responden Menurut Ada/Tidaknya Jenis Biaya Khusus	141
IV.13. Responden Menurut Tempat Belanja Pangan Sehari-hari.	142
IV.14. Responden Menurut Pengenalan Terhadap Sesama Warga RT, dan Kampung Serta Bahasa Pengantar Yang Dipakai.	142
IV.15. Responden Menurut Cara Saling Membantu Terhadap Tetangga Bila ada Hajatan Atau Kemalangan ...	143
IV.16. Responden Menurut Keadaan Keamanan Kampung .	144
IV.17. Responden Menurut Pendapat Tentang Kelakuan Penduduk Kampung Berdasarkan Segi Agama dan Adat	144
IV.18. Responden Menurut Penilaian Tentang Remaja Dalam Hubungan Dengan Para Orang Tua dan Penentuan Kehormatan/Kedudukan Orang di Kampungnya	145
IV.19. Responden Menurut Masalah Penyebab Sengketa Dengan Tetangga.	146
IV.20. Responden Menurut Pengamatannya Tentang Penyebab Persengketaan Antarwarga Kampung	146
IV.21. Responden Menurut Cara Penyelesaian Sengketa Dengan Tetangga.	147
IV.22. Responden Menurut Pengamatan Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Antarwarga Kampung dan Tentang Orang Ketiga Yang Sering Menyelesaikan ..	148

IV.23. Responden Menurut Usaha Yang Dilakukan Dalam Hidup Bertetangga.	149
IV.24. Responden Menurut Frekuensi, Tempat, dan Bahan Perbincangan Dengan Tetangga.	149
IV.25. Responden Menurut Kebiasaan Anak Bermain, Pandangan Mengenai Perkelahian Anak, dan Tempat Bermain Anak.	151
IV.26. Responden Menurut Kehidupan dan Sikap Mengenai Perkawinan Anak.	152
IV.27. Responden Menurut Tanggung Jawab Bila Ada Kesulitan Uang, Masalah Anak, dan Kebiasaan Berbincang Dalam Keluarga.	153
IV.28. Responden Menurut Model Pendidikan Anak, Perilaku Anak Terhadap Orang Tua dan Tugas Anak di Rumah.	154
IV.29. Responden Menurut Jenis Kegiatan Sosial Yang Diikutinya/Anggauta keluarganya Dalam RT Atau Kampung.	155
IV.30. Responden Menurut Pekerjaan Yang Sekarang dan Yang diinginkannya.	156
IV.31. Responden Menurut Jenis Pekerjaan Yang Diinginkan Untuk Anaknya Kelak.	157
IV.32. Responden Menurut Pandangan Terhadap Makhluk Gaib.	157
IV.33. Responden Menurut Kehidupan Beragama.	158
IV.34. Responden Menurut Sikapnya Bila Anak Menikah Dengan Orang Bukan Seagama dan Kehadirannya Bila Ada Undangan Pesta Keagamaan Yang Berbeda.	159

BAB I PENDAHULUAN

A. POKOK MASALAH

Salah satu masalah yang seringkali tidak disadari kehadirannya oleh manusia adalah kemiskinan. Sebenarnya masalah ini sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Kesadaran bagi mereka yang tergolong miskin akan adanya kemiskinan, baru muncul pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan orang lain yang tergolong memiliki kehidupan lebih baik. Hal ini juga berlaku bagi yang berkecukupan, di samping karena adanya ajaran-ajaran moral dan agama yang mengajarkan untuk berbelas kasihan dan memberikan sedekah kepada mereka yang miskin.

Yang dimaksud dengan kemiskinan di sini, adalah suatu kondisi atau keadaan tingkat kehidupan yang rendah. Kemiskinan, ditandai oleh adanya suatu tingkat kekurangan materi yang diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan hidup yang ada pada sejumlah orang atau suatu golongan sosial dibandingkan dengan ukuran tingkat kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya pada lingkungan hidup, pemukiman dan perumahan, kehidupan moral dan sosial serta rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin.

Pada umumnya para ahli ilmu-ilmu sosial seperti Oscar Lewis (Juklak (IDKD 1982/1983: hal. 78) sependapat bahwa sebab utama yang menimbulkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sistem ekonomi ini tercermin dalam bentuk struktur dan organisasi dan dalam berbagai pranata yang ada dalam masyarakat tersebut. Oscar Lewis (1970) dalam tulisannya *The Culture of Poverty*, menyatakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kemiskinan dan pengertian kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan dilihat sebagai kondisi miskin. Kebudayaan kemiskinan berisikan nilai-nilai dasar yang terjalinkan dalam keseluruhan aspek kehidupan orang yang miskin. Beberapa ciri dari kebudayaan kemiskinan itu antara lain ketidak sanggupannya memanfaatkan kondisi-kondisi perubahan yang dihadapi untuk meningkatkan taraf hidupnya, menerima nasib, dan mengharapkan bantuan atau sedekah. Kebudayaan kemiskinan menurut Oscar Lewis, menjadi lestari,

karena diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui sosialisasi. Tidak ada satu kota pun di Indonesia ini yang tidak mempunyai bagian-bagian wilayah kotanya yang tergolong sebagai wilayah perkampungan yang ditandai oleh adanya tingkat kualitas lingkungan yang relatif rendah dibanding dengan bagian-bagian lain dari kota tersebut. Biasanya wilayah itu didiami oleh mereka yang berpenghasilan rendah atau miskin. Ditinjau dari sejarahnya, pertumbuhan kota-kota di Indonesia selalu dimulai dengan atau diikuti oleh tumbuhnya perkampungan. Para pendatang yang berasal dari lapisan sosial yang rendah cenderung bermukim di perkampungan yang kondisi lingkungannya relatif rendah.

Berpijak pada konsep pemikiran tersebut yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana perwujudan proses adaptasi sosial di perkampungan yang ada di kota Kendari sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara. Perwujudan adaptasi sosial itu terungkap dalam bentuk-bentuk organisasi dan pranata-pranata sosial, dalam bentuk-bentuk kondisi lingkungan hidup (pemukiman, tata ruang, rumah dan isinya), dalam pola-pola tingkah laku serta sikap-sikap, dan secara bersama-sama ke semua aspek tersebut menjadi landasan bagi terwujudnya kebudayaan yang berlaku di perkampungan di kota Kendari.

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini, bahwa pada perkampungan yang kondisi lingkungannya relatif rendah secara hipotetis warga masyarakatnya mempunyai kebudayaan kemiskinan. Betulkah kebudayaan masyarakat kampung di kota Kendari itu tergolong dalam kebudayaan kemiskinan yang ciri-cirinya seperti yang dikemukakan oleh Oscar Lewis? Informasi seperti itu dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan taraf hidup dan kondisi lingkungan hidup masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dan yang lebih khusus, informasi itu dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu perencanaan yang sebaik-baiknya dalam usaha meningkatkan pendidikan dan kebudayaan.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan maka sasaran wilayah penelitian adalah perkampungan di kota Kendari yang kondisi lingkungannya relatif rendah atau miskin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etic ("kaca mata" obyektif) dan emic ("kaca mata" subyektif).

Keseluruhan kegiatan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) kegiatan persiapan dan (2) penelitian di lapangan.

1. Persiapan Penelitian

Persiapan Penelitian ini dimulai dari minggu pertama Juni sampai dengan minggu kedua Juli 1982. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah: penjaringan data sekunder, penetapan kampung yang diteliti, penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, serta penyiapan surat penugasan dan perizinan.

a. Penjaringan data sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber (dokumen Jawatan dan Dinas) yang banyak terlibat dalam pemerintahan kota Kendari guna mendapatkan kampung yang memenuhi kriteria untuk diteliti. Kampung yang dimaksudkan adalah kampung yang tergolong miskin sebanyak dua buah kampung. Yang pertama terletak di pusat kota, dan yang kedua terletak di pinggiran kota. Dalam hal ini, kampung tersebut disejajarkan dengan rukun kampung (RK) pada tingkat Kelurahan.

Berdasarkan sumber sekunder dan informasi pejabat Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II kendari dan Kantor Walikota Administratif Kendari, diperoleh data bahwa kampung yang memenuhi kriteria miskin adalah RK III Kelurahan Beru-Berua, Kecamatan Kendari (pusat kota) dan di RK II Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mnondonga (pinggiran kota). Dalam laporan penelitian ini kampung sampel pusat kota disebut Kampung Benu-Benua dan kampung sampel pinggiran kota disebut Kampung Lepo-Lepo (Peta 1).

b. Penyusunan dan pengadaan instrumen penelitian

Kegiatan lanjut dari penjaringan data sekunder tersebut adalah penyusunan dan pengadaan instrumen penelitian. Instrumen yang disusun berupa pedoman wawancara yang ditujukan pada informan kunci dan kuesioner yang ditujukan kepada para responden.

c. Penyiapan surat penugasan dan perizinan

Setelah instrumen penelitian dirampungkan, kemudian disiapkan surat penugasan dan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat administratif bagi petugas peneliti di lapangan

sehingga dapat memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penelitian. Surat penugasan diberikan untuk peneliti lapangan dan surat perizinan ditujukan bagi pimpinan instansi peneliti, dan pemerintah setempat yang akan dituju.

2. Penelitian di Lapangan

Kegiatan penelitian di lapangan dilakukan dari tanggal 7 sampai 14 Juli 1982 untuk kedua kampung sampel. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti berupa pemetaan kampung, pemilihan dan penetapan responden dan informan kunci, penggunaan instrumen penelitian.

a. Pemetaan kampung

Mengawali kegiatan pengumpulan data melalui kuesioner dan pedoman wawancara, peneliti di kedua kampung tersebut melakukan pemetaan kampung. Peta ini dibuat dengan cara berjalan kaki dari satu ujung kampung ke ujung lainnya secara mengacak mengikuti jalan-jalan dan lorong-lorong yang ada sambil membawa kertas kosong di atas papan. Sambil berjalan mengamati segala kenampakan fisik dan mencatat apa yang diamati dalam bentuk kode-kode peta. Hal-hal yang diamati mencakup antara lain perumahan, pekarangan, gedung-gedung, tempat-tempat kegiatan sosial budaya dan ekonomi serta keadaan fisik alam setempat dan keadaan lingkungan pada umumnya.

b. Pemilihan dan penetapan responden

Pemilihan dan penetapan responden sebanyak dua puluh orang, pada Kampung Benu-Benua dilakukan secara area sampling. Untuk hal ini, maka peta yang dibuat itu dibagi menjadi dua puluh petak. Caranya adalah menarik empat garis menegak dan lima garis melintang dari satu sisi ke sisi lainnya yang masing-masingnya mempunyai jarak yang sama. Pada setiap petak itu ditentukan sebuah titik yang kenyataan nantinya merupakan lokasi rumah responden. Gambaran pemilihan responden dengan cara area sampling hanya dapat dilaksanakan di Kampung Benu-Benua (Peta 2). Sedangkan pemilihan responden di Kampung Lepo-Lepo tidak dapat dilakukan secara area sampling karena (1) kelompok tempat tinggal penduduk terpencair dan (2) masih banyak adanya daerah yang kosong berupa semak-semak (Peta 3). Pemilihan 20 responden di Kampung Lepo-Lepo secara acak.

c. Penggunaan instrumen penelitian

Setelah pemilihan dan penetapan responden dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan instrumen penelitian. Peneliti mengunjungi rumah-rumah responden, dan wawancara dilakukan secara tatap muka berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan.

Selain wawancara dengan para responden, dilakukan pula wawancara dengan informan kunci. Informan ini ditetapkan satu orang yang dianggap dan terpandang sebagai tokoh masyarakat kampung yang bersangkutan dan banyak mengetahui seluk beluk kehidupan penduduk dan kampungnya. Dalam hal ini digunakan pedoman wawancara. Data yang diperoleh melalui penggunaan instrumen penelitian tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis.

C. SUSUNAN KARANGAN

Hasil penelitian ini dirangkai dalam suatu susunan karangan terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan.

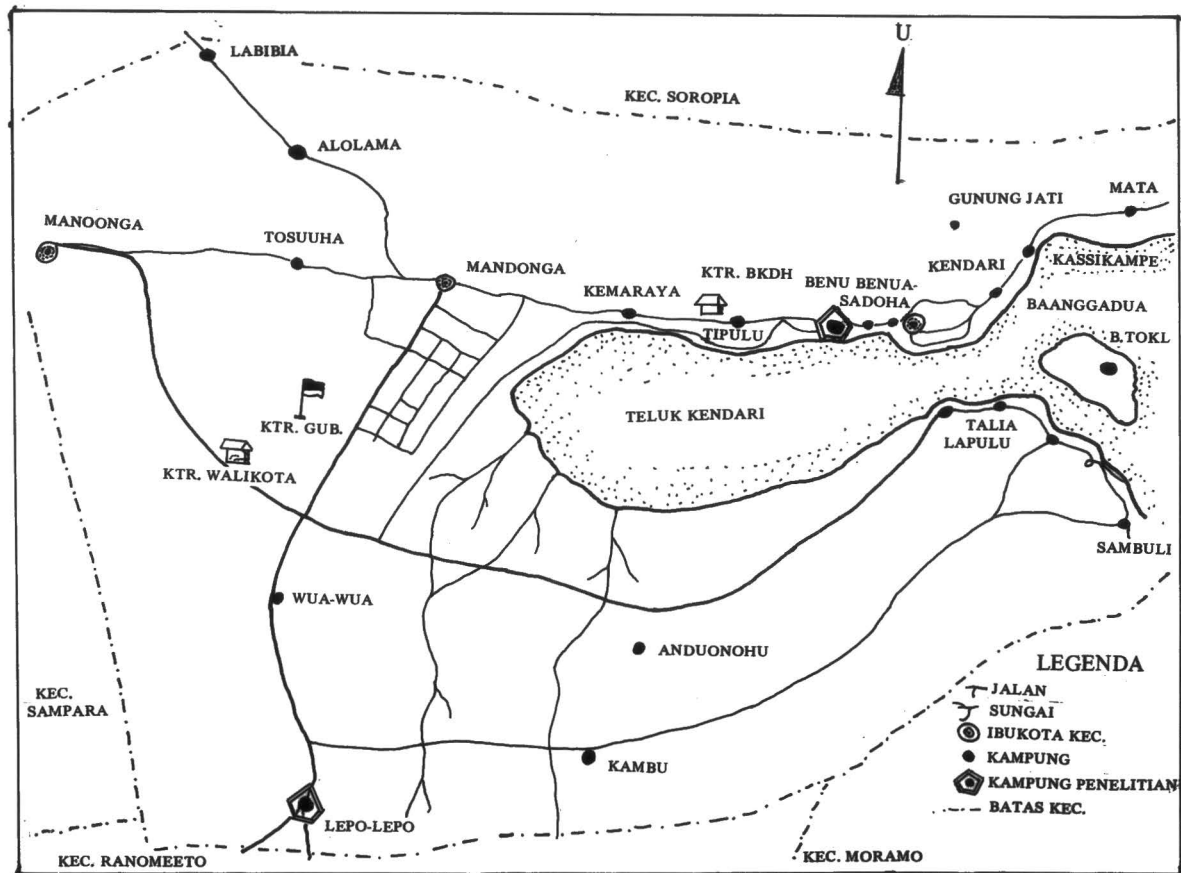
Bagian pertama merupakan bab pendahuluan berisikan penyajian pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penguraian (susunan karangan). Pada dasarnya bagian ini merupakan penguatan konsep pemikiran yang melandasi penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan bentuk pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data.

Selanjutnya, bab II berisi tentang gambaran umum kota Kendari sebagai wilayah penelitian ini. Secara umum diuraikan perihal kota itu dilihat dalam beberapa aspek, seperti lokasi dan keadaan fisik kota Kendari, sejarah pertumbuhan kota dan perkampungan/pemukimannya; administrasi dan pemerintahannya; kependudukannya; serta kehidupan sosial ekonominya. Bahan uraian dari bab ini pada prinsipnya bersumber dari hasil pengamatan Tim Aspek penelitian ini terhadap kota tersebut, hasil wawancara dengan para pejabat-pejabat pemerintah yang berwewenang dan hasil studi dokumentasi atau kepustakaan.

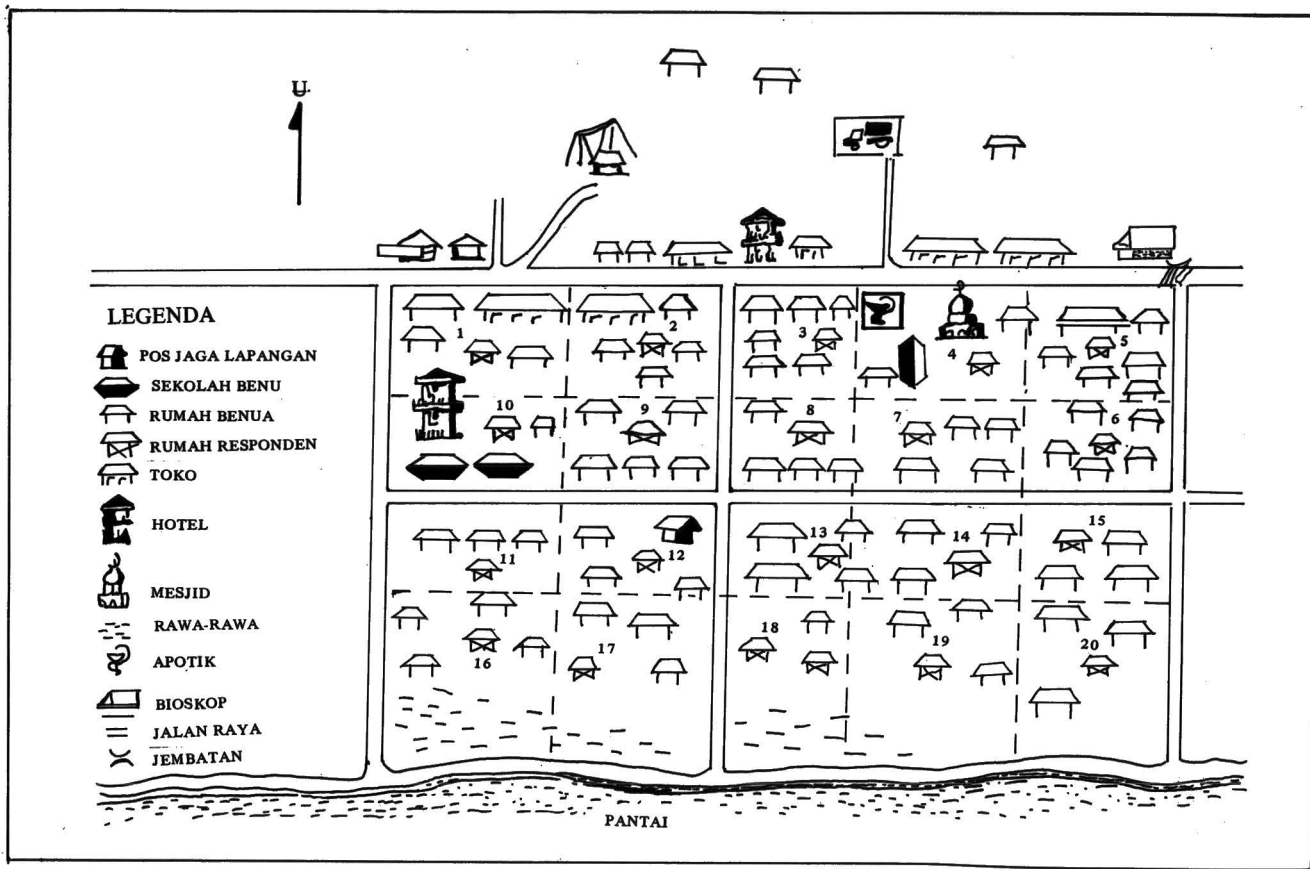
Dalam bab III diuraikan tentang gambaran umum kampung-kampung yang ada dalam kota Kendari. Secara garis besar bab ini memuat dua hal pokok, yaitu: (1) Kehidupan sosial dan ekonomi serta kondisi fisik kampung-kampung di kota tersebut; (2) Pola-pola umum kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat kampung-kampung. Bahan uraian dari bab ini diperoleh dari data kelurahan-kelurahan dan hasil wawancara dari para pejabat baik Kepala Kelurahan/Desa maupun Kepala Kecamatan yang bersangkutan. Dengan

demikian bab III ini merupakan acuan umum dalam rangka penelusuran kedua kampung yang secara langsung menjadi obyek sasaran penelitian ini (Benu-Benua dan Lepo-Lepo).

Dalam bab IV memuat gambaran khusus mengenai kedua kampung yang diteliti. Secara terperinci menguraikan gambaran umum masing-masing kampung sampel, seperti gambaran umum kampung; kondisi fisik kampung; kehidupan ekonomi; kehidupan sosial; pola kehidupan beragama, dan keluarga; serta prospek kehidupan di masa yang akan datang. Bahan uraian dan analisis di bab IV ini secara keseluruhannya diangkat dari hasil pengumpulan data lapangan melalui kuesioner dan ditunjang hasil wawancara dan pengamatan. Dengan demikian bab tersebut pada dasarnya merupakan suatu analisis dalam rangka menjawab permasalahan pokok penelitian ini. Pada akhirnya, penelitian ini diakhiri dengan suatu kesimpulan pada bab V sekaligus penutup dari keseluruhan uraian terdahulu.

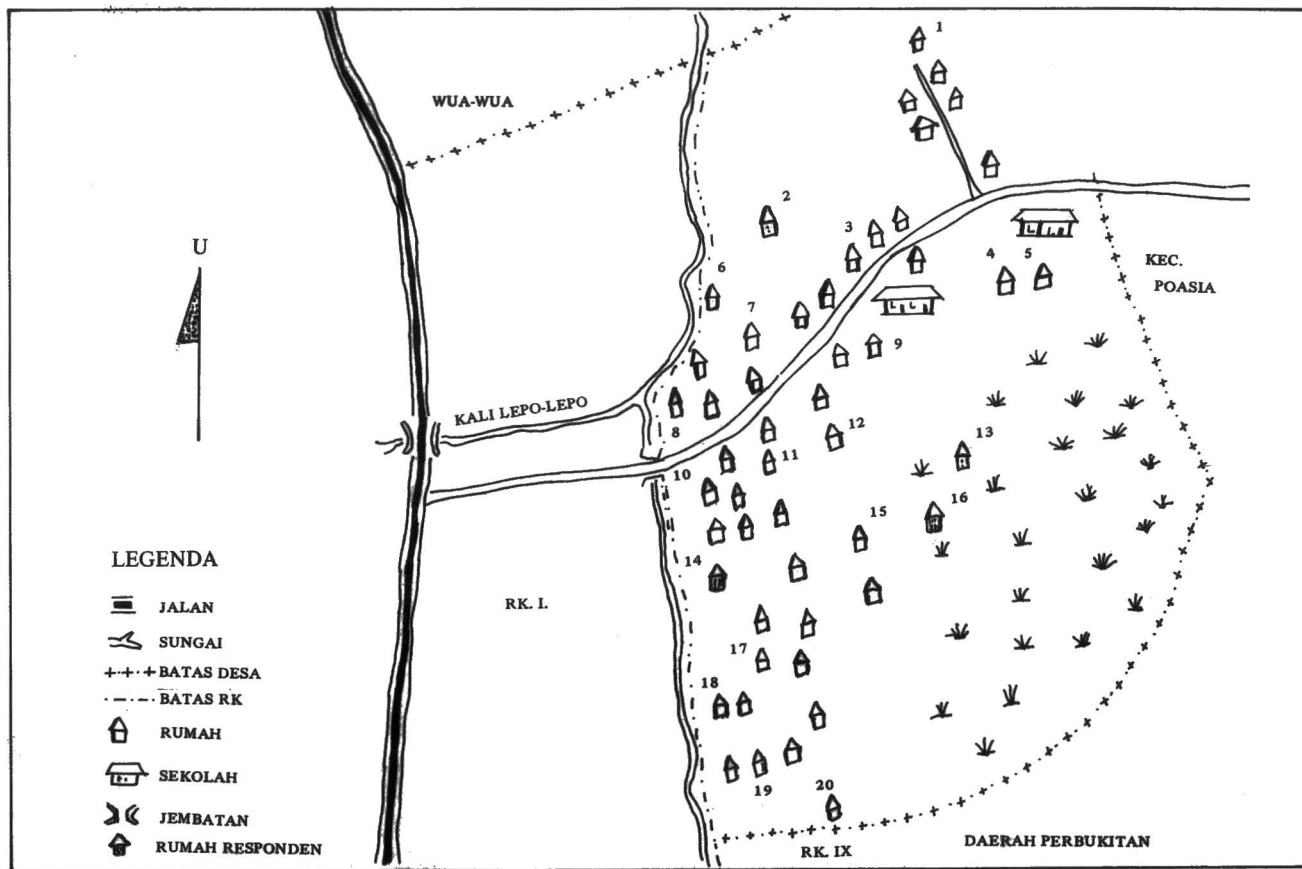


Peta 1 KOTA ADMINISTRATIF KENDARI
 Sumber: Kantor Walikota Administratif Kendari, 1982



Peta 2 RK III, KELURAHAN BENU-BENUA

Sumber: Kantor Kelurahan Benu-benua, 1982



Peta 3 RK II, KELURAHAN LEPO-LEPO
Sumber : Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, 1982

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA KENDARI

A. LOKASI DAN KEADAAN FISIK KOTA KENDARI

1. Lokasi

Berdasarkan jaring-jaring lintang dan bujur, Kota Kendari terletak sekitar 3° Lintang Selatan dan 120° Bujur Timur. Kota ini berada di ujung Teluk Kendari (Bappeda Sultra, 1978: 5).

Ditinjau dari segi letak ekonomi, Kota Kendari tergolong memiliki letak yang strategis. Hal ini berkenaan dengan letak Kendari dilalui jalur transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah pusat perekonomian di Propinsi Sulawesi Tenggara, bahkan daerah-daerah pusat perekonomian di luar propinsi. Jalur transportasi ini, meliputi darat, laut, dan udara. Kendari selain berfungsi sebagai ibu kota propinsi, juga berfungsi sebagai kota pelabuhan.

Prasarana jalur transportasi darat berupa jalan raya yang menghubungkan Kota Kendari dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten bagian darat (sebagai pembeda dengan kabupaten kepulauan) di Propinsi Sulawesi Tenggara. Jalur jalan raya yang penting, adalah: antara Kendari–Kolaka (sekitar 175 km); Kendari–Bandar Udara Wolter Mongisidi (sekitar 32 km); dan Kendari–Torobulu (sekitar 85). Jalur jalan Kendari–Kolaka merupakan jalan negara yang menghubungkan dua kabupaten bagian daratan, yaitu Kendari dan Kolaka. Ini berarti, Kota Kendari secara langsung terhubung dengan Pertambangan dan Pabrik Ferro Nikel yang terdapat di Kabupaten Kolaka. Jalur jalan Kendari–Kolaka, juga mempersingkat jarak antara Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, melalui penyeberangan dari pelabuhan laut Kolaka ke pelabuhan laut Bone (Sulawesi Selatan) dengan menggunakan sarana angkutan kapal ferry dan kapal kayu.

Jalur antara Kendari–Bandar Udara Wolter Mongisidi juga merupakan jalan negara. Adapun jalur jalan Kendari–Torobulu merupakan jalan propinsi yang mempersingkat hubungan kota Kendari (Kabupaten Kendari bagian selatan) dengan Kabupaten Muna. Dalam hal ini melalui penyeberangan laut antara Torobulu (Kendari Selatan) dengan Tampo (Muna) dengan menggunakan perahu motor. Kabupaten Muna sebagai salah satu kabupaten bagian kepulauan di Propinsi Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan potensi kayu jati (Pemda Tingkat I Sultra, 1980:6; dan Kotip Kendari, 1982).

Kota Kendari juga berada pada jalur transportasi laut yang ditandai dengan dimilikinya pelabuhan laut Kendari. Pelabuhan ini menjaring hubungan laut dengan daerah-daerah kepulauan di Propinsi Sulawesi Tenggara, seperti Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton. Kedua kabupaten ini terkenal dengan potensi ekonominya berupa kayu jati dan tambang aspal. Selain itu, lewat pelabuhan laut tersebut terjaring pula hubungan yang lancar dengan beberapa kota pelabuhan laut yang terpadang besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Ujungpandang (Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara, 1980: 147).

Kota Kendari yang terletak pada jalur transportasi udara ditandai dengan adanya Bandar Udara Wolter Mongisidi. Di bandar udara ini setiap harinya berlangsung penerbangan dengan GIA (Foker 28) dari/ke Ujungpandang, Propinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu terdapat pula penerbangan perintis yang dilakukan oleh MNA (Twin Otter). Penerbangan ini bersifat hubungan lokal, yaitu antara kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tenggara khususnya antara Kendari—Bau-Bau (ibu kota Kabupaten Buton) dan Kendari—Raha (ibu kota Kabupaten Muna). Hal ini dimungkinkan oleh adanya Bandar Udara Betoambari di Bau-Bau dan Sugimanuru di Raha (Pemda Tingkat I Sulawesi Tenggara, 1980: 13).

Sebagai suatu kesatuan wilayah administratif kota Kendari mempunyai batas-batas, sebelah utara dengan Kecamatan Soropia, sebelah timur merupakan sebuah teluk yang berbatasan dengan perairan Laut Banda, sebelah selatan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Ranomeeto, serta sebelah barat dengan Kecamatan Sampara.

2. Keadaan Fisik Kota

Kendari sekarang ini memiliki lahan perkotaan seluas sekitar 166 km² (Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara, 1980: 20). Lahan ini baru sebahagian yang terbenahi pembangunan fisiknya. Lahan yang telah dibangun belum keseluruhannya digunakan secara optimal. Ini berarti bahwa lahan perkotaan masih cukup luas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor penduduk, dana, dan usia kota. Menyangkut faktor penduduk ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang tergolong renggang, yaitu 464 jiwa/km² (Ibid). Menyangkut dana, ditandai dengan relatif masih terbatasnya biaya pembangunannya. Dan, menyangkut usia kota ditandai dengan

relatif masih mudanya kota tersebut memperoleh kedudukan sebagai ibu kota propinsi pada tahun 1964 (Pemda Tingkat II Kendari, 1978: 19).

Penggunaan tanah di kota ini baru sebagian kecil dari wilayah seluas 166 km². Luas penggunaan tanah di kota ini baru mencapai 1.023 ha. Ini berarti, tanah yang sudah digunakan baru sebesar 6,16% dari luas wilayah kota. Kemudian jika diperinci dari segi jenis penggunaan tanah tersebut terlihat bahwa untuk kepentingan bangunan, baik untuk bangunan pemerintah maupun untuk bangunan milik rakyat dan untuk kepentingan pertanian serta industri relatif sama, yaitu masing-masing sekitar 1,63% dari luas wilayah kota. Adapun yang terlihat memiliki luas yang terbesar adalah penggunaan tanah untuk bangunan jalan dan lahan reboisasi meliputi 3,45%. Dari kenyataan masih luasnya lahan kota yang belum dibangun, tersimpul pengertian bahwa kota tersebut memiliki perspektif perluasan kota yang cukup lapang.

Kota Kendari memiliki permukaan tanah yang berkombinasi, sebagian berbukit-bukit dan sebagian lagi relatif datar. Permukaan tanah yang berbukit-bukit dijumpai di wilayah utara dan barat. Di wilayah utara tersebut terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Nipa-nipa. Permukaan tanah yang relatif datar dijumpai di wilayah selatan, dan sebagian di wilayah timur. Keadaan demikian ini, menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan kota relatif menonjol ke arah wilayah selatan daripada wilayah lainnya.

Sesuai dengan keadaan permukaan tanahnya, maka keadaan tubuh tanah di kota Kendari relatif berbeda pula. Di wilayah utara dan barat banyak mengandung tanah liat bercampur batu-batuan dan pasir halus serta berwarna coklat dan keputih-putihan. Tingkat kesuburan tanahnya tergolong rendah dan umumnya ditumbuhi alang-alang. Sedangkan di wilayah selatan dan timur dapat dibedakan atas daerah pantai dan daerah yang bukan pantai. Tanah di daerah pantai merupakan tanah hasil endapan laut dan sungai. Dahulu, di daerah ini berawa-rawa dan ditumbuhi oleh pohon bakau dan nipah. Sekarang, dengan meluasnya bangunan di daerah ini menyebabkan rawa-rawa dan pepohonannya itu hampir tidak dijumpai lagi. Tanah di daerah bukan pantai, sebagian berupa tanah liat yang berwarna kekuning-kuningan, dan sebagian lagi berupa tanah gembur yang berwarna kehitam-hitaman. Pada umumnya daerah ini merupakan daerah perkebunan rakyat. Tanamannya

berupa kelapa, kopi, dan beberapa tanaman buah-buahan jangka panjang seperti mangga, langsung, nangka, dan durian (Pemda Tingkat I Kendari).

Kota Kendari mengalami musim hujan sekitar bulan Nopember sampai dengan Maret. Pada musim penghujan bertiup angin Barat. Sebaliknya sekitar bulan Juni sampai dengan September merupakan musim kemarau. Curah hujan rata-rata dalam setahun mencapai 2.000 mm. Ini berarti, bahwa secara relatif kota Kendari tergolong wilayah yang cukup basah. Suhu udara di daerah ini berkisar antara 21°C–30°C (Kantor Pemda Tingkat II 1978) .

Pada umumnya air di kota Kendar tergolong rawan. Sumber air hanya berasal dari beberapa sungai kecil yang pada musim kemarau terancam kekeringan. Beberapa penduduk yang menggali sumur untuk kebutuhan rumah tangga belum dapat memenuhi kebutuhan akan air minum yang bersih.

Untuk mengatasi kesulitan air tersebut, Pemerintah melalui PAM membangun sumber air minum bersih. Air dialirkan dari Sungai Pohara di Kecamatan Sampara yang berjarak \pm 40 km dari kota Kendari. Sumber air minum ini diresmikan pemakaiannya pada awal September 1982. Kapasitasnya diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi penduduk kota hingga akhir tahun 90-an. Jika asumsi tersebut tepat, untuk sementara waktu kerawanan air minum di kota tersebut teratasi, sungguhpun penduduknya lebih padat dari pada yang sekarang ini (PDAM Kabupaten Kendari, 1982).

Berdasarkan data terakhir tahun 1982, panjang jalan di dalam kota Kendari berjumlah 202 km. Menurut jenis dan kelasnya, prasarana jalan di kota Kendari dapat dibedakan menjadi 5, yaitu (1) Jalan Negara dengan lebar 8 m, berkondisi baik berjumlah 13,3%; (2) Jalan Propinsi dengan lebar 8 m, berkondisi baik berjumlah 3%; (3) Jalan Kabupaten dengan lebar 6 m, berkondisi baik berjumlah 32,2%; (4) Jalan Desa dengan lebar 4 m, berkondisi sedang berjumlah 17,3%; dan yang berjumlah besar (34,2%) adalah Jalan Lingkungan lebar 2 m, kondisinya masih darurat (Kantor Administratif Kendari, (1982). Jalan lingkungan terdapat dalam kampung, umumnya masih merupakan jalan tanah yang dikeraskan.

Sarana angkutan umum dalam kota berupa bis kota dan oplet. Pada tahun 1982, sarana transportasi umum ini berjumlah 48 bis kota dan 62 oplet. Di kota Kendari terdapat terminal bis/taxi sebanyak 8 buah. Bangunan terminal yang penting dan luas terdapat di

dua tempat, yaitu di Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga pusat kota. Sedangkan terminal yang lain berada di pinggiran kota.

B. SEJARAH PERTUMBUHAN KOTA KENDARI DAN PERKAMPUNGANNYA

Pertumbuhan kota Kendari dan perkampungannya meliputi tiga kurun waktu, yaitu antara (1) tahun 1918–1958; (2) tahun 1959–1964; dan (3) tahun 1964–sekarang (DPRD I Sultra, 1977: 29–42 & 133–139; dan Bappeda Sultra, 1978: 6–8).

1. Kurun Waktu Tahun 1918–1958

Pada dasarnya kurun waktu ini merupakan masa awal pertumbuhan kota Kendari dan perkampungannya sampai mencapai bentuk dan kedudukan seperti yang dimilikinya sekarang ini. Kota ini tumbuh dari suatu perkampungan lama dengan nama *Kandai* dan selanjutnya bernama *Kendari*. Lokasinya terletak di pantai Teluk Kendari bagian dalam. Tepatnya, lokasi itu sekarang menjadi daerah pelabuhan laut Kendari seluas sekitar 1 km².

Selama kurun waktu tersebut itu, Kendari memperoleh kedudukan administratif secara berturut-turut sebagai ibu kota *Kerajaan Laiwoi* (tahun 1918–1955), Onderafdeling Kendari (tahun 1940–1942); Afdeling Buton dan Laiwoi (tahun 1942–1948); dan Kawedanan Kendari (tahun 1949–1958).

a. Kendari sebagai ibu kota Kerajaan Laiwoi (1918–1955)

Secara umum kedudukan Kendari sebagai ibu kota Kerajaan Laiwoi berlangsung selama berdirinya kerajaan ini (1918–1955). Kerajaan ini berkembang di daerah Laiwoi dahulu (sekarang daerah Kabupaten Kendari) yang dipimpin secara berturut-turut oleh dua orang raja yaitu Raja Sao-Sao (1918–1928) dan Raja Tekaka (1928–1955). Jadi, kedudukan Kendari sebagai ibu kota Kerajaan Laiwoi itu merupakan awal pertumbuhan kota ini (1918–1958).

Meskipun demikian, karena sejak berdirinya kerajaan itu berkembang pula kekuasaan penjajahan di daerah ini menyebabkan kerajaan itu tidak dapat menegakkan kedaulatannya secara murni. Akibatnya kedudukan Kendari tersebut, berikut pembangunan fisik pemukimannya dan aspek-aspek lain pada umumnya diwarnai oleh kekuasaan penjajahan. Adapun penjajahan yang dimaksudkan itu adalah dimulai oleh Belanda (1918–1942) dan diakhiri oleh Jepang (1942–1945).

b. Kendari sebagai ibu kota Onderafdeling Kendari (1940–1942)

Kedudukan Kendari di samping ibu kota kerajaan juga terselubung sebagai pusat kegiatan pemerintahan penjajahan di masa itu.

Kedudukan terselubung itu kemudian menjadi resmi tatkala Pemerintah Hindia Belanda menetapkan berlakunya Undang-Undang yang disebut Regeling Tahun 1938. Pada pokoknya Undang-Undang ini berisi tentang penguasaan Belanda secara langsung terhadap pemerintahan di wilayah Karesidenan Sulawesi Selatan termasuk Kesultanan Buton (sekarang Kabupaten Buton) dan Kerajaan Laiwoi. Sebagai tindak lanjut, mulai tahun 1940 Kesultanan Buton dan Kerajaan Laiwoi secara administratif disatukan dengan nama Afdeling Buton dan Laiwoi di bawah pimpinan Asisten Residen. *Ibu kotanya ditempatkan di Bau-Bau* (sekarang ibu kota Kabupaten Buton). Afdeling ini melingkupi beberapa Onderafdeling yang masing-masingnya dipimpin oleh Controleur. Salah satu di antaranya adalah Onderafdeling Kendari yang beribu kota di Kendari. Kedudukan administratif ini dimiliki oleh Kendari sampai akhir kekuasaan Belanda di Indonesia (tahun 1942).

Pemerintah Belanda melakukan berbagai kegiatan berupa penataan Kendari sebagai pusat pengembangan kekuasaan kolonialnya di Daerah Laiwoi. Perkembangan Kendari secara fisik di masa itu bercorak sebagai hasil pembangunan Belanda, di antaranya berupa bangunan-bangunan yang bersangkutan dengan bidang pemerintahan, pertahanan, ekonomi, dan pendidikan.

Di bidang pemerintahan, Belanda mendirikan Kantor Controleur. Kantor ini didirikan berdampingan dengan Istana Raja Laiwoi. Tempatnya di suatu daerah perbukitan, tepat berhadapan dengan pelabuhan laut Kendari. Kondisi tempat ini cukup strategis di mana daerah permukiman Kendari terpandang secara keseluruhan. Karena secara umum pemukiman itu tetap diawasi terutama terhadap pendatang-pendatang dari luar Kendari yang masuk melalui pelabuhan itu.

Di bidang pertahanan, Belanda mendirikan asrama militer di Kendari Caddi, (sekitar 1 km sebelah barat Kendari). Tempat ini berupa lembah yang diapit oleh daerah perbukitan dan berada di tepi pantai. Oleh sebab itu merupakan benteng pertahanan yang tertata secara alami dan kukuh.

Di bidang ekonomi yang juga mencakup aspek pertahanan fisik, Belanda membangun pelabuhan laut Kendari dan jalan raya. Jalan

ini menghubungkan Kendari dengan daerah-daerah pedalaman. Sekarang menjadi jalur jalan Kendari—Pelabuhan Udara Wolter Mongisidi dan Kendari—Kolaka.

Di bidang pendidikan, Belanda mendirikan sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah seperti Volk School, Sekolah Gubernemen, Verkkolk School Lergang Volks Onder Wijzers, dan HIS. Sesuai dengan namanya, sekolah-sekolah ini dirancang khusus oleh Belanda untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan Belanda sendiri.

Dengan adanya pelabuhan laut dan jalan raya, Kendari memiliki prasarana transportasi penting sesuai dengan kondisinya sebagai daerah pantai dan juga melingkupi daerah pedalaman. Kendari tumbuh menjadi kota pelabuhan. Bersama dengan ini, kapal-kapal dagang Belanda dan Cina banyak berdatangan ke Kendari. Pada umumnya pedagang Cina ini tidak bermaksud hanya datang berdagang sementara, melainkan untuk tinggal menetap seraya mengembangkan usaha dagang mereka di daerah itu. Untuk maksud ini, mereka mendirikan kios-kios di seputar pelabuhan laut itu. Lama kelamaan dengan keuletan dan keterampilan mereka dalam berdagang, dan mereka juga menjadi rekanan Belanda di sektor perekonomian, terlihat usaha dagang mereka berkembang pesat. Kios-kios mereka makin memenuhi lokasi pelabuhan dan beberapa di antaranya berkembang menjadi toko. Daerah sekitar pelabuhan berkembang sebagai pusat perbelanjaan penduduk Kendari dan di sekitarnya. Akhirnya terbentuklah pasar Kendari untuk pertama kalinya.

Pasar Kendari itu kemudian berkembang pula secara lebih pesat. Hal mana turut dipengaruhi oleh makin gencarnya para pedagang/pelayar Bugis, Buton, Binongko, dan Muna mendatangi Kendari. Kecuali pedagang Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, juga berasal dari daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara. Mereka ini pun akhirnya nyak yang tinggal menjadi penduduk Kendari. Semuanya itu mendukung terbentuknya penduduk Kendari yang bercorak majemuk.

Adapun pengaruh dari terbukanya jalan raya antara lain berupa terjaringnya hubungan perekonomian antara Kendari sebagai pusat perekonomian di daerah itu dengan daerah-daerah pedalamannya. Terutama bagi Belanda lebih mudah menguasai daerah-daerah penting di pedalaman Kendari seperti Wawotobi Unaaha, Lambuya, dan Ranomeeto. Semuanya ini sekarang menjadi daerah-daerah kecamatan pedalaman di Kabupaten Kendari.

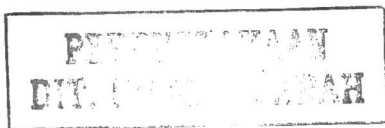
Di samping itu semua dengan adanya jalan raya, dan juga pelabuhan laut Kendari, mempengaruhi pula pertumbuhan kampung-kampung di sekitar Kendari. Pada jurusan jalan itu yang kini menjadi jalur Kendari-Bandar Udara tumbuh deretan kampung-kampung yang nama dan jaraknya dengan Kendari adalah: Sodohoa (± 1 km), Benu-Benua (± 3 km), Tipulu (± 5 km), Watu-Watu (± 6 km), Lahundape (± 7 km), Mandonga (± 8 km), Kadia (± 9 km), Wua-wua (± 12 km), dan Lepo-lepo (± 15 km). Dan pada jurusan jalan itu yang kini menjadi jalur Kendari-Kolaka, khususnya setelah meninggalkan Kampung Mandonga, tumbuh Kampung Puwatu dan Labibia. Jaraknya masing-masing dengan Kendari adalah ± 12 km dan ± 14 km. Sedangkan pada lokasi yang berseberangan laut (Teluk Kendari) dengan Pelabuhan laut Kendari tumbuh Kampung Abeli dan Nambo. Jaraknya masing-masing dengan Kendari melalui lintas penyeberangan teluk itu adalah ± 5 km dan ± 8 km. Ke semua kampung itu merupakan dasar pertumbuhan desa-desa dan kelurahan-kelurahan di kota Kendari sekarang ini.

Kemudian mengenai penduduk kampung-kampung tersebut, pada pokoknya terdiri dari penduduk asli Kendari dan penduduk dari luar Kendari. Kecuali kampung-kampung yang berdekatan dengan Kendari, seluruhnya didiami oleh penduduk asli Kendari yaitu suku bangsa Tolaki. Suku bangsa ini, sekarang lebih dikenal dengan penduduk asli daerah Sulawesi Tenggara bagian daratan. Dan pada kampung-kampung yang berdekatan dengan Kendari (Sodohoa, Benu-Benua, Tipulu, Watu-Watu, dan Lahundape) pada umumnya didiami oleh penduduk dari luar Kendari seperti suku bangsa Bugis, Buton, Muna, dan Bajo.

Demikian pula dalam hal mata pencaharian, penduduk Kendari dan kampung-kampung itu dapat digolongkan sebagai petani dan pekerja campuran. Bagi penduduk asli itu seluruhnya tergolong petani dan yang lain merupakan pekerja campuran di samping bertani juga berjual beli, nelayan, dan buruh.

c. *Kendari sebagai ibu kota Afdeling Buton dan Laiwoi (1942–1948)*

Kedudukan Kendari sebagai ibu kota Afdeling Buton meliputi masa kekuasaan Jepang di daerah Laiwoi dan atau di Nusantara ini ada umumnya (tahun 1942–1945). Juga meliputi masa awal Proklamasi Republik Indonesia sampai menjelang berdirinya Republik Indonesia Serikat 1945–1948.



Jepang setelah mulai berkuasa di daerah itu, menggantikan kekuasaan Belanda langsung memindahkan ibu kota Afdeling Buton dan Laiwoi dari Bau-Bau ke Kendari. Pejabat tertinggi di tingkat Afdeling yaitu Asisten Residen berkedudukan di Kendari. Pada masa penjajahan Jepang, kedudukan Asisten Residen diganti menjadi Kontikos. Ini berarti, kedudukan administratif Kendari meningkat di atas Onderafdeling seperti yang dimilikinya pada masa kekuasaan Belanda.

Kendati demikian, dilihat dari segi bangunan fisik pemukiman Kendari, relatif tidak memperoleh kemajuan. Hal ini disebabkan antara lain relatif singkatnya masa kekuasaan Jepang itu (± 3 tahun). Lagi pula, Jepang lebih mementingkan pendirian kubu-kubu pertahanan militernya.

Berkaitan dengan kepentingan pertahanan, Jepang membangun Pangkalan Udara Kendari II yang kini bernama Bandar Udara Wolter Mongisidi. Hampir sebagian besar penduduk Kendari dan sekitarnya, ditambah penduduk dari luar daerah Kendari, dikerahkan untuk membangun pelabuhan udara itu.

Jepang pada mulanya bersikap lunak terhadap pemimpin-pemimpin rakyat terutama dengan Raja Laiwoi pada masa itu (Raja Tekaka), maka terdapat kesempatan bagi raja ini memperhatikan rakyatnya dibandingkan dengan raja sebelumnya (Raja Sao-Sao) di masa kekuasaan Belanda. Perhatian itu, antara lain terwujud dalam penataan sistem pemerintahannya, usaha meningkatkan produksi penduduk, dan pembinaan kehidupan beragama serta kerukunan penduduk.

Penataan sistem pemerintahan dilakukan antara lain menyusun wilayah kerajaan menjadi beberapa Distrik. Salah satu di antaranya adalah Distrik Kendari yang melingkup ibu kota Kendari dengan kampung-kampungnya. Kampung-kampung kecil dihimpun secara administratif menjadi sebuah kampung. Karena penghimpunan ini maka khusus kampung-kampung di sekitar Kendari menciut menjadi:

- (a) tiga kampung pada jalur jalan Kendari-Bandar Udara, masing-masing dengan nama Benu-Benua, Mandonga, dan Lepo-Lepo;
- (b) satu kampung pada jalur jalan Kendari-Koloka dengan nama Puwatu, dan
- (c) satu kampung di seberang pelabuhan laut Kendari dengan nama Abeli.

Setiap kampung yang telah diatur itu dilakukan pemilihan dan pengangkatan pimpinannya yang terdiri dari Kepala Kampung, Wakil Kepala Kampung, dan beberapa orang pembantu lainnya. Penataan yang demikian itu merupakan yang pertama kalinya di wilayah kerajaan tersebut.

Mengenai usaha peningkatan produksi, antara lain mewajibkan setiap penduduk untuk mengusahakan tanaman industri terutama jelapa dan tanaman pangan terutama padi.

Dan untuk pembinaan kehidupan beragama dilakukan dengan memerintahkan pendirian rumah ibadah seperti mesjid dan mengembangkan pengajian di setiap kampung. Sejalan dengan hal ini, untuk mewujudkan kerukunan penduduk dikeluarkan larangan bagi setiap penduduk agar tidak bersikap kesukuan dan menonjolkan keturunan, adat istiadat, dan kepercayaan yang dimilikinya. Singkatnya diwajibkan setiap penduduk untuk mewujudkan toleransi sosial.

d, Kendari sebagai ibu kota Kewedanan Kendari (1949–1958)

Kedudukan administratif Kendari tersebut berlangsung sejak berdirinya negara federasi RIS pada tahun 1949 sampai dengan menjelang terbentuknya Kabupaten Kendari tahun 1958.

Pada masa RIS itu, daerah Laiwoi berada dalam lingkup Negara Indonesia Timur (NIT) dan secara regional diatur langsung oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah ini mengatur daerah-daerah bekas onderafdeling di Sulawesi Tenggara dan merubah namanya menjadi kawedanan. Pucuk pimpinan dijalankan oleh pejabat Pamongpraja yang disebut Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). Kawedanan Kendari beribu kota di Kendari.

Selama kurang lebih 3 tahun, Kendari menjadi ibu kota kawedanan. Kemudian keluar Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1952 yang antara lain menetapkan pembagian Daerah Sulawesi Selatan menjadi beberapa daerah Swatantra yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah Daerah Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Bau-Bau dan melingkupi beberapa kawedanan. Kawedanan Kendari berada dalam pengaturan Daerah Swatantra Sulawesi Tenggara.

Pada masa kedudukan Kendari tersebut, timbul pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Akibatnya pemerintahan di daerah ini terhambat jalannya, pembangunan tidak terlaksana dan penduduk tidak tenteram. Perkembangan Kendari, khususnya keadaan pemukiman mengalami kemunduran. Sementara itu, penduduknya bertambah secara pesat. Hal ini disebabkan membanjirnya penduduk dari luar Kendari. Mereka datang karena adanya gangguan keamanan yang timbul karena pemberontakan. Umumnya mereka ini menempati lokasi di Kendari yang

masih kosong. Akhirnya terbentuk kampung-kampung baru, di samping kampung yang telah ada.

Kampung-kampung baru itu mengelilingi pusat pemukiman Kendari yang telah ada. Di sebelah utara terbentuk Kampung Kendari Caddi, Kampung Butung, Kessilampe, Mata, dan Bungkutoko. Di sebelah timur terbentuk Kampung Anduonohu, Kambu, Anggoeya, Lapulu, Talia, Mandobi, dan Sambuli. Di sebelah selatan terbentuk Kampung Alolama dan Tobuuha. Di sebelah barat terbentuk Kampung Manggadua dan Gunungjati.

2. Kurun Waktu Tahun 1959–1964

Ciri pokok pertumbuhan kota Kendari pada kurun waktu ini adalah terbentuknya Kabupaten (Daerah Otonom Tingkat II) Kendari pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Pada saat itu Sulawesi keseluruhannya baru merupakan satu propinsi dengan nama Propinsi Sulawesi. Setahun kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960. Berdasarkan Undang-Undang ini Sulawesi dibagi menjadi dua propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Utara dan Tengah, serta Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Kendari merupakan ibu kota Kabupaten Kendari.

Mulai permulaan sampai dengan sekitar pertengahan kurun waktu tersebut (1959–1962), keadaan Kendari sebagai ibu kota kabupaten itu belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah belum pulihnya keamanan yang ditimbulkan oleh DI/TII tersebut. Suatu upaya yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten pada tahap permulaan, berkenaan dengan rekontruksi struktur perwilayahannya, dari bentuk district/onder district dan kampung menjadi kecamatan dan desa. Dari beberapa kecamatan yang terbentuk sebagai hasil rekontruksi itu, salah satunya adalah Kecamatan Kendari. Kecamatan ini, terletak di ibu kota Kabupaten Kendari, meliputi delapan desa, yaitu: Kendari, Benu-Benua, Mandonga, Lepo-Lepo, Puwatu, Mata, Gunung Jati dan Abeli. Desa-desa ini terbentuk sebagai hasil penginterograsian dari beberapa kampung yang telah ada.

Selanjutnya, menjelang berakhirnya kurun waktu tersebut itu, atau pada saat mendekati terbentuknya Proklamasi Sulawesi Tenggara (1963–1964), Kendari menampakkan kemajuan bila dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya. Di antaranya, berupa meluasnya lahan perkotaannya dari $\pm 2 \text{ km}^2$ menjadi $\pm 5 \text{ km}^2$; adanya

perintisan jaring-jaring jalan di pusat kota; meluasnya bangunan-bangunan yang relatif tergolong permanen, baik yang didirikan oleh penduduk setempat seperti perumahan maupun oleh Pemerintah seperti kantor-kantor dan prasarana ekonomi dan sosial budaya; serta meningkatnya mobilitas penduduk khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi.

Mobilitas dimaksud cukup berpengaruh dalam rangka penampakan suasana kota Kendari. Di sektor pendidikan, dipengaruhi oleh membanjirnya murid-murid untuk bersekolah di Kendari, baik penduduk dari dalam maupun dari luar Kendari. Yang menonjol bagi penduduk dari luar itu adalah usia sekolah lanjutan (SMTP dan SMTA sekarang). Pada saat itu, di Kendari telah berdiri Sekolah-Sekolah yang setingkat dengan SMTP seperti SMP, SMEP, dan STN, serta yang setingkat dengan SMTA seperti SMA, SGA, SMEA, dan SKKA. Mulai saat itu terlihat adanya ciri urbanisasi di Kendari, khususnya di kalangan usia sekolah itu. Sedangkan di sektor ekonomi, dipengaruhi oleh berkembangnya perekonomian rakyat di pasar Kendari yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk Kendari sendiri, melainkan juga oleh penduduk dari luar Kendari. Di samping itu mulai berkembang pula perdagangan lokal dan interinsuler melalui pelabuhan laut Kendari.

3. Kurun Waktu 1964 - Sekarang

Petunjuk pokok tentang pertumbuhan kota Kendari pada kurun waktu tersebut ini adalah terbentuknya Propinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan propinsi ini, tepatnya pada tanggal 27 April 1964, berlandaskan pada Perpu Nomor 2 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Di dalamnya dinyatakan bahwa ibu kota propinsi ini ditempatkan di Kendari.

Dengan demikian, Kendari berkedudukan rangkap. Di satu pihak masih tetap sebagai ibu kota kabupaten Kendari, dan di pihak lain sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara. Ini berarti pula bahwa secara administratif Kendari meningkat statusnya, dari pusat pemerintahan kabupaten menjadi pusat pemerintahan propinsi.

Konsekuensi dari status Kendari yang demikian itu melahirkan perencanaan pembangunannya agar mencapai perkembangan setaraf dengan ibu kota-ibu kota propinsi lainnya. Kendatipun semua rencana semua itu belum terwujud sebagai mana harusnya, akan tetapi yang pasti bahwa perkembangannya telah jauh lebih tinggi dari pada kedua kurun waktu tersebut terdahulu.

C. ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN

Kota Kendari yang berstatus sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara, juga sebagai ibu kota Kabupaten Kendari telah dimekarkan dalam wujud Kota Administratif. Dasar hukum pemekaran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 (Pemda Tingkat II Kendari, 1978:5). Kini, kota itu sedang dipersiapkan menjadi kota madya. Hal ini bersangkutan akan dipindahkannya segera ibu kota Kabupaten Kendari di Unaaha yaitu suatu tempat di pedalaman Kendari yang berjarak ± 70 km dari kota Kendari.

Wilayah kota Kendari tersebut sekarang ini melingkupi tiga wilayah kecamatan. Masing-masing dengan nama (1) Kecamatan Kendari kota; (2) Kecamatan Mandonga; dan (3) Kecamatan Poasia. Pada ketiga kecamatan ini terlingkup pula 26 kelurahan (Pemda Tingkat II Kendari, Ibid; Kotip Kendari, 1982, dan Kantor Statistik Propinsi Sultra, 1980:20).

Kecamatan Kendari Kota memiliki wilayah seluas 36 km^2 (22%) ibu kota kecamatan berada di Kendari. Kecamatan ini melingkupi sembilan kelurahan (1) Kandai; (2) Sodohoa; (3) Benu-Benua; (4) Tipulu; (5) Kemaraya; (6) Gunung Jati; (7) Manggadua; (8) Kasilampe; dan (9) Mata. Kelurahan tersebut pertama sampai yang kelima itu berlokasi di daerah jalur Jalan Negara Kendari—Bandar Udara Wolter Mongisidi. Kelurahan berikutnya sampai dengan yang tersebut ketujuh berlokasi di daerah perbukitan Kendari pada sebelah utara Pelabuhan Laut Kendari. Dan, dua kelurahan tersebut terakhir berlokasi di daerah jalur Jalan Propinsi Kendari—Mayaria (dari Pelabuhan Laut Kendari menuju muara Teluk Kendari). Adapun rata-rata luas setiap kelurahan itu tercatat ± 400 ha. Kelurahan yang terluas adalah 1.000 ha (Kelurahan Tipulu) dan yang terkecil adalah 100 ha (Kelurahan Kandai).

Kecamatan Mandonga memiliki wilayah seluas $42,34 \text{ km}^2$ (25%) ibu kota kecamatan bertempat di Puwatu. Kecamatan ini melingkupi tujuh kelurahan (1) Puwatu; (2) Tobuuha; (3) Alolama; (4) Labibia; (5) Mondonga; (6) Wua-Wua; dan (7) Lepo-Lepo. Kelurahan tersebut pertama dan kedua serta sebagian kecil wilayah kelurahan yang kelima itu berlokasi di daerah jalur Jalan Negara Kendari (Mandonga)-Kolaka. Kelurahan tersebut ketiga dan keempat itu berlokasi di daerah ruas jalan Kendari (Mondonga)—Muara Sampara (daerah pantai di kecamatan Sampara). Dan, sebagian besar wilayah Kelurahan tersebut kelima sampai dengan yang terakhir itu berlokasi di daerah jalur Jalan Negara. Rata-rata luas setiap kelurahan di

Kecamatan Mandonga ini tercatat \pm 600 ha. Kelurahan yang terluas adalah 7.825 ha (Kelurahan Labibia) dan yang terkecil adalah 246 ha (Kelurahan Mandonga).

Kecamatan Poasia memiliki wilayah seluas 87,32 km² (53%), ibu kota kecamatan bertempat di Anduonohu. Kecamatan ini meliputi sepuluh kelurahan (1) Kambu; (2) Anduonohu; (3) Tobimeita; (4) Anggoea; (5) Abeli; (6) Nambo; (7) Sambuli; (8) Lapulu; (9) Talia; dan (10) Bungbukota. Kelurahan tersebut pertama sampai dengan yang ketujuh itu berlokasi di daerah jalur jalan Kabupaten Kendari (Wua-Wua)–Lapuko (ibu kota Kecamatan Moramo). Dua kelurahan tersebut berikutnya berlokasi di daerah pinggiran pantai Teluk Kendari yang berhadapan dengan Pelabuhan Laut Kendari. Dan, satu kelurahan yang tersebut terakhir itu berlokasi di suatu pulau yang terletak di mulut Teluk Kendari dengan nama pulau Bungkutoko. Rata-rata luas setiap kelurahan di Kecamatan Poasia ini tercatat \pm 800 ha. Di sini terdapat dua kelurahan yang terluas yaitu Anggoea dan Nambo. Masing-masing kelurahan itu 600 ha. Sedangkan kelurahan yang terkecil adalah Lapulu dengan luas 300 ha (Peta 1).

Sesuai dengan rencana tata kota yang telah rampung rencana operasionalnya adalah Distrik I dan Distrik II yang meliputi Kecamatan Kota dan sebagian Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia. Rencana itu dijuruskan kepada suatu tujuan agar di masa datang kota Kendari berkembang sebagai kota pemerintahan, perdagangan, dan industri pertanian.

Dalam rangka perwujudan rencana itu, pembangunan kota Kendari berpusat di Kecamatan Kendari Kota dan Kecamatan Mandonga, khususnya di Kelurahan Kemaraya, Mandonga, dan Wua-Wua. Berhubungan dengan itu, bangunan-bangunan pemerintah baik berupa kantor-kantor maupun prasarana dan sarana ekonomi dan sosial-budaya pada umumnya ditempatkan di wilayah kedua kecamatan tersebut. Hal ini tampak dengan penempatan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari (di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari), Kantor Wali Kota Kendari, dan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga).

Akhirnya, disimpulkan bahwa kota Kendari—sebagai ibu kota propinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kendari memiliki lapisan wilayah administratif berupa kecamatan dan kelurahan. Sekarang,

wilayah itu terdiri dari 3 kecamatan dan 26 Kelurahan. Pemerintahannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Administratif Kendari. Dan sesuai dengan rencana pengembangannya serta berkenaan dengan akan dipindahkannya segera ibu kota Kabupaten Kendari di Unaaha, maka kota ini akan secepatnya pula ditingkatkan menjadi Kota Madya Kendari.

D. KEPENDUDUKAN

Penduduk kota Kendari tergolong penduduk yang heterogen, beberapa di antaranya adalah suku bangsa Tolaki, Muna, Buton, Bugis, dan Makassar. Suku bangsa Tolaki adalah penduduk asli daerah Kendari dan suku bangsa yang lain berasal dari luar daerah kepulauan Sulawesi Tenggara (Muna dan Buton) dan daerah Sulawesi Selatan (Bugis dan Makassar). Meskipun data kuantitatif tentang persebaran penduduk kota ini menurut daerah asal atau suku bangsanya belum tersedia, tetapi yang pasti bahwa di setiap kelurahan dihuni suku bangsa yang heterogen.

1. Pertumbuhan, Persebaran, Dan Kepadatan Penduduk

Petunjuk pokok tentang pertumbuhan penduduk kota ini adalah jumlahnya yang selalu naik dari tahun ke tahun. Sesuai data yang tersedia, pada tiga tahun terakhir ini (1979-1981), kenaikan jumlah penduduknya rata-rata 10,56% per tahun (Tabel II.2). Kecenderungan kenaikannya itu selalu melampaui angka rata-rata kenaikan penduduk di Propinsi Sulawesi Tenggara yang mencapai $\pm 3\%$ per tahun (Pemda Tingkat I Sultra, 1980:1). Lajuga pertumbuhan penduduk yang melebihi 2% per tahun dikategorikan sebagai laju pertumbuhan yang tinggi atau cepat (Salladien, 1980:51).

Kemudian bila diamati keadaan pada tiga kecamatan di kota itu, ternyata kenaikan penduduk yang menonjol adalah di Kecamatan Mandonga (rata-rata $\pm 17\%$). Sedangkan pada dua kecamatan lainnya, yaitu Kendari Kota dan Poasia hanya $\pm 7\%$. Ini berarti bahwa dukungan yang terkuat bagi kepesatan kenaikan jumlah penduduk kota ini, berasal dari Kecamatan Mandonga.

Kepadatan penduduk Kota Kendari pada tahun 1980 menunjukkan angka 464 jiwa/km². Sementara itu kepadatan penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Kendari Kota yaitu 1.171 jiwa/km². Kemudian secara berturut-turut, menyusul Kecamatan Mandonga dengan kepadatan 670 jiwa/km² dan Kecamatan Poasia dengan kepadatan 167 jiwa/km² (Tabel II.1).

Dalam hal persebaran jumlah penduduk pada tiga kecamatan tersebut, maka yang terbesar adalah di Kecamatan Kendari Kota yaitu 50,68% (Tabel II.2). Berikutnya di Kecamatan Mandonga (31,75%) dan yang terkecil adalah di Kecamatan Poasia (17,57%). Ini berarti bahwa kendatipun sekarang ini kenaikan penduduk kota Kendari yang tertinggi terdapat di Kecamatan Mandonga, tetapi lebih dari separuh jumlah penduduk kota ini masih berada di Kecamatan Kendari Kota. Kegiatan perekonomian/perdagangan berpusat di Kecamatan Kendari Kota sedangkan pengembangan fisik kota di Kecamatan Mandonga.

2. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Dilihat dari segi umur, penduduk kota Kendari bermodus pada golongan umur 10–49 tahun. Persentasenya sebesar 63,70% dari total penduduk kota ini sebanyak 81.657 jiwa. Golongan umur di bawahnya (0–9 tahun) dan di atasnya (50 tahun ke atas), masing-masing sebesar 31,15% dan 5,15% (Tabel II.3). Namun data ini berdasarkan keadaan tahun 1980 karena data kedua tahun terakhir ini belum tersusun secara lengkap. Dengan demikian, mayoritas penduduk kota ini sekarang tergolong berumur amat produktif dengan perkiraan penduduk usia 0–9 tahun dan 50 tahun ke atas dianggap belum/tidak produktif kerja.

Penduduk yang tergolong produktif kerja ini, sebagian besar pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar. Sekitar 11%, dari jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas tidak pernah sekolah (Tabel II.6)

Persentase penduduk yang tidak tamat SD besar, yaitu sekitar 33%. Berarti, cukup banyak penduduk yang mengalami putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sekitar 19% penduduk pernah mengikuti pendidikan menengah tingkat pertama/ sederajat, 6% sekolah menengah tingkat atas. Proporsi penduduk kota Kendari yang mencapai pendidikan pada perguruan tinggi, baik sampai tingkat sarjana muda maupun sarjana masih kecil, yaitu sekitar 1,6%.

Mayoritas (30,65%) penduduk kota Kendari yang berusia 10 tahun ke atas mempunyai lapangan kerja di bidang pertanian. Lainnya mempunyai lapangan kerja nonpertanian, seperti bidang jasa, perdagangan, perkantoran, dan bangunan (Tabel II.7).

Dalam hal jenis kelamin, penduduk kota ini bermodus pada laki-laki yaitu sebesar 52,47%. Jadi perempuan hanya sebesar

47,53%. Ini berarti bahwa secara kuantitatif sumber daya manusia yang terbesar di kota ini sekarang terdapat pada laki-laki.

E. KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI

Kehidupan sosial dan ekonomi di Kota Kendari, didekati melalui aspek-aspek kegiatan yang secara umum mewarnai keadaan sosial dan ekonominya. Berdasarkan data yang ada, keadaan yang digambarkan itu lebih terpusat pada kurun waktu terakhir ini.

1. Kehidupan sosial

Uraian kehidupan sosial penduduk kota Kendari ini, ditinjau dari penggunaan bahasa, pendidikan, kesehatan, dan agama.

a. Bahasa

Dalam hubungan sosial antarsuku bangsa di kota ini, secara merata telah menggunakan bahasa nasional, di kota ini juga berkembang pula pemakaian bahasa daerah pada masing-masing suku bangsa yang bersangkutan. Bahasa daerah yang menonjol, sekaligus menunjukkan nama suku bangsa penduduknya, adalah Tolaki, Muna, Buton, Bugis, dan Makassar. Selain itu, terdapat pula beberapa bahasa daerah lainnya yang digunakan oleh sebagian kecil penduduk kota ini (menurut bahasa daerah asalnya), seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Ambon, dan Toraja.

Dengan demikian, bahasa yang berkembang di kalangan penduduk kota ini tergolong pula bercorak majemuk. Kemajemukan ini dilatar belakangi oleh sejarah pertumbuhan kota ini, seperti terungkap terdahulu, di mana sejak dahulu kota ini dinamai oleh berbagai suku-suku bangsa (Tolaki, Muna, Buton, dan Bugis) serta perkembangan dewasa ini sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara.

b. Pendidikan

Keadaan pendidikan di kota Kendari dewasa ini, dibandingkan dengan kurun waktu sebelum menjadi ibu kota propinsi, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Meskipun demikian, dengan perkembangan jumlah penduduknya dan tuntutan pembangunan pada umumnya, keadaan pendidikan di kota ini sekarang terpandang belum memadai. Jumlah sekolah menurut jenjang persekolahan yang terdapat di kota ini masih terbatas. Keterbatasannya secara jelas tampak jika dikaitkan dengan usia sekolah dari masing-masing

jenjang sekolah (Tabel II.3 dan II.5). STK berjumlah 12 sekolah, sedangkan penduduk prasekolah ($\pm 4-5$ tahun) sebanyak ± 13.000 jiwa. SD berjumlah 62 sekolah, sedangkan penduduk usia sekolah ini (7-12 tahun) adalah sebanyak 20.000 jiwa. SMTP berjumlah 14 sekolah, sedangkan penduduk usia sekolah ini (13-15 tahun) sebanyak ± 10.000 jiwa. SMTA berjumlah 18 sekolah, sedangkan penduduk usia sekolah ini (16-18 tahun) sebanyak ± 10.000 jiwa. Sekolah-sekolah tersebut, khususnya dari SD-SMTA, sebagian besar berstatus negeri dan hanya sebagian kecil berstatus swasta. Namun demikian, dilihat dari ruang belajar, tenaga pengajar, dan fasilitas belajar-mengajar dari masing-masing sekolah dimaksud, pada dasarnya belum memenuhi kondisi yang optimal.

Dalam pada itu untuk tingkat Perguruan Tinggi, kota ini hanya memiliki satu Universitas Negeri dan IAIN cabang Ujungpandang (Sulawesi Selatan). Universitas tersebut, dengan nama Universitas HALUOLEO usianya baru ± 2 tahun dan hanya melingkupi 4 fakultas (FKUP, SOSPOL, Ekonomi, dan Pertanian). Dan, IAIN cabang tersebut hanya terdiri dari Fakultas Tarbiyah dengan program studi sampai Sarjana Muda. Dengan demikian Perguruan Tinggi di kota ini, juga belum dapat menampung para lulusan SMTA dari kota-kota kabupaten lainnya di daerah Sulawesi Tenggara.

c. Kesehatan

Pelayanan kesehatan di kota Kendari pada umumnya dilakukan di Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Poliklinik/Balai Pengobatan, dan Rumah Bersalin/BKIA serta oleh dokter-dokter yang melakukan praktek umum. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, berupa Apotik dan Rumah Obat. Dilihat dari banyaknya tempat-tempat pelayanan kesehatan itu, pada dasarnya belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di kota ini. Lagi pula tempat-tempat pelayanan kesehatan itu belum merata di setiap kecamatan Kota Kendari. Sebagian besar tempat pelayanan kesehatan berada di pusat kota, khususnya di wilayah Kecamatan Kendari. Hal ini menyebabkan penduduk di pinggiran kota ini, seperti di wilayah Kecamatan Poasia, pada umumnya memanfaatkan PUSKESMAS setempat. Demikian pula tempat praktek umum para dokter di kota ini hampir semuanya berada di wilayah Kecamatan Kendari.

Jumlah Rumah Sakit di kota ini sebanyak lima buah yaitu RSU Propinsi, RSU Kabupaten, RS TNI (REM 143), RS Palang Merah, dan RSU Santa (Swasta). Kelima rumah sakit ini mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 223 buah. Jadi, kapasitas tempat tidur dari semua rumah sakit di kota ini per 10.000 penduduk hanya 7 tempat tidur. Ini berarti bahwa daya tampung rumah sakit di kota ini relatif masih sangat rendah dikaitkan dengan jumlah penduduknya sebanyak 85.082 jiwa. Keterbatasan daya tampung ini bersifat sangat menyolok bila dikaitkan dengan kedudukan kota ini sebagai ibu kota Kabupaten Kendari yang berpenduduk sebanyak 307.019 jiwa, dan sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Tenggara yang berpenduduk sebanyak 943.297 jiwa (Kantor Statistik Propinsi Sultra, 1980 11 dan 61). Tambahan pula, kelima rumah sakit itu pada dasarnya belum didukung oleh peralatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Khususnya RSU Propinsi di kota ini yang merupakan rumah sakit yang mempunyai status tertinggi di daerah Sulawesi Tenggara, secara nasional baru tergolong rumah sakit kelas C. RSU ini, baru memiliki empat orang dokter ahli, yakni penyakit dalam, bedah, kandungan/kebidanan, dan kesehatan anak.

Meskipun sarana kesehatan masih amat terbatas tetapi secara umum keadaan kesehatan penduduk kota ini relatif telah membaik. Sebelum Pelita III (tahun 1978) gambaran pola penyakit di kalangan penduduk kota ini meliputi malaria, infeksi alat pernapasan, cacing, infeksi kulit, dan lain-lain. Tampaknya, pada tahun-tahun terakhir ini penduduk kota ini yang menderita penyakit-penyakit tersebut, seperti terlihat dari kunjungan pasien di rumah-rumah sakit, relatif sangat kecil jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh semakin efektifnya usaha-usaha penyuluhan kesehatan dan penyehatan lingkungan, baik yang dilancarkan oleh aparat Departemen Kesehatan maupun oleh pemerintah kota setempat serta pernah aktif dari penggerak PKK mulai dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan di daerah ini (Pemda Tingkat I Propinsi Sultra, 1982). Wujud dari usaha-usaha itu antara lain berupa penyuluhan langsung terhadap penduduk untuk memiliki kebiasaan hidup sehat; pengawasan dan pemeriksaan tempat-tempat pembuatan, penyimpanan, penjualan dan penyajian makanan dan minuman untuk umum; serta pemeliharaan, pembinaan sanitasi perumahan dan lingkungan permukiman pada umumnya.

Berkaitan dengan upaya pembinaan kesehatan, di kota ini telah dilancarkan pula pembangunan perumahan sederhana dan sehat,

serta pembangunan sumber air minum bersih. Perumahan tersebut didirikan oleh PERUMNAS dan BTN. Hingga kini telah selesai dan ditempati berjumlah ± 100 bangunan rumah. Sementara itu, sedang dikerjakan dan akan dikembangkan pembangunan secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan penduduk kota ini, khususnya yang tergolong berpenghasilan rendah. Sejalan dengan pembangunan perumahan itu, telah dirampungkan pula pembangunan air minum yang dikerjakan oleh PAM. Sejak tahun yang lalu aliran air ini telah digunakan oleh penduduk kota ini yang untuk tahapan pertama baru dapat melayani penduduk di pusat kota ini. Menurut perencanaan yang telah disusun, aliran air tersebut diusahakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota ini secara memadai hingga kurun waktu di tahun 2000 mendatang.

d. Agama

Kemajemukan penduduk kota Kendari dalam kehidupan sosial tidak hanya pada pemakaian bahasa dan adat istiadat melainkan juga pada keyakinan dalam agama, yakni agama Islam Kristen (Katolik dan Protestan), Budha dan Hindu.

Tempat-tempat ibadat di kota ini sebanyak 73 buah. Dari jumlah ini terdapat 76,7% berupa mesjid dan langgar serta 23, 29% adalah gereja. Perbedaan persentase ini merupakan refleksi dari perbedaan kuantitas pemeluk agama Islam dengan agama Kristen dan lain-lainnya. Jelasnya, pemeluk agama Islam lebih dari separuh penduduk kota ini. Sisanya adalah agama Kristen, Budha dan Hindu. Bagi umat Budha dan Hindu memusatkan tempat peribadatannya di daerah pemukiman penduduk asal Bali (Desa Jatibali) di Kecamatan Ranomeeto sebagai daerah perbatasan kota ini di bagian selatan.

Meskipun terdapat perbedaan, baik dilihat dari jenis agama maupun pemeluknya tetapi penduduk kota ini dalam kehidupan sosial memperlihatkan kerukunan beragama yang stabil; Kerukunan ini tidak hanya nampak dalam pergaulan sehari-hari tetapi juga tercermin dari pendirian tempat-tempat ibadah. Di kota ini terdapat beberapa mesjid dan gereja yang didirikan secara berdampingan.

Dalam rangka pembinaan kerukunan hidup beragama oleh pemerintah setempat yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tenggara telah menyelenggarakan forum musyawarah antarumat beragama di kota ini.

2. Kehidupan Ekonomi

Lapangan usaha di kota ini, tampak sangat bervariasi sungguhpun persentasenya relatif kecil. Ciri yang bersifat lapangan usaha pedesaan (rural) relatif masih nampak menonjol (39,65%) dibanding dengan kegiatan lain, seperti industri dan perdagangan (Tabel II.7). Lapangan usaha nonpertanian seperti bidang jasa (18,72%), perdagangan (12,85%), pemerintahan (10,69%) dan bangunan (7,62%).

Kegiatan perdagangan di kota ini, relatif menunjukkan adanya perkembangan. Perdagangan taraf ekspor khususnya jenis komoditi kayu bakau dan kayu rimba dengan tujuan ke Taiwan dan Jepang. Akhir-akhir ini telah mulai pula dilancarkan kegiatan ekspor rotan ke Jepang. Pelabuhan laut Kendari merupakan pelabuhan alam yang dapat menampung kapal-kapal dagang, baik dari dalam maupun luar negeri. Fasilitas pelabuhan tersebut terdiri dari satu dermaga pelabuhan laut dan satu dermaga pelabuhan lokal. Adapun cabang perusahaan pelayaran yang beroperasi di pelabuhan ini, antara lain PN. PELNI, PT. Sriwijaya Lines, dan dua Agen Perusahaan lainnya. Khusus kapal motor tempel melayani hubungan antara dua kecamatan (Kendari Kota dan Poasia).

Jenis komoditi yang diperdagangkan antarpulau adalah hasil-hasil perkebunan (Kopra, kopi biji, cengkeh); hutan (rotan, kayu jati, kayu rimba), dan hasil laut (ikan kering, agar-agar, ekor ikan, teripang, lola, dan japing-japing). Dari jenis komoditi tersebut yang tergolong penting adalah kopra, rotan, kayu rimba, teripang, dan ikan kering.

Sebagai sarana penunjang arus perdagangan yang makin meningkat, di kota Kendari terdapat sekitar 260 buah toko. Sebagian besar pertokoan berada di Kecamatan Kendari Kota dan sebagian kecil berada di Kecamatan Mandonga. Sedangkan Kecamatan Poasia hingga kini belum memiliki pertokoan. Sarana yang berupa pasar terdapat dua buah yang terdapat di Kecamatan Kendari Kota dan Mandonga. Jadi di Kecamatan Poasia, selain belum mempunyai pertokoan juga belum memiliki pasar. Untuk jenis Bank, di Kota Kendari terdapat 6 buah, yaitu Bank Indonesia Cabang Kendari, BNI 1946 Cabang Kendari, dan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Pusat Kendari. Kesemua Bank itu terpusat di Kecamatan Kota Kendari.

Mengenai perindustrian di kota ini, relatif baru berkembang. Di kota ini terdapat 517 buah industri kecil. Persebaran lokasi industri-industri kecil tersebut relatif belum merata. Khusus pada tahun 1981

dari jumlah industri yang ada, sekitar 71% terdapat di Kecamatan Kendari Kota, 23% di Kecamatan Mandonga, dan selebihnya berada di Kecamatan Poasia.

Penyerapan tenaga kerja, paling banyak (70,5%) berada di Kendari. Pada tahun 1981 seluruh industri kecil tersebut menyerap sebanyak 4.381 orang tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terkecil (3%) berada di Kecamatan Poasia.

Adapun jenis-jenis industri kecil itu, antara lain industri pertukangan dan mebel, industri batu bata, batako, dan tegel; industri konveksi pakaian; industri perahu motor; industri kuningan; industri rotan; dan reparasi alat-alat elektronik.

Berkaitan dengan kegiatan perekonomian (perdagangan, pariwisata) kota ini terdapat beberapa hotel dan penginapan. Hotel dan penginapan itu berjumlah 20 buah dengan kapasitas 175 kamar. Hotel yang terpandang berkualitas baik di antaranya adalah Kendari Beach Hotel, Arnins Hotel, Wisma Wolio, Wisma Resik, dan Wisama Andika. Potensi yang mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah ini, selain potensi alam (berupa pantai-pantai yang indah) juga berupa potensi budaya.

Sarana komunikasi yang menunjang kegiatan, baik di bidang perekonomian maupun pemerintahan berupa kantor Pos dan Giro, serta pelayanan Telekomunikasi yang mempunyai fasilitas pelayanan Telepon otomatis. Sampai kini (1981), pesawat telepon yang terdapat di kota ini berjumlah 609 buah. Dalam pada itu, sejak pertengahan bulan Agustus 1976 di kota ini telah dibangun fasilitas sistem SKSD Palapa sehingga hubungan dengan daerah-daerah lain melalui telepon berjalan lebih cepat. Dan sejak bulan April 1977 di kota Kendari terpancar pula penyiaran TVRI.

BAB III

GAMBARAN UMUM KAMPUNG-KAMPUNG

Yang dimaksud dengan kampung-kampung di sini adalah satuan-satuan pemukiman yang sejajar dengan Rukun Kampung, seperti telah tertera pada Bab I terdahulu. Dalam hal ini ditunjukkan pada kampung-kampung di Kelurahan Kota Kendari. Sebagai gambaran umum, pembahasan terhadap kampung-kampung dalam bab ini, dibatasi pada aspek kondisi fisik, kehidupan sosial dan ekonomi, serta pola-pola umum kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dari kampung-kampung tersebut.

Secara umum kondisi fisik serta kehidupan sosial dan ekonomi kampung-kampung di kota Kendari, tercermin melalui tipe desa/kelurahan yang melingkupi masing-masing kampung.

A. KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI SERTA KONDISI FISIK

Dilihat dari kondisi fisik kampung-kampung di kota ini selain dapat dikelompokkan atas perkampungan di pusat kota dan di pinggiran kota, juga dapat dikelompokkan atas kampung-kampung di pinggiran pantai dan kampung-kampung berciri pedalaman. Kampung-kampung yang berciri pantai tersebut sebagian berada di Kecamatan Kendari Kota seperti kampung-kampung di Kelurahan Mata, Kasilampe, Kandai, Sodoa, dan Benu-Benua. Dan sebagian lagi berada di Kecamatan Poasia yaitu kampung-kampung di Kelurahan Sambuli, Nambo, Bungutoko, Tailia, Lapulu, Abeli, Anggoeya, dan Kambu. Dengan demikian 80% dari kampung-kampung di Kecamatan Poasia ini berciri pantai, dan 20% lainnya memiliki ciri pedalaman. Sedangkan di Kecamatan Kendari Kota 44% berciri pantai dan 56% berciri pedalaman. Adapun kampung-kampung di Kecamatan Mondonga pada dasarnya memperlihatkan ciri pedalaman secara keseluruhannya.

Dalam hal kondisi fisik dalam arti tingkat kesuburan tanah, kampung-kampung yang terdapat di Kecamatan Mandonga merupakan kampung-kampung yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dibandingkan dengan kampung-kampung yang terdapat di Kecamatan Kendari Kota. Jelasnya bahwa kampung-kampung di Kecamatan Kendari Kota ini selain yang terdapat di Kelurahan Kemaraya, selu-

ruhnya adalah tanah yang gersang. Sedangkan tingkat kesuburan yang dimiliki oleh kampung-kampung di Kecamatan Mandonga, relatif sama dengan kampung-kampung yang terdapat di Kecamatan Poasia. Berdasarkan kondisi kampung-kampung tersebut, khususnya dilihat dari keadaan tanahnya itu, tampak di daerah pinggiran Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Poasia masih dikembangkan sebagai kampung-kampung pertanian. Sebaliknya pada kampung-kampung di Kecamatan Kendari Kota, sesuai dengan keadaan tanahnya, kini tampaknya berkembang sebagai wilayah yang memiliki kampung-kampung dengan kegiatan di luar sektor pertanian.

Selanjutnya dilihat dari kondisi fisik dalam arti kelestarian lingkungan, di antara kampung-kampung yang tersebar di tiga wilayah kecamatan ini terdapat kampung-kampung dengan keadaan lingkungan sekitar yang relatif terancam kelestariannya. Kampung-kampung tersebut, antara lain terdapat di Kecamatan Kendari Kota khususnya kampung-kampung yang terdapat di Kelurahan Manggadua, Gunung Jati, Kandai, Sodohoa, Benu-Benua, dan Tipulu. Jadi, hampir meliputi keseluruhan wilayah kecamatan Kendari Kota ini kelestarian lingkungan kampung-kampung terutama hutan-hutan di sekitarnya bersifat terancam. Hal yang sama juga dijumpai di Kecamatan Mandonga. Di Kecamatan ini terdapat pula beberapa kampung yang kelestarian lingkungan alamnya bersifat rawan seperti pada kampung-kampung di Kelurahan Mondonga, Alolama dan Labibia. Oleh karena itu kedua kecamatan ini pada musim kemarau merasakan kekurangan atau kekeringan air bagi kebutuhan penduduk di wilayah ini. Sebaliknya pada musim hujan terkadang menimbulkan banjir. Beberapa sungai yang terdapat di kedua kecamatan ini yang sering membawa kerugian bagi penduduk kampung-kampung di sekitar alirannya. Sungai-sungai itu adalah sungai Sodohoa dan Benu-Benua di Kecamatan Kendari Kota serta Sungai Mandonga dan Lepo-Lepo di Kecamatan Mandonga. Sedangkan di Kecamatan Poasia, meskipun kelestarian alam di lingkungan kampung-kampung belum dapat dikatakan dalam keadaan yang utuh tetapi dari perbandingannya dengan kedua kecamatan tersebut keadaannya relatif baik.

Dalam hal perumahan, penduduk kampung-kampung di pusat kota pada umumnya memiliki perumahan yang bersifat sementara. Lokasi bangunan biasanya tapas tanah, berlantai tanah dan beratap daun nipah. Tetapi ada pula sebagian perumahan yang berdinding papan atau berdinding gedek (anyaman bambu).

Adapun perumahan di kampung-kampung pinggiran kota sebagian seperti perumahan yang terdapat pada perkampungan pusat kota. Dan sebagian lainnya berbentuk rumah panggung dengan dinding dari daun sagu. Perumahan penduduk kampung di pusat kota telah ada yang memiliki jamban atau menggabung pada jamban tetangga ataupun menggunakan jamban umum, tetapi perumahan penduduk kampung di pinggiran kota pada umumnya belum memiliki jamban keluarga. Keadaan ini sama pula dengan fasilitas kamar mandi, air bersih, dan pembuangan sampah.

Adapun luas bangunan rumah pada kampung-kampung tersebut pada umumnya relatif sama berkisar antara 20–25 m² dan 25–30 m². Halaman rumah pada perumahan di kampung-kampung pusat kota rata-rata kurang dari 2 – 10 m², sebagian memiliki batas halaman pagar kayu sederhana dan sebagian lagi tanpa batas. Sedangkan kampung-kampung di pinggiran kota ini memiliki luas halaman antara 11–20 m², dan mengenai batas halaman pada dasarnya sama dengan perumahan perkampungan di pusat kota.

Sumber penerangan rumah-rumah di perkampungan pusat kota pada umumnya menggunakan lampu minyak tanah dan sebagian kecil lampu patromak. Sedangkan perumahan perkampungan di pinggiran kota pada umumnya memiliki lampu minyak tanah biasa.

Menyangkut makanan pokok, baik penduduk yang berada di perkampungan pusat kota maupun di pinggiran kota menggunakan makanan pokok yang bersifat campuran (beras, sagu, ubi-ubian, dan lain-lain). Pada umumnya penduduk di kampung-kampung tersebut mempunyai kebiasaan makan dua kali dalam sehari, yaitu siang dan malam.

Meskipun penduduk kampung secara keseluruhan tergolong kurang mampu, tetapi dalam hal berpakaian tidak sampai compang-camping. Penduduk perkampungan, baik di pusat maupun di pinggiran kota dapat mengadakan pakaian menurut kebutuhan keluarga mereka, namun dalam kualitas masih tergolong rendah. Dalam hal perbedaan pakaian, seperti pakaian pesta, pakaian kerja, dan pakaian rumah, pada umumnya relatif belum dapat memenuhinya.

Penduduk di kampung-kampung pusat kota pada umumnya memiliki mata pencaharian, seperti buruh, pekerja industri, tukang kayu, pekerjaan bangunan, penjual jajan, nelayan, kondektur oplet, dan penjual sayur. Dari segala jenis kegiatan itu yang nampak menonjol adalah jenis pekerjaan buruh pelabuhan, pekerjaan industri/perdagangan kayu, dan buruh bangunan serta nelayan.

Adapun penduduk di perkampungan pinggiran kota mempunyai jenis mata pencaharian, seperti bertani, buruh tani, beternak, buruh kasar pada pertukangan batu dan kayu, pengumpulan hasil hutan, penjualan sayuran, dan kerajinan anyaman tikar dan bambu. Jenis pekerjaan yang menonjol adalah bertani/buruh tani, buruh kasar pada pertukangan kayu dan batu.

Dalam pada itu, sesuai dengan mata pencaharian yang dipilih, rata-rata pendapatan penduduk berkisar Rp. 21.000,— — Rp. 30.000,— setiap bulan. Dengan demikian rata-rata pendapatan mereka kurang lebih Rp. 1.000,— sehari (Kotif Kendari, 1982). Dengan pendapatan yang demikian itu untuk satu keluarga dengan 6 orang anggota, berarti biaya hidup sehari sekitar Rp. 166,— setiap orang. Angka ini meunjukkan suatu tingkat pendapatan rumah tangga yang sangat rendah.

B. POLA-POLA UMUM KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI

Ditinjau dari segi orbitasi, kampung-kampung di kota Kendari dapat dibedakan menjadi dua pola pokok, yaitu orbitasi primer dan orbitasi tertier (Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Kendari, 1982). Yang dimaksud dengan orbitasi primer adalah letak kampung-kampung yang dekat dengan pusat kota. Sedangkan yang dimaksud dengan orbitasi tertier adalah letak kampung-kampung yang jauh dari pusat kota. Keseluruhan kampung-kampung yang berada di wilayah Kecamatan Kendari Kota dan Kecamatan Mandonga tergolong memiliki orbitasi primer. Orbitasi primer bagi kampung-kampung di kedua wilayah kecamatan itu juga ditunjang oleh adanya prasarana dan sarana transportasi yang cukup baik. Kampung-kampung yang berada di Kecamatan Poasia, sekitar 70% memiliki orbitasi tertier.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar kampung-kampung memiliki tingkat orbitasi primer. Orbitasi tertier yang sebagian besar dimiliki oleh kampung-kampung di Kecamatan Poasia disebabkan karena wilayah kecamatan ini relatif baru dikembangkan sebagai bagian wilayah kota Kendari. Kurang lebih sekitar lima tahun yang lalu wilayah Kecamatan Poasia ini belum dimasukkan sebagai wilayah kota Kendari. Oleh sebab ini hingga sekarang, relatif masih banyak prasarana transportasi belum terbangun secara baik, seperti jalan, jembatan, dan duiker (terowongan kecil yang dipasang di selokan dan sekaligus berfungsi sebagai jembatan lorong-lorong). Akibatnya hubungan dengan pusat kota Kendari relatif

belum selancar dengan kampung-kampung yang terdekat di Kecamatan Kendari Kota dan Kecamatan Mandonga.

Ditinjau dari sifatnya, perkampungan di kota Kendari menampilkan adanya dua sifat pola pemukiman, yaitu yang bersifat *rural* dan *urban*. Pola pemukiman yang bersifat *rural* ini, nampak pada kegiatan sosial ekonomi penduduknya mayoritas bertumpu pada bidang pertanian. Pola lingkungan pemukiman yang bersifat *rural* itu, pada umumnya tercermin di kampung-kampung Kecamatan Poasia.

Pola pemukiman yang bersifat *urban*, terlihat pada kampung-kampung yang kegiatan sosial ekonomi penduduknya bertumpu pada bidang non-pertanian. Pola mata pencaharian penduduk yang pada mulanya bercocok tanam, karena perkembangan kota bergeser ke bidang usaha industri kecil, bidang jasa, dan perkantoran. Pola lingkungan pemukiman yang bersifat *urban* ini tercermin pada kampung-kampung di wilayah pusat Kecamatan Kendari Kota dan Kecamatan Mandonga.

Dalam segi pola kehidupan sosial, penduduk perkampungan di kota Kendari ini telah menampilkan suatu masyarakat yang heterogen. Penduduk perkampungan terdiri dari berbagai suku bangsa. Penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini cenderung untuk tetap mempertahankan kebudayaan daerah asalnya. Hal ini tampak dalam hal pemakaian bahasa, adat istiadat, dan agama.

Meskipun penduduk perkampungan memperlihatkan ciri heterogen, namun pola hubungan sosial dalam pergaulan antarsuku bangsa tampak adanya keintiman. Sungguhpun masing-masing suku bangsa cenderung mempertahankan kebudayaan tetapi sikap saling pengertian, tenggang rasa antarsuku telah terlihat dalam kehidupan mereka. Hal ini antara lain dimungkinkan oleh adanya perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai golongan penduduk yang berekonomi relatif rendah.

Pembauran ini tidak hanya terwujud dalam kesatuan tempat tinggal dalam satu kampung, melainkan juga nampak dalam kawin-mawin antarsuku bangsa. Keadaan ini menyebabkan penduduk kampung-kampung kota Kendari dewasa ini yang dahulu berasal dari luar daerah Kendari, kini relatif sukar diketahui asal sukunya.

Wujud lain dari hubungan sosial itu adalah hubungan kerjasama dalam arti kegiatan tolong menolong atau kegotong royongan. Kegiatan gotong royong di setiap kampung masih terbina dengan baik. Perwujudannya tidak hanya tampak pada kegiatan yang bersifat suka ria (pesta, pendirian rumah), kegiatan untuk kepentingan ber-

sama antarwarga, juga kegiatan dalam peristiwa kedukaan (musibah, sakit, kematian).

Hubungan tolong menolong atau kegotong-royongan dewasa ini makin tampak terbina di antara kehidupan penduduk. Kegiatan gotong royong untuk kepentingan umum juga digerakkan melalui lembaga-lembaga seperti LKMD, RK, dan RT. Kehidupan tolong menolong antar sesama warga kampung berakar pula dari ajaran agama masing-masing.

Dalam kehidupan sehari-hari memang terlihat adanya persaingan dan konflik sosial, tetapi tidak bersifat ekstrim. Persaingan yang terjadi lebih menjurus pada usaha-usaha untuk saling berlomba dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada persaingan yang menjurus pada usaha mencelakakan sesama penduduk. Persaingan yang menjurus pada usaha merugikan sesama penduduk, bila terjadipun relatif tidak ekstrim dan penanggulangan akan segera dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat kampung.

Demikian juga dalam hal terjadinya konflik sosial, biasanya bersumber dari pelanggaran adat dari satu suku bangsa terhadap suku bangsa lain. Umumnya berkaitan dengan pelanggaran adat perkawinan, dan gangguan terhadap kehormatan rumah tangga. Pada kasus demikian ini, tokoh masyarakat berperan sebagai juru damai.

Mengenai pola kehidupan ekonomi bagi penduduk kampung-kampung di kota ini antara lain tercermin pada kualitas kehidupan masyarakat, pandangan tentang fungsi kerja, pendapatan dan pengeluaran.

Ditinjau dari segi kualitas kehidupannya, masyarakat kampung-kampung di kota ini tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Penduduk (kepala rumah tangga) pada umumnya memiliki pekerjaan, tempat bernaung/rumah tempat tinggal, dan aturan-aturan hidup bermasyarakat. Tentu saja semuanya itu tercatat pada tingkat yang relatif sederhana.

Penduduk yang bertempat tinggal di pusat kota memperlihatkan heterogenitas pekerjaan yang berciri urban seperti kegiatan dalam bidang jasa (buruh kasar, pembantu rumah tangga dan lain semacamnya) dan kegiatan jual beli (makanan-minuman di kaki lima, barang kelontong, bahan kebutuhan dapur) serta kegiatan pertukangan. Sedangkan penduduk yang berdiam di pinggiran kota masih banyak yang memperlihatkan ciri pedesaan (rural) dengan kegiatan bercocok tanam seperti bahan makanan dan perkebunan.

Berkaitan dengan penghasilan yang rendah tampak pula pada kesederhanaan dalam segi sandang, pangan, serta rendahnya tingkat pendidikan anggota keluarga. Sewaktu-waktu bila mereka memperoleh hasil lebih dari biasanya, pada umumnya sebagian kecil menyisihkan sebagai tabungan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Penduduk kampung mempunyai kebiasaan membentuk arisan dengan sesama tetangga menurut kemampuan anggota. Hasil arisan antartetangga biasanya untuk memperbaiki rumah tempat tinggal secara bertahap.

Penduduk kampung mempunyai prinsip hidup bahwa biarlah hidup dalam kemelaratan asal tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang seperti mencuri, merampok, dan kejahatan lain. Penduduk kampung-kampung di kota ini, dilihat dari segi mencari kerja cukup memadai. Tetapi pendapatan yang dihasilkan relatif rendah. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki terbatas. Kondisi tingkat pendidikan mereka relatif rendah (mayoritas tingkat sekolah dasar tidak tamat). Pola sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari bahwa yang penting adalah terpenuhinya kebutuhan makan untuk keluarga. Di kalangan penduduk kampung terdapat pandangan bahwa rezeki hari ini untuk kepentingan hari ini, sedangkan untuk hari esok adalah urusan kemudian. Memang masih banyak penduduk yang belum dapat mengatur keseimbangan antara produksi dan konsumsi keluarga.

Pola perbelanjaan penduduk perkampungan di kota Kendari dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbelanjaan rutin dan perbelanjaan ekstra. Yang dimaksud dengan pola perbelanjaan rutin pada hakekatnya merupakan usaha pemenuhan kebutuhan hidup makan-minum. Sedangkan pola perbelanjaan ekstra merupakan pemenuhan kebutuhan secara periodik. Pola perbelanjaan ekstra ini, seperti dalam pengadaan pakaian keluarga menjelang hari raya lebaran atau tahun baru, dan pembelian kebutuhan peralatan rumah tangga. Pola perbelanjaan ekstra tidak berlaku bagi penduduk yang berkecukupan.

Pola umum kehidupan sosial dan ekonomi penduduk perkampungan masih memperlihatkan corak kepribadian bangsa Indonesia yaitu kegotong royongan.

BAB IV

GAMBARAN KHUSUS KAMPUNG-KAMPUNG

Gambaran khusus kampung-kampung menyajikan uraian yang lebih khusus mengenai corak kehidupan penduduk kampung yang menjadi obyek penelitian. Kampung tersebut ada RK III Kelurahan Benu-Benua yang berada di pusat kota dan RK II Kelurahan Lepo-Lepo yang berada di pinggiran kota. Untuk selanjutnya RK III disebut kampung Benu-Benua dan RK II disebut Kampung Lepo-Lepo.

A. KAMPUNG BENU-BENUA

1. Pendahuluan

a. Masalah

Benu-Benua merupakan wilayah perkampungan yang menggambarkan kondisi miskin di pusat kota ini. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi fisik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi.

Pengaruh kondisi fisik tersebut berkenaan dengan lokasi wilayahnya yang relatif sempit. Perkampungan ini diapit oleh jalan dan lorong serta berada di pinggir pantai yang berawa-rawa. Pengaruh faktor sosial antara lain berkenaan dengan kehidupan penduduk kampung ini yang populasinya bersifat kritis. Penduduk kampung ini tergolong padat. Penduduk Kampung Benu-Benua ini memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja relatif rendah. Lagi pula tampaknya mereka itu memiliki anggota keluarga yang melampaui batas kemampuan ekonomi mereka. Sehingga dengan demikian, rata-rata setiap kepala keluarga di kampung ini mempunyai beban tanggungan yang berat. Sedangkan pihak-pihak penduduk yang berkecukupan di sekeliling kampung ini tampaknya memandang mereka itu sebagai penduduk dalam strata sosial yang terbawah. Di samping itu masih terdapat pula gejala sosial lainnya yang bersifat kurang menguntungkan, antara lain memandang masa depan sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dipikirkan. Yang penting bagi mereka adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup makan-minum, pagi, sore, dan malam hari. Bahkan lebih tragis lagi masih adanya di antara penduduk tersebut yang hanya menonjolkan kemewahan yang pernah dialami oleh

para leluhurnya di masa lampau. Di antara mereka masih ada yang beranggapan bahwa kesejahteraan hidup adalah masalah takdir semata, lalu timbul sikap pasrah apa adanya.

Wujud lain dari pengaruh faktor sosial yang bersifat kurang menguntungkan antara lain terdapatnya sikap pada sementara penduduk yang seolah-olah mendambakan bantuan dari kerabat dan sesama tetangga. Dilain pihak kehidupan sosial mereka juga masih banyak diwarnai oleh kehidupan tradisional yang kurang menghargai waktu untuk diisi dengan usaha-usaha yang bersifat produktif.

Pada dasarnya mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai. Sungguhpun lapangan kerja yang berkembang di kota ini khususnya di sekeliling Kampung Benu-Benua relatif telah banyak terbuka, tetapi belum terjangkau karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memiliki. Upah kerja mereka relatif tergolong rendah. Walaupun demikian, penduduk selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarganya. Di pihak lain sarana koperasi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari kesulitan semacam itu relatif belum berfungsi secara baik. Penduduk Kampung Benu-Benua sudah memperlihatkan cara hidup konsumtif. Belum terlihat adanya keterampilan untuk mengatur pengeluaran supaya seimbang dengan pendapatannya.

Bertolak dari uraian tersebut, maka yang menjadi pokok masalah penelitian di sini adalah seberapa jauhkah kehidupan penduduk kampung ini memiliki corak kebudayaan kemiskinan.

b Penelitian Lapangan

Sebelum melakukan penelitian langsung terhadap kampung ini, Tim melakukan kegiatan pengumpulan data sekunder. Data yang di-jaring mencakup kependudukan dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Data ini bersumber dari Kantor Wilayah Kecamatan Kendari dan dari Kelurahan Benu-Benua.

Setelah data sekunder tentang kampung ini terkumpul, Tim kemudian melakukan observasi umum terhadap lingkungan fisik perkampungan, dan keadaan sosial dan ekonomi penduduk. Kegiatan observasi ini dilaksanakan setelah adanya izin penelitian dari pemerintah kota Kendari, Kepala Wilayah Kecamatan Kendari dan Kepala Kelurahan Benu-Benua.

Setelah semua persiapan-persiapan penelitian dianggap rampung, maka Tim melaksanakan penelitian langsung ke lapangan selama sekitar tiga minggu. Pada hari-hari pertama merupakan masa orientasi untuk mengenal kampung ini secara umum. Juga termasuk di dalamnya kegiatan pemetaan kampung ini untuk mendapatkan responden bagi penelitian di kampung ini. Dengan membuat petak-petak dalam ukuran yang sama dalam peta tersebut lalu ditetapkan responden sebanyak 20 orang. Ke dua puluh orang responden ini diambil dari penduduk yang terjaring dalam kedua puluh petak dari peta itu.

Selanjutnya, Tim melakukan pengumpulan data dengan wawancara terhadap para responden itu. Instrumen yang digunakan adalah "Daftar Pertanyaan" yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebelum peneliti berada di kampung ini. Pengedaran "Daftar Pertanyaan" dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden.

Selain dari pengumpulan data melalui kuesioner tersebut, juga dilakukan wawancara secara terpimpin dengan para informan kunci. Informan kunci ini diambil dari tokoh masyarakat kampung ini yang dianggap banyak mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan di kampung ini.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian terhadap kampung ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

c. Susunan Karangan

Hasil penelitian terhadap kampung Benu-Benu ini disajikan dalam suatu susunan karangan yang terdiri dari delapan pokok uraian, yaitu: (1) Pendahuluan; (2) Gambaran Umum, (3) Kondisi Fisik Kampung, (4) Keadaan Ekonomi; (5) Kehidupan Sosial; (6) Pola Kehidupan Beragama; (7) Keluarga; dan (8) Kesimpulan. Kedelapan pokok uraian ini pada intinya mengacu kepada deskripsi tentang corak kebudayaan di kampung ini.

Pada seksi uraian tentang pendahuluan, berintikan pembeberan masalah yang secara faktual nampak dalam kehidupan kampung ini. Konkritnya dikaitkan dengan permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu seberapa jauh gambaran kehidupan dan corak kebudayaan di kampung ini. Selain itu diketengahkan pula secara umum langkah-langkah penelitian yang dilakukan sehubungan dengan permasalahannya.

Yang dimaksud dengan gambaran umum, adalah uraian perihal lokasi dan kondisi fisik, sejarah, kependudukan, administrasi, dan pemerintahan di kampung ini. Hal ini dimaksudkan untuk melukiskan selang pandang tentang pengenalan (identifikasi) mengenai kampung ini sebagai pengantar untuk tiba pada gambaran yang lebih mengkhusus tentang corak kebudayaan yang terdapat di kampung ini.

Pada seksi uraian tentang kondisi fisik kampung memuat hal-hal seperti: Kondisi jalan dan sanitasi lingkungan, Kondisi rumah/pekarangan, Kondisi tempat berkumpul, kegiatan-kegiatan sosial serta arena permainan anak-anak.

Pada seksi uraian tentang keadaan ekonomi, dikemukakan hal-hal yang menyangkut: Pola kehidupan, Mata pencaharian, Pola pengeluaran, Pola kebiasaan makan-minum, dan Kondisi umum taraf hidup.

Uraian kehidupan sosial meliputi hal-hal tentang pola kehidupan sosial, pola kepemimpinan dalam kampung, dan pola hubungan sosial. Sedangkan pada pola kehidupan beragama meliputi uraian tentang kewajiban dan penunaian ibadah agama, benda-benda keagamaan, keyakinan pada makhluk gaib, dan pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan.

Yang dimaksud dengan keluarga meliputi uraian tentang kondisi rumah tempat tinggal, mata pencaharian dan tingkat pendapatan, biaya hidup, besarnya rumah tangga, stabilitas hubungan perkawinan, pola hubungan keluarga, pendidikan anak dan peranan tetangga, peranan serta keluarga dalam perkumpulan, serta prospek kehidupan di masa mendatang.

Akhirnya, uraian ditutup dengan kesimpulan yang merupakan rumusan dari keseluruhan tentang Kampung Benu-Benu yang berfokus pada corak kebudayaannya.

2. Gambaran Umum

a. Lokasi dan keadaan fisik

Mengenai lokasi dan keadaan fisik Kampung Benu-Benu berikut ini menyangkut segi-segi: letak, batas, luas, bentuk, tanah, air, dan iklim.

Dipandang dari segi letak alamnya, Kampung Benu-Benu merupakan wilayah perkampungan di daratan rendah pantai yang terletak di pusat kota Kendari. Jaraknya dari pelabuhan laut Kendari kurang lebih 3 km dan kurang lebih 7 km dari pusat pemerintahan Propinsi Sulawesi Tenggara (Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara). Dengan demikian letak kampung ini, tepatnya berada di jalur jalan protokol (Jalan Negara) di ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dipandang dari segi letak ekonominya, Kampung Benu-Benu berada pada jalur transportasi kegiatan perekonomian di ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, baik melalui pelabuhan laut Kendari maupun melalui pelabuhan udara Wolter Monginsidi di mana jalan tersebut yang melalui kampung ini merupakan penghubung utama antara kedua pelabuhan tersebut. Dalam rencana pengembangan pelabuhan laut akan mencakup sebagian wilayah Kampung Benu-Benu.

Sebagai kesatuan wilayah perkampungan, Kampung Benu-Benu memiliki batas-batas, di sebelah utara berbatas dengan wilayah proyek reboisasi di Kota Kendari (Gunung Nipa-Nipa); di sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Sodohoa; di sebelah selatan berbatas dengan Teluk Kendari; dan di sebelah barat berbatas dengan lokasi perhotelan (Kendari Beach Hotel dan Wisma Aneka).

Perbatasan kampung tersebut di antara pusat-pusat kegiatan perdagangan di ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pusat-pusat perhotelan yang terpendang megah di kota ini.

Luas wilayah kampung ini meliputi kurang lebih 100 ha. Dengan demikian dari luas wilayah kelurahan yang melingkupinya yaitu Kelurahan Benu-Benu (500 ha), maka kampung ini hanya menempati luas wilayah kelurahan ini kurang lebih 20% (Kantor Kelurahan Benu-Benu, 1982).

Kampung Benu-Benu menampakkan bentuk perkampungan yang bersegi empat memanjang dari timur ke barat. Mengikuti arah memanjang tersebut di sebelah utaranya melintas menyilang perkampungan ini jalur jalan protokol. Sedangkan bagian selatan terdapat Teluk Kendari. Sesuai dengan rencana pembangunan jalan Kendari By Pass, wilayah kampung ini turut pula dilalui oleh jalan tersebut.

Kampung Benu-Benua memiliki permukaan tanah yang sebagian kecil merupakan gunung gunung dan lainnya dataran rendah yang diapit oleh pantai Teluk Kendari. Keadaan tanahnya, pada dasarnya bersifat kering yang bercampur batu-batuan serta ditumbuhi alang-alang dan rerumputan khususnya di wilayah utara. Sedangkan bagian selatan, dahulu ditumbuhi oleh pohon bakau dan nipah, namun sekarang semuanya tidak terlihat lagi dengan didirikannya bangunan-bangunan dan dermaga pelabuhan perahu.

Sesuai dengan kondisi tanahnya, sumber air di kampung ini pada dasarnya sangat sulit. Meskipun terdapat sebuah sungai (Kali Benu-Benua) tetapi pada musim kemarau airnya terancam kekeringan. Karena itu, ada sejumlah penduduk kampung ini yang menggali sumur secara sederhana, namun airnya keruh dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan sebagai sumber air minum bersih. Dengan berfungsinya PAM di kota ini kesulitan air minum tersebut pada sebagian penduduk di kampung ini mulai tertolong dalam pemenuhan kebutuhan air minum bersih.

Seperti halnya dengan iklim di kota Kendari, maka di kampung ini pun memperlihatkan ciri-ciri iklim dengan suhu udara rata-rata di atas 20°C. Curah hujannya rata-rata dalam setahun mencapai kurang lebih 2.000 mm. Musim penghujan di kampung ini berlangsung pada bulan Nopember sampai dengan Maret, dan musim kemarau berlangsung antara bulan Juni sampai dengan September.

b. Sejarah

Dilihat dari segi sejarah, Kampung Benu-Benua termasuk suatu kampung lama di kota Kendari. Oleh karena itu, kampung ini termasuk sebagai suatu perkampungan tua dan asli di kota Kendari.

Dahulu, seperti dijelaskan pada sejarah pertumbuhan kota Kendari pada Bab II di muka, Kampung Benu-Benua ini masih merupakan suatu daerah perkampungan yang masih sepi di mana penduduknya sangat jarang. Di sana sini terlihat hanya beberapa buah rumah tangga yang bentuknya merupakan rumah panggung sederhana, terdiri dari kayu bulat. Kebanyakan rumah di kampung ini berdinding gedek (anyaman bambu) dan beratap daun nipah.

Penghuni rumah tangga selain suku bangsa asli Kendari (suku bangsa Tolaki) juga terdiri dari suku-suku bangsa pendatang, seperti suku bangsa Bugis, Buton, dan Mune. Mata pencaharian penduduk kampung ini pada umumnya bertani/berkebun dan menangkap ikan.

Pada masa penjajahan Belanda (sekitar tahun 1900-an), pemerintah Belanda membuka jalan dari pelabuhan laut menuju ke daerah pedalaman. Jalan tersebut melintasi Kampung Benu-Benua. Dengan adanya jalan ini mempermudah hubungan antara pedalaman dengan kota. Penduduk pedalaman pencari kerja ke Kendari banyak yang menetap di kampung-kampung, salah satunya adalah Kampung Benu-Benua. Dalam perkembangannya penduduk kampung ini makin bertambah banyak. Sementara itu, areal kampung masih banyak yang berupa hutan belukar, hutan bakau, hutan nipah, dan padang alang-alang serta rawa. Kampung Benu-Benua sendiri belum termasuk wilayah kota Kendari. Kota Kendari hingga tahun 1959, hanya meliputi daerah pelabuhan dan Kelurahan Sodohoa yang sekarang.

Ketika Kendari menjadi ibukota Kabupaten Kendari, wilayahnya makin bertambah luas. Salah satu bagian perluasannya adalah Kampung Benu-Benua menjadi wilayah kota Kendari (sekitar tahun 1959). Sejalan dengan masuknya kampung tersebut menjadi wilayah perkotaan, perumahan penduduk juga mengalami peningkatan. Beberapa rumah yang dahulunya gubug meningkat menjadi semi permanen untuk ukuran pada masa itu, yaitu berdinding papan. Rumah semi permanen ini masih dalam jumlah yang kecil, kebanyakan berada di tepi jalan besar.

Pada tahun 1964, Kendari berfungsi sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara. Di Kampung Benu-Benua khususnya yang berada di tepi jalan raya protokol mulai nampak bangunan rumah permanen, dan perumahannya makin padat. Sesuai dengan perkembangannya (tahun 1980) Desa Benu-Benua yang dipimpin oleh seorang Lurah, dibagi menjadi tiga wilayah rukun kampung (RK), yaitu RK I, RK II, dan RK III. Salah satu di antara ketiga RK itu yaitu RK I yang disebut dengan Kampung Benu-Benua.

Dalam perkembangan selanjutnya, di sekitar kampung ini nampak adanya bangunan gedung-gedung, seperti perkantoran, pusat pertokoan, hotel, penginapan, dan rumah-rumah makan. Kampung ini mulai mempunyai ciri perkotaan, walaupun kualitas lingkungannya relatif belum begitu baik.

c. Kependudukan

Menurut data tahun 1981, penduduk Kampung Benu-Benua berjumlah 1.223 jiwa (25% penduduk Kelurahan Benu-Benua atau 3%

penduduk Kecamatan Kendari). Rata-rata pertambahan penduduk selama tiga tahun terakhir ini (1979–1981) berjumlah 6,75%. Pertambahan penduduk kampung ini melampaui rata-rata pertambahan penduduk tingkat kelurahan (4% per tahun). Sedangkan pertambahan penduduk untuk kota Kendari sendiri rata-rata sebesar 4,1% per tahun (Kotif Kendari, 1982). Pertambahan penduduk lebih dari 2% per tahun dikategorikan sebagai pertambahan penduduk yang cepat (Salladien, 1981 : 5). Dengan demikian pertambahan penduduk di kampung ini tergolong sangat cepat.

Penduduk kampung ini lebih banyak jumlah penduduk laki-laki (52,41%) daripada jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan penduduknya tergolong usia yang belum dan tidak produktif kerja. Dipandang dari segi ketenagaan kerja, pada laporan ini usia 10 tahun ke bawah dan usia 60 tahun ke atas digolongkan pada usia yang tidak produktif kerja. Pada waktu penelitian dilaksanakan, penduduk Kampung Benu-Benua yang tergolong usia nonproduktif sekitar 55%. Jadi secara kasar, belum ada keseimbangan antara penduduk yang produktif kerja dengan penduduk nonproduktif, karena jumlahnya lebih besar yang nonproduktif kerja.

Mayoritas penduduk kampung ini (59%) pernah menamatkan pendidikan SD, dan yang putus sekolah tingkat SD sekitar 25% serta sekitar 6% pernah sekolah pada tingkat sekolah lanjutan. Penduduk yang tidak pernah sekolah cukup besar jumlahnya, yaitu sekitar 10%. Dengan demikian ditinjau dari segi pendidikan penduduknya, juga masih tergolong relatif rendah (Kelurahan Benu-Benua, 1982).

d Administrasi dan pemerintahan

Secara administratif, Kampung Benu-Benua berstatus sebagai suatu rukun kampung (RK), yaitu merupakan salah satu RK di antara 3 buah RK di Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Kota. Kampung ini berada di pusat kegiatan pemerintahan di Kelurahan Benu-Benua ini.

Adapun yang bertindak sebagai pimpinan RK tersebut adalah seorang Ketua Rukun Kampung yang dalam hal ini juga merupakan tokoh masyarakat kampung tersebut. Untuk mengangkat Ketua RK ini melalui musyawarah mufakat dari penduduk kampung setempat yang direstui oleh Kepala Kelurahan yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam pemilihan dan pengangkatan Ketua Rukun Kampung tersebut, adalah kemampuan

dan pengalamannya untuk memimpin masyarakat serta loyalitas pengabdianya kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, juga dinilai dari ketokohnya di masyarakat kampung, baik dilihat dari segi agama, adat maupun aspek-aspek sosial lainnya. Selain dengan demikian pemilihan dan pengangkatan Ketua Rukun Kampung selain mempertimbangkan aspek-aspek kewibawaan sebagai tokoh masyarakat kampung.

Dalam lingkungan RK tersebut terbagi pula atas 5 rukun tetangga (RT) yang merupakan perangkat pembantu dari Ketua RK tersebut. Masing-masing rukun tetangga itu diketuai oleh seorang Ketua Rukun Tetangga. Jadi, di lingkungan rukun kampung terdapat lima orang Ketua Rukun Tetangga.

Pembagian atas kelima rukun tetangga tersebut dilakukan menurut pertimbangan tentang kondisi luas wilayah dan jumlah penduduknya, serta untuk memperlancar dan memudahkan pengurusan masyarakat kampung tersebut. Dilihat dari luas wilayah RK tersebut yaitu seluas kurang lebih 100 ha, maka setiap Rukun Tetangga tersebut rata-rata memiliki luas wilayah kurang lebih 20 ha. Sedangkan dilihat dari jumlah penduduknya yang 1.223 jiwa, maka setiap Rukun Tetangga tersebut rata-rata memiliki jumlah penduduk sebanyak 980 jiwa.

Sesuai dengan kedudukan kampung ini sebagai pusat kegiatan Kelurahan Benu-Benu, maka di kampung ini terdapat pula kantor kelurahan. Dengan makin pesatnya perkembangan kota Kendari dewasa ini, terutama dalam peningkatan statusnya sebagai Kotamadya, maka prospektif kampung ini memungkinkan untuk berdiri sebagai suatu tingkat Kelurahan tersendiri. Kemungkinan itu dilihat dari segi wilayah yang masih memungkinkan untuk diperlebar, dan juga jumlah penduduk makin padat serta kegiatan sosial ekonomi di kota Kendari yang tampaknya mengorbit ke arah selatan termasuk Kampung Benu-Benu.

3. Kondisi Fisik Kampung

a. Kondisi lingkungan

Mengenai kondisi lingkungan yang dimaksudkan di sini dibatasi pada uraian tentang kondisi jalan, selokan, pembuangan air kotor, sampah, air bersih, udara dan kebisingan.

Kondisi jalan di kampung ini seperti tampak pada lingkungan rumah tinggal belum semuanya tergolong tertib. Jalan gang dalam kampung masih merupakan jalan tanah dengan lebar 1–1,5 m. Baru sebagian kecil jalan-jalan diaspal dengan lebar sekitar 3 meteran. Jalan gang pada musim penghujan becek sebaliknya pada musim kemarau berdebu. Di sebagian wilayah kampung ini masih banyak yang memperlihatkan suatu kondisi lingkungan yang masih belum memenuhi sanitasi lingkungan yang sehat. Genangan air limbah masih nampak di beberapa tempat. Namun pada beberapa bagian wilayah kampung ini telah menampakkan lingkungan tempat tinggal yang terpan-dang memenuhi syarat-syarat lingkungan sehat.

Berkaitan dengan hal tersebut, khususnya mengenai pembuangan sampah (Tabel IV. 6), mayoritas responden (90%) mempunyai kebiasaan membuang sampah di tempat pembuangan sampah umum. Baru sebagian kecil penduduk yang memiliki tempat pembuangan sampah sendiri. Dengan demikian terlihat di sini bahwa sebagian besar para responden tersebut membuang sampah di tempat pembuangan sampah umum, baik yang ditunjukkan oleh pemerintah kota setempat maupun yang dibuat oleh penduduk kampung setempat. Dalam menggunakan tempat pembuangan sampah umum ini tampaknya di antara para responden tersebut masih kurang memperhatikan ketertibannya sehingga disekelilingnya masih berserakan sampah-sampah. Responden yang memiliki tempat sampah sendiri, tampaknya tergolong sebagai penduduk yang baik dilihat dari segi pendidikan maupun ekonomi relatif baik daripada penduduk lainnya di kampung ini. Suatu hal yang menggembarakan bahwa dari semua responden tersebut tidak terdapat lagi yang membuang sampah di jalan atau se-lokan maupun kali.

Dalam hal pemilikan sumber air bersih (Tabel IV. 6), sebagian besar responden (95%) menggunakan sumber air berupa sumur. Sumber air mereka pada umumnya berupa sumur timba yang pembuatannya dilakukan secara sederhana. Air sumur pada umumnya keruh dan kemerah-merahan serta rasanya payau. Karenanya sumber air yang mereka miliki itu belum dapat digolongkan sebagai sumber air minum yang bersih. Responden yang memiliki sumber pompa jumlahnya sangat sedikit, hanya sebesar 5%. Dari hasil pengamatan dalam penelitian itu ternyata responden seperti ini pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori kehidupan yang miskin. Untuk keperluan memasak, penduduk mengambil air dari PAM (bak umum) dan ada pula yang membeli dari tukang pikul.

Hal lain yang berkenaan dengan kondisi fisik tersebut adalah perihalan kebersihan udara dan kebisingan. Mengenai hal ini tampaknya masih belum merupakan sesuatu yang mengganggu kesehatan lingkungan. Dikatakan demikian karena pada akhir-akhir ini pemerintah setempat mulai meningkatkan penertiban, seperti pengaturan rumah-rumah penduduk dan penanaman pohon-pohon sebagai pelindung bahkan di sekeliling kampung ini terlihat mulai dibangun taman-taman kota. Lagi pula Kampung Benu-Benua belum merupakan daerah perkampungan industri yang dapat memberikan polusi udara. Meskipun demikian masih ada pula hal-hal yang pada dasarnya dapat mengganggu kebersihan udara di kampung ini, seperti pengaruh belum tertibnya pembuangan sampah dan pembuangan air limbah. Akan tetapi dengan adanya kegiatan penertiban kebersihan kota, diharapkan hal tersebut akan segera tertanggulangi.

Menyangkut masalah kebisingan juga belum merupakan sesuatu hal yang amat mengganggu bagi ketenteraman lingkungan atau penduduk yang ada di kampung ini. Hal ini sesuai dengan kondisi kampung ini yang sungguhpun berada di jalur jalan protokol, tetapi arus kendaraan relatif belum sepadat dengan kota-kota besar lainnya.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi tempat tinggal para responden belum seluruhnya terpandang memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kendatipun demikian masih terdapat hal-hal yang bersifat menguntungkan bagi ketenteraman lingkungan karena kesegaran udara relatif masih dapat dipertahankan. Selain itu gangguan kebisingan dan hiruk pikuk juga belum merupakan suatu permasalahan.

b. Kondisi rumah dan pekarangan

Jenis rumah yang dimiliki penduduk kampung dapat digolongkan atas rumah tunggal, rumah petak, dan ruang/kamar bagian rumah tunggal. Sebagian besar responden (85%) memiliki jenis rumah tunggal. Sebagian kecil lainnya (Tabel IV.4) memiliki tempat tinggal berupa/ruang/kamar bagian rumah tunggal dan rumah petak. Berarti para responden itu memiliki tempat tinggal yang pada umumnya terpisah (tersendiri) dari rumah keluarga lain.

Dilihat dari bentuk rumah, rumah tinggal bagi para responden itu hanya memiliki dua kategori yaitu rumah panggung dan rumah di atas tanah (dibangun langsung di atas tanah) dan hanya sebagian kecil saja berbentuk rumah panggung. Ini berarti bahwa para responden

itu hampir keseluruhannya telah meninggalkan bentuk rumah yang diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur selama ini yaitu betuk rumah panggung. Terwujudnya pergeseran bentuk rumah yang dimiliki oleh para responden itu dipengaruhi oleh penyuluhan pemerintah kota setempat. Selain itu, penduduk mulai sadar akan kepraktisan bentuk rumah di atas tanah.

Bahan ramuan yang digunakan untuk dinding rumah tapas tanah, umumnya anyaman bambu (gedek) atau papan. Menyangkut dinding rumah pada umumnya rumah para responden itu berdinding gedek bambu (55%) dan papan (45%). Di samping itu terdapat rumah dalam jumlah yang sangat kecil (5%) yang berdinding tembok. Responden ini adalah penduduk yang berkecukupan yang secara kebetulan berada di lingkungan kampung ini. Masih banyak rumah (70%) di kampung ini berlantai tanah yang dikeraskan. Rumah yang berlantai semen masih dalam jumlah yang terbatas. Memperhatikan keadaan lantai dan dinding rumah para responden ini terdapat petunjuk bahwa sebagian besar rumah para responden itu masih tergolong rumah darurat.

Kemudian, dilihat dari luas bangunan rumah maka rumah para responden yang berada pada ukuran terkecil adalah mempunyai luas bangunan kurang dari 20 m^2 , dan yang terluas berukuran $50 - 75 \text{ m}^2$. Rumah yang berukuran luas masih sedikit (5%), sedangkan ukuran luas rumah yang lebih kecil dari 20 m^2 itu tercatat sebanyak 20%. Ukuran rumah yang relatif menonjol dan memperlihatkan persentase yang sama (masing-masing 25%) adalah ukuran rumah $25 - 30 \text{ m}^2$ dan $40 - 50 \text{ m}^2$ (Tabel IV. 4).

Sesuai dengan luas bangunan rumah tersebut, maka banyaknya ruang yang dimiliki oleh masing-masing rumah itu pada dasarnya, hanya terdiri dari tiga kategori yaitu satu ruang, dua ruang dan tiga ruang. Persentase jumlah responden yang memiliki kategori banyaknya ruang itu, terdiri dari 70% yang memiliki dua ruang, 25% yang memiliki tiga ruang dan 5% yang memiliki satu ruang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumah yang ditempati oleh para responden itu berada pada ukuran yang relatif kecil, bila dihubungkan dengan banyaknya anggota keluarga mereka yaitu rata-rata sebesar 4 jiwa.

Selanjutnya dilihat dari segi status pemilikan rumah, hampir keseluruhan para responden tersebut (95%) menempati rumah milik sendiri. Jadi hanya sebesar 5% yang menempati rumah milik orang lain. Erat kaitannya dengan pemilikan rumah ini adalah status tanah

bangunan rumah. Pada umumnya para responden itu (90%) menempati tanah bangunan rumah yang telah lama digarapnya, namun belum memiliki sertifikat tanah. Responden yang telah memiliki sertifikat sebagai hak milik sendiri masih sedikit (5%). Selebihnya mendirikan rumah di atas tanah bangunan milik orang lain. Sungguhpun rumah para responden itu dilihat dari segi mutu bangunan dan luas rumah belum memadai, tetapi keseluruhannya memiliki rumah sendiri secara menetap.

Adapun dilihat dari segi peralatan rumah pada umumnya mereka (Tabel IV. 8) memiliki peralatan rumah tangga terutama kursi tamu. Dalam hal ini, kursi tamu masih berkualitas sederhana sesuai dengan kemampuan daya beli mereka. Peralatan rumah tangga lainnya seperti lemari, mesin jahit dan lain-lain semacamnya relatif sangat sedikit yang memilikinya. Terdapat beberapa responden yang memiliki peralatan rumah tangga seperti jam dinding, radio kaset, televisi, dan sepeda motor. Para responden yang demikian ini seperti halnya dengan responden yang memiliki rumah permanen, adalah mereka yang tergolong berkecukupan.

Secara khusus, mengenai pemilikan kamar mandi (Tabel IV. 6) tercatat datanya bahwa sebagian besar dari para responden itu menggunakan kamar mandi umum (70%). Jadi hanya beberapa orang responden saja memiliki kamar mandi sendiri dalam bentuk sederhana (20%). Beberapa responden menumpang di rumah tetangga. Demikian pula mengenai pemilikan jamban (WC), pada umumnya para responden itu menggunakan jamban umum (75%). Sisanya, yaitu sebesar 25% memiliki jamban sendiri dalam bentuk yang sederhana.

Perlengkapan rumah lain yang dapat dikemukakan di sini adalah berkenaan dengan sumber penerangan dalam rumah. Hampir keseluruhan (95%) dari para responden tersebut hanya menggunakan lampu minyak tanah. Dengan demikian, dari segi sumber penerangan rumah, para responden itu pada umumnya memiliki rumah dengan lampu minyak tanah.

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai pemilikan halaman rumah. Secara keseluruhan rumah para responden itu memiliki pekarangan. Pekarangan rumah yang relatif sempit dengan ukuran 2 – 10 m² (5%). Dan ukuran halaman yang terluas adalah lebih dari 40 m² dimiliki 10% dari jumlah responden. Pada umumnya rumah responden (45%) memiliki halaman rumah seluas 11 – 20 m².

Berkaitan dengan pekarangan rumah tersebut terlihat pula petunjuk lain yang memperjelas yaitu mengenai batas halaman rumah de-

ngan tetangga. Halaman rumah responden, kebanyakan (75%) tidak memiliki pagar pembatas dengan tetangga. Jadi, hanya 25% di antara mereka itu yang memiliki batas yaitu berupa pagar bambu/kayu yang dibuat secara sederhana.

c. Kondisi tempat berkumpul

Aspek lain yang berkaitan dengan uraian tentang kondisi fisik kampung para responden tersebut adalah berkenaan dengan tempat berkumpul, kegiatan-kegiatan sosial, dan tempat anak-anak bermain. Mengenai tempat berkumpul para responden pada waktu-waktu luang, seperti di sore hari atau malam hari pada umumnya menggunakan tempat-tempat seperti di rumah sendiri, di rumah tetangga dan lain-lainnya (Tabel IV. 24). Di tempat-tempat itu merupakan wadah pertemuan para responden untuk melepaskan lelah setelah selesai atau melakukan suatu pekerjaan. Jadi, pertemuan tersebut lebih bersifat kekeluargaan (informal). Dari jumlah keseluruhan responden itu yang menggunakan tempat berkumpul di rumah sendiri sebanyak 20%, di rumah tetangga sebanyak 70% dan selain dari dua jenis tempat itu adalah sebanyak 10%. Dengan demikian, tampaknya para responden itu menyenangi rumah tetangga untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul. Dalam hal ini, keadaan rumah tetangga yang relatif lebih lapang dan aman untuk didatangi beberapa orang.

Selanjutnya mengenai tempat-tempat kegiatan sosial di kalangan para responden itu pada dasarnya dapat dikelompokkan atas kegiatan yang bersifat urusan kemasyarakatan pada umumnya dan urusan keagamaan. Menyangkut tempat kegiatan-kegiatan sosial yang berkenaan dengan urusan kemasyarakatan pada umumnya dilakukan di Balai Kelurahan atau Lembaga Masyarakat Desa (LKMD). Sedangkan menyangkut tempat kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat keagamaan pada umumnya dilakukan di mesjid dan langgar. Selain itu, kegiatan sosial sering pula dilakukan dengan memanfaatkan tempat-tempat seperti sekolah, dan kantor kelurahan atau di rumah Kepala Kelurahan, di rumah Pemuka Agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan sosial antara lain berupa kegiatan untuk kepentingan bersama melalui usaha gotong-royong seperti perbaikan kampung, kegiatan kegiatan penyuluhan bagi masyarakat kampung tersebut, kegiatan-kegiatan untuk memajukan kehidupan bersama, kegiatan-kegiatan dalam rangka membina dan mempertahankan keamanan lingkungan kampung setempat, dan lain-lainnya.

Dalam pada itu mengenai tempat anak-anak bermain dapat disebutkan antara lain halaman rumah sendiri, halaman rumah tetangga, dan di tempat-tempat lainnya (Tabel IV.25). Tempat anak-anak bermain yang bersifat menonjol adalah di halaman rumah tetangga yang halamannya relatif luas. Dari jumlah responden tersebut terdapat sebesar 60% yang menyatakan bahwa anak-anak mereka pada umumnya memilih tempat bermain di halaman rumah tetangga. Adapun yang menyatakan bahwa anak-anak mereka bermain di halaman rumah sendiri hanyalah sebesar 15%. Sedangkan persentase yang terkecil, yaitu sebesar 5% dari jumlah para responden itu menyatakan bahwa anak-anak mereka bermain di jalan lingkungan kampung mereka itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan "tempat lain" di sini adalah tempat bermain yang relatif jauh dari rumah mereka, seperti di lapangan sepakbola atau lapangan olahraga lainnya di sekitar kampung ini. Dapat ditambahkan bahwa di Kampung Benu-Benua terdapat satu lapangan yang berfungsi serba guna tidak hanya untuk kepentingan olahraga tetapi juga untuk kepentingan upacara-upacara resmi baik pada setiap tanggal 17 setiap bulannya maupun pada upacara-upacara Hari-Hari Besar Nasional lainnya. Tidak hanya itu saja tetapi juga biasa digunakan untuk Sholat Idul Fitri dan Idul Adha bagi umat Islam di kota ini. Lapangan itu diberi nama Lapangan Benu-Benua. Dari hasil pengamatan sehari-hari, tampaknya banyak anak-anak dari para responden tersebut yang memanfaatkan lapangan itu sebagai tempat bermain-main buat mereka. Anak-anak yang bermain di jalan lingkungan kampung relatif belum merupakan gangguan bagi kepentingan umum.

Sebagai kelengkapan dari uraian ini dapat dijelaskan pula bahwa pada kenyataannya tempat anak-anak bermain tersebut tidak hanya ditempati oleh anak-anak para responden, tetapi juga terdapat anak-anak dari golongan penduduk yang berkecukupan, baik dari kampung ini maupun dari luar kampung ini. Ini berarti, pergaulan antara anak-anak di Kampung Benu-Benua dengan anak-anak di sekitar kampung tampak terbina dengan baik.

4. Kehidupan Ekonomi

a. Pola kehidupan ekonomi

Penduduk Kampung Benu-Benua pada umumnya pernah mengikuti pendidikan tingkat sekolah dasar. Namun demikian masih ba-

nyak penduduk yang tidak pernah sekolah. Sebanyak 35% responden di kampung ini, tidak pernah sekolah (Tabel IV. 1). Meskipun tidak pernah sekolah, di antara para responden tersebut berusaha mengikuti kursus pendidikan buta huruf (Tabel IV. 2). Kursus ini diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Benu-Benua.

Dengan modal pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah ini, penduduk mencari kerja. Hampir separuh jumlah responden (45%) mempunyai penghasilan kotor di bawah Rp. 30.000,- per bulan (Tabel IV. 9). Responden yang tergolong memiliki pendapatan kotor besar berkisar antara Rp. 81.000, – Rp. 90.000,- per bulan. Responden yang tergolong berpenghasilan besar berjumlah 15%. Sedangkan responden yang lain mempunyai penghasilan kotor setiap bulan berkisar antara Rp. 31.000,- – Rp. 60.000,-. Pola umum penghasilan responden di kampung ini berkisar antara kurang atau sama dengan Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 90.000,- per bulan. Ini berarti bahwa masih ada di antara responden yang berpenghasilan rata-rata kurang atau sama dengan, kurang lebih Rp. 300 per hari. Sedangkan yang dianggap berpenghasilan tinggi di kalangan responden tersebut hanya mencapai penghasilan rata-rata Rp. 3.000,- pada tiap harinya. Jadi, diukur dari tingkat membesarnya biaya hidup rumah tangga sehari-hari, maka penghasilan para responden tersebut pada dasarnya masih sangat rendah. Jelasnya bahwa kurang lebih 85% di antara mereka itu relatif belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer setiap harinya. Hal ini sesuai pula dengan data yang ada, bahwa pendapatan per kapita penduduk kampung ini tergolong dalam kategorisasi yang rendah (Kantor Bangdes Kabupaten Dati II Kendari, 1982).

b. Mata pencaharian dan pola perbelanjaan

Penduduk kampung di pusat kota pada umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai buruh pelabuhan, pekerja pertukangan kayu, pekerja bangunan, penjual jajan, nelayan, kondektur oplet, dan penjual sayur-mayur. Jenis pekerjaan yang dominan adalah sebagai buruh pelabuhan, pertukangan kayu, pekerja bangunan, dan nelayan.

Para ibu rumah tangga tampaknya mempunyai sumbangan besar bagi penghasilan rumah tangga. Para ibu rumah tangga banyak membantu menambah penghasilan keluarga dengan cara berjualan kue, sayur mayur, dan kerajinan rumah tangga.

Untuk memenuhi keperluan sehari-hari terutama dalam hal pangan, keluarga responden mempunyai kebiasaan belanja ke pasar

terdekat, warung dan tukang sayur. Warung dan kios yang berada di kampung ini menyediakan bahan makanan pokok, seperti beras, jagung, gula, garam, dan bahan makanan lain. Para responden juga dapat belanja sayur-mayur pada penjual keliling yang menjajakan sayur-mayur dari kampung ke kampung. Sementara itu, hampir semua responden mengandalkan pasar sebagai tempat perbelanjaan sehari-hari (Tabel IV.13). Tidaklah berarti bahwa mereka setiap hari berbelanja ke pasar. Rata-rata mereka berbelanja tiga dalam seminggu dengan volume pengeluaran (perbelanjaan) menurut kadar penghasilan mereka yang bersifat rendah.

Penghasilan keluarga responden, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja sebagian telah mencukupi (40%), tetapi sebagian besar lainnya menyatakan masih kurang. Apalagi untuk pemenuhan berbagai kebutuhan keluarga mayoritas responden (85%) menyatakan kurang (Tabel IV. 9).

Selain untuk kebutuhan pangan, sebagian besar responden (70%) juga mempunyai pengeluaran-pengeluaran yang bersifat khusus dan bersifat sewaktu-waktu (temporal). Jenis jenis pengeluaran tersebut antara lain untuk keperluan sosial, upacara/pesta, peribadatan, pendidikan anak, dan kekerabatan (Tabel IV. 12). Untuk kepentingan sosial meliputi sumbangan ronda malam, perbaikan jalan, dan lain-lain. Upacara/pesta meliputi sumbangan pada upacara sunatan, perkawinan, dan lain-lain kegiatan tetangga. Pengeluaran khusus yang paling sering dilakukan untuk kepentingan peribadatan.

Seperti juga pada pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari, maka pengeluaran yang bersifat khusus ini tidak dapat pula diartikan sebagai apa yang dilakukan oleh penduduk yang berkecukupan. Singkatnya pengeluaran khusus itu disesuaikan menurut kondisi penghasilan mereka.

Ada kalanya responden memperoleh rezeki yang lebih. Penggunaan kelebihan penghasilan antara lain untuk keperluan memperbaiki rumah (25%), menyimpan dalam bentuk tabungan pribadi (10%), menambah modal (5%), menabung dalam bentuk arisan (15%), dan yang memanfaatkan untuk keperluan lain (45%). Masih besar jumlah para responden yang dapat memanfaatkan kelebihan penghasilan mereka secara lebih produktif atau untuk kepentingan masa depan mereka.

c. Pola kebiasaan makan minum

Makanan pokok responden pada dasarnya bersifat campuran, yaitu campuran dari bahan-bahan makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, dan ubi-ubian. Para responden agaknya merasa enggan untuk menyebutkan jenis bahan makanan pokok mereka. Hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap dan anggapan bahwa makanan pokok merupakan salah satu indikasi tentang martabat dan kedudukan sosial seseorang. Pada umumnya mereka juga memandang bahwa makanan pokok merupakan salah satu perlambang kemampuan seseorang, sekaligus status sosial yang tinggi, bila menggunakan bahan makanan pokok beras. Pengadaan bahan makanan pokok ini, diperoleh dengan cara membeli, baik di pasar, kios, maupun warung.

Hampir semua responden mempunyai kebiasaan makan dua kali dalam sehari, yaitu makan siang dan makan malam. Makan siang pada umumnya dilakukan pada jam \pm 13.00 dan untuk makan malam pada jam \pm 20.00 Sungguhpun mereka pada dasarnya tidak terikat dengan waktu-waktu makan tersebut, tetapi dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh PKK setempat secara berangsur-angsur waktu makan tampaknya mulai mendapatkan perhatian. Terutama waktu makan malam telah banyak di antara responden itu yang memanfaatkannya sebagai waktu pertemuan dengan anggota keluarganya. Pada makan malam dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut kehidupan keluarga. Bagi mereka, agaknya makan pagi belum mendapatkan perhatian betapa pentingnya bagi kesehatan. Kebiasaan itu pada dasarnya telah membudaya bagi mereka terutama karena keterbatasan ekonomi. Mereka telah merasa cukup jika sebelum menuju ke tempat kerja atau melakukan pekerjaan di siang hari telah minum teh atau minum kopi.

Jika dilihat dari segi kualitas yang dipersyaratkan oleh komposisi makanan sehat pola makanan para responden ini dapat dikatakan bahwa makanan yang baik adalah makanan yang mahal.

d. Kondisi umum taraf hidup

Penghasilan para responden bila dikaitkan dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup keluarga mencerminkan adanya tiga kategori yaitu sangat kurang, kurang, dan cukup. Hanya sebagian responden (15%) yang merasakan penghasilannya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan-sandang keluarga (Tabel IV.9). Masih banyak responden yang belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan

hidup keluarga. Kalau hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari secara sederhana pada umumnya para responden dapat mencukupinya.

Untuk pemenuhan berbagai kebutuhan hidup keluarga, masih banyak responden (85%) belum dapat mencukupinya. Para responden yang demikian ini berupaya untuk mengatasi kekurangannya dengan cara meminta bantuan tetangga (85%), bantuan kerabat (10%), dan ada responden yang berhutang (Tabel IV.10). Ini berarti, bahwa banyak responden yang mengandalkan bantuan tetangga. Hubungan sosial antartetangga nampak erat dalam hal tolong-menolong.

5. Kehidupan Sosial

Uraian tentang kehidupan sosial para responden di kampung ini, antara lain mengetengahkan pola kehidupan sosial dan pola kepemimpinan dalam kampung.

a. Pola kehidupan sosial

Pola kehidupan sosial penduduk kampung ini ditinjau dari segi hubungan-hubungan sosial, hubungan tolong menolong, persaingan dan konflik, serta pergunjangan (gosip).

Tingkat hubungan sosial di kampung para responden secara umum dapat dinyatakan cukup meluas. Di antara jumlah responden tersebut 55% mengenal sebagian besar sesama warga kampung (Tabel IV 14). Para responden Kampung Benu-Benua masih memiliki kondisi hubungan sosial yang relatif belum dipengaruhi kehidupan yang serba individual. Meluasnya hubungan sosial tersebut tidak hanya di kalangan para responden tetapi juga di kalangan anak-anak mereka. Responden yang menyatakan bahwa anak-anaknya jarang bermain dengan anak tetangga hanya sekitar 25%.

Dalam pergaulan sehari-hari, hampir semua responden mempergunakan bahasa Indonesia. Ada kalanya antarpenduduk yang sesuku bangsa untuk lebih akrab menggunakan bahasa daerah. Walaupun dengan logat bahasa yang berbeda, namun penduduk kampung ini, baik tua maupun muda dapat menguasai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dalam hidup bertetangga, penduduk kampung saling hormat-menghormati bahasa dan adat suku lain. Antarsuku bangsa saling ingin mengenal bahasa dan adat yang berbeda (Tabel IV.23).

Ditinjau dari hubungan kawin-mawin dalam arti sikap terhadap adanya perkawinan dengan orang yang tidak sesuku bangsa, hampir semua responden (95%) menyetujui perkawinan antarsuku. Hubung-

an sosial yang terjalin dalam kehidupan para responden tidaklah bersifat sempit. Penduduk kampung ini tidaklah beranggapan bahwa perkawinan yang ideal jika masih berlangsung dalam lingkungan suku bangsanya. Tetapi dalam hal perkawinan yang berbeda agama, belum semua penduduk menerimanya (Tabel IV.34).

Jenis-jenis kegiatan yang sifatnya dapat mendorong keakraban di antara responden adalah berupa arisan, olah raga, dan kegiatan gotong-royong. Dari ketiga kegiatan itu yang banyak diikuti responden adalah kegiatan gotong royong dan arisan (Tabel IV.29). Kerukunan hidup melalui aktivitas gotong royong untuk kepentingan bersama relatif masih terbina dengan baik di kalangan responden. Keikutsertaan responden dalam kegiatan olah raga di kampung masih tergolong belum banyak (10%). Keterlibatan para responden dalam kegiatan sosial dipengaruhi ada tidaknya waktu atau persediaan waktu.

Kegiatan sosial yang dilakukan secara periodik antara lain pembersihan kampung (kerja bakti) dua kali dalam satu bulan. Kegiatan arisan, terutama diikuti para ibu biasanya diadakan sekali atau dua kali dalam satu bulan.

Hubungan tolong-menolong di kalangan para responden secara konkrit dapat nampak pada waktu mengalami kesulitan keuangan. Tempat responden meminta bantuan bila mengalami kesulitan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pada umumnya ke tetangga atau teman yang dianggap akrab (Tabel IV.10). Di kalangan para responden tersebut masih terbina dengan baik rasa kesetia kawan dan rasa senasib sepenanggungan. Secara umum, bila para responden mengalami kesulitan keuangan menjadikan tetangga sebagai tempat meminta bantuan.

Ciri tolong menolong lain yang tampak di kalangan responden adalah pada waktu hajatan atau kemalangan. Dalam pelaksanaan kedua peristiwa itu, para tetangga dan kerabat responden ikut membantu. Demikianlah mereka saling membantu, baik secara moril maupun materiil.

Dalam hidup bermasyarakat sering pula terjadi konflik (persengketaan) antarsesama warga. Demikian pula di kampung ini ada kalanya terjadi suatu persengketaan. Sengketa yang terjadi pada umumnya disebabkan karena masalah anak, tanah pekarangan, dan hutang piutang.

Masalah anak sebagai penyebab sengketa antara lain masih terdapatnya sebagian kecil responden tersebut yang dalam pergaulan anaknya bila terjadi perkelahian dengan temannya cenderung selalu mem-

bela kebenaran anaknya tanpa meneliti lebih jauh sebab-sebabnya. Namun penyebab ini tampaknya persentasenya amat kecil (15%) dibandingkan dengan responden yang tidak melakukan hal itu. Penyebab sengketa yang bersangkutan dengan tanah/pekarangan antara tetangga tampaknya juga sangat jarang terjadi (10%). Demikian juga sengketa yang disebabkan karena hutang juga masih dalam jumlah yang kecil (Tabel IV.19). Sedangkan faktor lainnya sebagai penyebab sengketa seperti pertentangan paham rasa iri dan lain-lain juga relatif sangat kecil persentasenya (10%), dibandingkan dengan responden yang tidak melakukannya.

Semuanya itu sebagai pertanda bahwa persengketaan yang terjadi di kalangan responden itu pada pokoknya relatif amat kecil, baik dilihat dari kuantitas responden yang melakukannya maupun jenis masalah penyebabnya. Cara penyelesaian sengketa yang sering dilakukan oleh para responden itu, yakni: secara kekeluargaan tanpa bantuan orang lain; secara kekeluargaan dengan bantuan orang lain; secara hukum melalui pengadilan dan lainnya (Tabel IV.21). Penyelesaian secara kekeluargaan tanpa bantuan orang ketiga, banyak dilakukan para responden itu. Kemudian penyelesaian secara kekeluargaan dengan bantuan orang lain tercatat sebesar 10%. Sedangkan penyelesaian secara hukum sebesar 15%. Ditilik dari cara-cara yang dilakukan para responden itu dalam penyelesaian sengketa di antara mereka menunjukkan bahwa mereka pada umumnya masih cenderung pada pola-pola penyelesaian sengketa yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kesetia kawan. Para responden masih mengandalkan perlunya pembinaan kerukunan hidup berdasarkan kekeluargaan.

Selanjutnya dilihat dari kecenderungan adanya penyebab persengketaan pada dasarnya jika dilihat dari keseringannya maka yang paling banyak (sering) menjadi sebab sengketa adalah secara berturut-turut: anak, hutang piutang dan tanah pekarangan. Pengertian sering di sini tidaklah berarti banyak kalinya terulang di kalangan para responden itu akan tetapi dilihat dari perbandingannya dengan besaran frekuensi responden yang terlibat dalam faktor-faktor penyebab sengketa itu. Adapun yang banyak berperan untuk menyelesaikan persengketaan itu, antara lain Kepala RK dan Pemuka Agama (Tabel IV.22).

Dalam kaitannya dengan masalah sengketa tersebut maka para responden itu tampaknya amat berhati-hati di dalam hidup berte-tangga, terlebih-lebih dengan tetangga yang berlainan bahasa dan adat istiadat. Mereka saling menjaga supaya tidak menimbulkan keretakan

hubungan. Pada umumnya para responden berusaha menghindari adanya persengketaan yang timbul karena kesalah pahaman bahasa dan adat istiadat orang lain. Di antara mereka ada yang melakukan usaha berupa memperkenalkan bahasa dan adat istiadat yang dimilikinya dalam rangka usaha menimbulkan saling pengertian dengan sesama tetangga yang berlainan bahasa dan adat istiadat (Tabel IV.23). Prinsip hidup mereka adalah saling menghormati antara sesama tetangga.

Gosip atau pergunjingan sebagai salah satu ciri yang menerangkan tentang kehidupan sosial. Dalam uraian ini ditujukan pada keadaan yang berlaku di kalangan para responden antara lain dengan melihat beberapa gejalanya seperti kebiasaan berbincang-bincang di antara mereka itu dan obyek perbincangan mereka serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan semuanya itu. Sebagian besar responden (85%) menyatakan sering berbincang-bincang dengan tetangga atau sesama warga kampungnya. Sisanya (15%) menyatakan jarang melakukan hal serupa itu. Adapun tempat yang biasa digunakan untuk berbincang-bincang itu kebanyakan dilakukan di rumah tetangga.

Mengenai obyek perbincangan mereka pada dasarnya menyangkut barang yang baru dimiliki, tetangga, perihal kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Dilihat dari frekuensi obyek yang dibicarakan itu, yang lebih menonjol (95%) adalah berkenaan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Sedangkan yang menyangkut perbincangan barang yang baru dimiliki, tercatat pula bahwa hampir keseluruhan responden menyatakan tidak pernah memperbincangkan barang yang baru dimiliki (Tabel IV.24).

Dilihat dari waktu-waktu yang digunakan untuk berbincang-bincang tersebut pada umumnya bagi para lelaki melakukannya pada saat-saat luang atau selesai dari pekerjaan seperti di sore hari atau di malam hari. Yang paling menonjol di antara kedua waktu ini adalah di malam hari. Sedangkan bagi para wanita, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga para responden itu pada umumnya berbincang-bincang ketika bertemu di sumur umum, di kali atau ketika bertemu di pasar. Dengan demikian waktu berbincang-bincang bagi para ibu-ibu rumah tangga dari responden tersebut, relatif tidak mempunyai waktu-waktu yang tertentu, akan tetapi menurut kesempatan jika bertemu dengan sesama teman mereka.

Memperhatikan dengan gejala gosip di kalangan para responden itu, seperti diungkapkan itu, dapat ditarik pengertian bahwa tampaknya relatif masih bersifat positif. Dikatakan demikian karena terlihat

bahwa para responden itu melakukan perbincangan dengan rekan-rekannya hanyalah merupakan suatu kegiatan pengisi waktu luang dan bersifat melepaskan lelah (bersantai) setelah melakukan pekerjaan. Lagi pula obyek perbincangan mereka agaknya terfokus pada masalah bagaimana memperbaiki kehidupan mereka.

Berkaitan dengan hal itu, maka dapat pula dikatakan bahwa pengaruh negatif yang timbul dari perbincangan semacam itu relatif dapat dihindarkan. Suasana kehidupan yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan dapat menghindarkan keretakan hubungan sosial. Hampir keseluruhan dari mereka itu menyatakan bahwa keadaan kampung mereka sama amannya dengan masa-masa yang lalu. Ini berarti bahwa mereka dapat membina suasana aman tersebut. Bahkan terdapat pula responden yang menyatakan bahwa keadaan kampung mereka sekarang ini lebih aman.

b. Pola kepemimpinan dalam kampung

Sebagai telah dikemukakan terdahulu bahwa yang tergolong sebagai pimpinan/kepala atau tokoh warga di kampung ini adalah ketua/rukun kampung. Namun ketua/rukun kampung ini dilihat dari segi kepengurusan dan pemerintahan di kelurahan cenderung terpan-dang sebagai pemimpin yang bersifat formal, tetapi kenyataannya di kalangan masyarakat kampung setempat cenderung terpan-dang sebagai tokoh masyarakat yang tidak hanya bersangkutan dengan pemerintahan kampung tetapi juga pada aspek-aspek kehidupan masyarakat pada umumnya.

Di samping ketua/rukun kampung tersebut terdapat pula pemimpin atau tokoh warga di kampung ini seperti ketua/rukun tetangga, tokoh agama atau tokoh adat serta tokoh pendidik. Ketua/rukun tetangga tersebut merupakan pemimpin kampung sebagai pembantu utama dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya kepada ketua rukun kampung. Tokoh agama adalah mereka yang ditokohkan di kalangan penduduk kampung setempat menurut agama yang mereka anut. Karena agama yang terdapat di kampung ini terdiri dari agama Islam dan agama Kristen, maka tokoh-tokoh agama di kampung ini dapat dikategorikan atas agama Islam dan tokoh agama Kristen. Yang dimaksud dengan tokoh agama Islam adalah imam mesjid, khotib, dan perorangan lainnya yang dianggap banyak mengetahui dan mendalami seluk-beluk agama Islam. Sedangkan yang dimaksud tokoh agama Kristen seperti pendeta dan pengurus-pengurus

gereja lainnya serta perorangan yang dianggap banyak mengetahui dan mendalami agama Kristen.

Adapun tokoh lainnya seperti tokoh adat, dan tokoh pendidik yang terdapat di kampung itu pada dasarnya sesuai dengan adat suku bangsa yang tampaknya masih berkembang di kampung ini, juga sesuai dengan kedudukan seseorang sebagai pendidik. Jelasnya bahwa tokoh adat yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang banyak mengetahui dan mendalami seluk-beluk adat suku bangsa di kampung ini seperti tokoh adat suku Bugis, Tolaki, Buton dan Muna. Sedangkan tokoh pendidik dimaksud adalah guru-guru SD yang berdiam di kampung ini.

Dilihat dari segi hubungan antara pemimpin-pemimpin masyarakat kampung tersebut dengan warga kampung ini pada umumnya nampak suatu hubungan yang didasari oleh rasa kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi. Sungguhpun tokoh-tokoh tersebut dipandang masyarakat kampung ini mempunyai strata sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan warga biasa di kampung ini, tetapi dari para pemimpin itu sendiri dekat dengan para warga kampungnya secara kekeluargaan dan bersifat mendidik. Hal ini sejalan dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin informal.

Dilihat dari segi hubungan kerja sama antara para pemimpin tersebut, tampak antara satu dengan yang lain juga bersikap kekeluargaan tanpa adanya sikap penonjolan dari satu dengan yang lain. Dengan perkataan lain para pemimpin itu saling bekerja sama dan berperanan menurut sifat kepemimpinannya masing-masing. Para pemimpin tersebut secara umum terlihat amat besar peranannya dalam membina kehidupan masyarakat di kampung ini. Peranannya, antara lain dalam segi penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan para responden itu. Dalam penyelesaian persengketaan di kampung ini para pemimpin tersebut itu bertindak sebagai juru damai. Ketua RK dalam menyelesaikan suatu persengketaan yang terjadi di kalangan responden pada khususnya dan penduduk kampung ini pada umumnya selalu mengundang kehadiran para pemimpin lainnya itu. Jika mereka tidak dapat menghadirinya, setidaknya ketua RK tersebut meminta pandangan dari pemimpin lainnya itu. Penyelesaian sengketa yang demikian ini selain tumbuh dari kesadaran para responden itu sendiri, juga merupakan pengaruh dari para pemimpin nonformal yang pada setiap kesempatan menganjurkan agar warga kampung ini menyelesaikan permasalahannya atau persengketaan yang timbul di antara warga kampung melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Para pemim-

pin tersebut cukup mempunyai pengaruh terhadap warga kampungnya seperti dalam mendorong mereka untuk bekerja sama dalam urusan urusan kemasyarakatan, baik yang bersifat urusan kesejahteraan materiil maupun urusan keagamaan. Yang dimaksud dengan urusan kesejahteraan materiil antara lain tampak pada peranan dan pengaruh para pemimpin tersebut dalam mendorong warga kampung ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan jalan berkoperasi.

Meskipun dalam penelitian ini belum dapat menemukan secara pasti jumlah warga kampung ini yang memasuki koperasi serta jenis-jenis koperasi yang mereka masuki, tetapi yang jelas bahwa beberapa di antara warga kampung ini telah banyak yang memasuki koperasi. Koperasi yang dimaksudkan di sini berupa KUD dan koperasi-koperasi lainnya seperti simpan-pinjam. Di samping itu di antara beberapa warga kampung ini mempunyai kegiatan kegiatan yang bersifat arisan.

Adapun yang menyangkut peranan para pemimpin tersebut dalam aspek keagamaan antara lain untuk memajukan kehidupan beragama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Dalam kaitan ini, mereka juga membimbing warga kampung ini untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama. Hal ini sesuai dengan kehidupan warga kampung ini yang terdiri dari pemeluk-pemeluk agama yang berbeda (Islam dan Kristen). Dalam rangka kehidupan beragama ini, para pemimpin itu memperlihatkan keteladanan dalam kerukunan hidup beragama seperti saling tolong menolong dalam hal-hal kesulitan antara pemeluk agama yang berbeda, dan saling kunjung-mengunjungi pada hari-hari besar keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal dan Tahun Baru).

c. Pola hubungan sosial

Pola hubungan sosial di kalangan responden bertumpu dari suatu keadaan yang bersifat majemuk, baik dilihat dari para responden itu sendiri maupun penduduk kampung ini secara keseluruhannya. Para responden itu tidak hanya lahir dari ibukota propinsi setempat (67%) dan tempat lain dalam propinsi ini (7%) tetapi juga terdapat responden yang berasal dari luar propinsi ini (26%). Dengan demikian pengaruh ciri-ciri lingkungan alami tempat kelahiran sedikit banyaknya akan memberikan suatu corak yang beragama dalam segi sikap dan watak.

Demikian halnya jika dilihat dari kelahiran anggauta rumah tangga para responden tersebut, maka terlihat pula komposisinya yang menunjukkan, khususnya dilihat dari kategori tempat lahir. Jelasnya, bahwa anggauta rumah tangga para responden itu yang lahir dari ibu kota propinsi ini sebesar 65%, yang lahir di tempat lain dalam propinsi ini sebesar 15% dan yang lahir di luar propinsi sebesar 20%. Berdasarkan perbedaan lokasi kelahiran para anggauta rumah tangga responden ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa para responden tersebut pada dasarnya tidak semuanya dilahirkan dan dibesarkan di kampung ini. Mayoritas responden (95%) memeluk agama Islam.

Dengan demikian pola hubungan sosial di kalangan para responden itu merupakan suatu corak yang bersifat heterogen (majemuk). Meskipun demikian kemajemukan itu tampaknya tidak merupakan sesuatu yang menjadi penghambat bagi terbinanya suatu hubungan sosial yang bersifat aman dan tertib.

6. Pola Kehidupan Beragama

Uraian mengenai pola kehidupan beragama dibatasi dalam hal hal: (a) kewajiban, amal, dan ibadah agama; (b) benda-benda keagamaan (c) keyakinan pada makhluk gaib, dan (d) pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan.

a. Kewajiban, amal, dan ibadah agama

Perhatian para responden dari segi pelaksanaan ibadah menurut agama yang dianut cenderung melaksanakan di rumah di samping pada waktu-waktu tertentu di tempat ibadah. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan kondisi kehidupan mereka yang pada dasarnya sering mengalami kesulitan, maka tidak memungkinkan untuk mereka selalu menunaikan ibadah di tempat-tempat atau rumah-rumah ibadah yang ada di kampung mereka.

Kebenaran pernyataan ini terdukung pula dengan adanya pernyataan responden (40%) yang menyatakan bahwa mereka menunaikan ibadah hanya di rumah saja. Selain itu bahwa responden yang menyatakan bahwa selalu menunaikan di tempat ibadah mempunyai persentase jumlah sebesar 10%. Para responden itu dalam kegiatan ikut membaca kitab suci agamanya mempunyai tiga kategori yaitu: tiap hari, kadang-kadang, dan tidak melakukannya. Dari ketiga kategori ini yang terbesar persentase jumlahnya adalah kategori kadang-kadang (75%). Responden yang menyatakan tiap hari membaca ki-

tab suci sebesar 15%. Sedangkan responden yang menyatakan tidak membaca kitab sucinya sebesar 10%. Semuanya ini menunjukkan bahwa pada umumnya para responden itu bersifat jarang membaca kitab sucinya dan relatif sedikit yang menyatakan bahwa tiap hari membaca kitab sucinya. Dan, relatif lebih kecil lagi responden yang menyatakan bahwa tidak membaca kitab sucinya. Adapun kitab suci yang dimaksudkan di sini adalah al-Qur'an bagi agama Islam dan Al-kitab (Bibel) bagi agama Kristen.

Dorongan tanggung jawab untuk membekali anak-anak mereka dengan pengetahuan agama terlihat dari frekuensi pengajaran kitab suci pada anak. Sebagian besar para responden itu (70%) mengajar anak-anak mereka membaca kitab sucinya bersifat sewaktu-waktu (kadang-kadang). Adanya gejala yang demikian ini dapat dimaklumi karena mereka itu pada dasarnya tidak memiliki waktu yang luang untuk mengajar anak-anak mereka, berhubung karena mereka selalu sibuk dalam mencari nafkah. Di samping itu karena mereka juga tidak memiliki pengetahuan dalam membaca kitab sucinya. Dengan perkataan lain bagi penganut Islam, masih banyak responden yang tidak dapat mengaji (buta aksara al-Qur'an). Dan bagi responden yang beragama Kristen masih banyak yang belum dapat membaca kitab sucinya karena tergolong sebagai buta aksara. Persentase jumlah responden demikian ini adalah sebesar 25%. Adapun yang menyatakan bahwa setiap hari mengajar anak-anaknya membaca kitab sucinya hanya sebesar 5%.

Berdasarkan keterangan tersebut tersifat pengertian bahwa para responden itu dilihat dari segi pelaksanaan kewajiban ibadah agama, belum seluruhnya dari mereka itu yang melakukan kewajiban sepenuhnya. Namun, mereka itu tidak tergolong pula sebagai penduduk yang mayoritas kurang memperhatikan ibadah agama mereka. Ini terbukti dari kecilnya persentase yang tidak membaca kitab sucinya dan menunaikan kewajiban agamanya (Tabel IV.33).

b. Benda-benda keagamaan

Sesuai dengan kehidupan para responden yang tergolong tidak mampu dari segi ekonomi, pengaruhnya tidak hanya terlihat pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melainkan juga terungkap dari kemampuan untuk memiliki atau mengadakan peralatan-peralatan yang hendaknya ada untuk pelaksanaan agama. Sebagian besar para responden (80%) tidak memiliki peralatan lengkap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan ibadah yang mereka anut. Per-

alatan ibadah yang dimaksudkan itu seperti pengadaan pakaian-pakaian khusus untuk menunaikan ibadah agamanya. Seperti misalnya bagi umat Islam disunatkan untuk mengkhususkan atau setidaknya tidaknya selalu mengenakan pakaian yang bersih untuk melakukan sembahyang (sholat). Tampaknya bahwa mereka itu mencampur-adukkan pakaian kerja atau pakaian rumah dengan pakaian yang digunakan untuk sembahyang. Selain peralatan berupa pakaian itu juga dalam pelaksanaan ibadah agama dibutuhkan pula peralatan-peralatan seperti tikar sembahyang (sujadah) dan ruangan di rumah yang relatif terjamin dari kotoran-kotoran. Juga tampaknya bahwa para responden itu masih banyak yang belum memiliki kitab suci sebagai peralatan ibadah agama yang amat penting. Tidak dimilikinya kitab suci itu memang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan daya beli tetapi juga kesadaran dan keyakinan atas tuntutan agamanya. Sehingga hal ini agaknya sangat sulit menjadi ukuran ketidak mampuan responden untuk memiliki peralatan untuk melaksanakan ibadah. Bila dilihat dari kelengkapan peralatan ibadah agama, maka pemilikan terhadap kitab suci adalah merupakan sesuatu yang amat penting.

Adapun responden yang menyatakan lengkap memiliki peralatan ibadah agama baru sekitar 10%. Responden yang demikian ini tampaknya memiliki peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk beribadah, seperti pakaian sembahyang secara lengkap, kitab suci, tasbeih, bersanji, dan buku-buku pelajaran sederhana yang mudah dibaca oleh mereka itu (tuntunan sholat dan buku-buku pelajaran agama secara praktis). Pengertian lengkap di sini tidak dapat diartikan sebagai apa yang dimiliki oleh orang yang berkecukupan di mana kualitas alat-alat itu terutama pakaian yang mahal harganya. Peralatan ibadah lengkap yang ditujukan bagi responden tersebut lebih dititik beratkan pada segi terpenuhi tidaknya alat alat dalam menunaikan ibadah agama yang bersifat pokok.

c. Keyakinan pada makhluk gaib

Di samping agama yang dipeluk para responden, juga tampak adanya beberapa (5%) yang mempercayai makhluk dan kekuatan gaib. Para responden itu pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi lagi oleh kepercayaan-kepercayaan yang bersifat mitos.

Membesarnya persentase jumlah responden (95%) yang menyatakan tidak mempercayai lagi makhluk dan kekuatan gaib dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya dapat dikatakan sebagai keberhasilan

an dari adanya penyuluhan-penyuluhan atau dakwah-dakwah agama seperti yang dilakukan di mesjid atau langgar dan lain-lain pertemuan keagamaan bagi penganut agama Islam atau penyuluh-penyuluh keagamaan di gereja dan tempat-tempat lainnya bagi pemeluk agama Kristen. Lagi pula orang-orang yang menyebarkan atau bersikap terlalu terikat kepada kekuatan gaib itu sering membohongi orang lain seperti tukang tukang tenung atau dukun. Dahulu, di kalangan para responden yang percaya terhadap makhluk dan kekuatan gaib itu tampak menonjol sekali. Sekarang, berkat makin intensifnya penyuluhan-penyuluhan agama tersebut maka hal serupa itu relatif sudah sangat menipis di kalangan para responden itu.

Beberapa responden yang masih percaya kepada kekuatan gaib ini, sering membakar dupa pada saat-saat tertentu yang mereka anggap sebagai waktu-waktu yang keramat untuk meminta rejeki berlimpah. Di samping itu masih adanya kepercayaan mereka tentang adanya tempat-tempat yang dikeramatkan atau adanya pohon-pohon besar yang ditakuti karena beranggapan dijaga oleh makhluk halus.

Berkaitan dengan itu semua, sampai kini di kalangan para responden itu masih ada yang mempercayai adanya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh makhluk halus. Dengan demikian cara pengobatannya pun harus dilakukan melalui dukun-dukun kampung yang dapat mengusir makhluk halus itu. Terhadap mereka yang masih mempercayai makhluk dan kekuatan gaib itu sering masih melakukan upacara-upacara yang sifatnya penyembahan terhadap makhluk dan kekuatan gaib itu. Selain itu, mereka juga mengunjungi kubur keramat dengan membawa sesaji sebagai bahan upacara, melepaskan atau memotong hewan sebagai penyembahan terhadap kekuatan gaib itu.

d. Pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa para pemimpin informal mempunyai pengaruh dalam kehidupan penduduk di kampung ini. Khusus bagi tokoh agama sebagai salah satu contoh pemimpin informal di kampung ini, amat berpengaruh di dalam menumbuhkan kesadaran beragama dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban ibadah agama.

Keadaan yang demikian itu pada dasarnya bersumber dari pengaruh keyakinan agama bahwa penganjur-penganjur agama merupakan penerus ajaran agama dari Rasul atau Nabi yang menyebarkan agamanya. Karenanya mengikuti fatwa tokoh agama tersebut terlebih-lebih

lagi jika mampu mengamalkannya adalah merupakan rangkaian ibadah. Dengan perkataan lain tokoh agama adalah oknum yang patut dihormati dan diikuti ajarannya.

Dalam kegiatan hidup sehari-hari, bila para responden melakukan pesta seperti sunatan, selamatan dan perkawinan, tokoh agama tersebut diberi tempat pada perjamuan sejajar dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya atau pemimpin formal (Kepala Kelurahan). Semuanya itu menunjukkan bahwa keyakinan agama mempunyai pengaruh terhadap kepemimpinan dalam masyarakat kampung ini. Oleh karenanya bila sewaktu-waktu di kampung ini dilakukan penyuluhan-penyuluhan kemasyarakatan seperti yang dilakukan oleh Kepala kelurahan dan petugas-petugas pemerintah lainnya akan mendapat sambutan hangat bila isi penyuluhan atau cara penyampaiannya mencerminkan ajaran keagamaan. Keadaan demikian itu berakar dari suatu keyakinan agama khususnya yang dipeluk oleh para responden itu bahwa urusan-urusan keduniaan akan lebih mudah dilakukan dan dapat memperoleh berkah jika dilandasi dengan ajaran agama.

Mereka ini sungguhpun pada dasarnya terlihat melarat tetapi dengan keyakinan agama yang mereka anut bahwa segalanya adalah ketentuan Tuhan, maka tampaknya mereka tidak terlalu gelisah dengan keadaannya. Namun demikian dari responden yang lain ada pula yang tampaknya menafsirkan secara kurang menguntungkan tentang takdir dimaksud (ketentuan Tuhan). Jelasnya bahwa mereka ini menyimpangkan pengertian takdir sehingga seolah-olah terlalu terikat dan hanya berpasrah pada apa yang ada. Bersifat lebih buruk lagi dengan adanya pandangan di antara mereka itu bahwa dunia ini hanyalah tempat bernaung sementara dan karenanya tidak perlu berusaha membanting tulang untuk memburu harta sebab semuanya akan ditinggalkan. Akhirnya ditafsirkan secara keliru bahwa tidak perlu berusaha sekuat tenaga, cukup mendapatkan sesuap nasi untuk diri sendiri dan keluarganya. Namun responden yang bersikap demikian itu belum diperoleh datanya secara pasti tetapi dari gejala yang dapat diamati secara umum dalam penelitian ini tampak kebenarannya, seperti terdapatnya beberapa penduduk yang relatif merasa puas di tengah-tengah kekurangannya. Sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan penghasilan relatif kurang mendapat perhatian.

Dalam pada itu pada sisi yang lain keyakinan agama di kalangan para responden itu khususnya yang berkenaan dengan pembinaan persatuan kehidupan sosial seperti melalui perkawinan dan upacara-upacara keagamaan. Melalui perkawinan, tampaknya para responden

tersebut telah memperlihatkan sifat yang netral dalam melangsungkan perkawinan anaknya dengan orang yang tidak seagama. Jumlah responden yang menyatakan setuju dan terserah kepada anak dalam melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama tercatat sebesar 50%. Responden yang bersikap demikian ini, berarti telah bersikap lunak dalam memandang perkawinan yang berbeda agama. Dahulu, di masyarakat kampung ini, hal serupa itu adalah merupakan tabu. Dengan demikian hal ini adalah pula merupakan petunjuk tentang kelonggaran sosial yang menyangkut segi keagamaan. Para responden itu telah memperlihatkan sikap toleransi keagamaan yang sifatnya merupakan pengaruh dari berkembangnya pengetahuan agama tentang perlunya membina kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda

7. Keluarga

Uraian tentang keluarga di sini mengetengahkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga dalam kerangka pencirian kebudayaan di kampung ini. Secara terperinci dikemukakan seperti di bawah ini.

a. Kondisi rumah tempat tinggal

Pada umumnya rumah tempat tinggal para responden itu masih memiliki kualitas rumah darurat. Kualitas dimaksudkan ini ditandai oleh bahan-bahan yang digunakan dalam pendirian rumah mereka yang tergolong dari bahan-bahan yang tidak bertahan lama seperti jenis-jenis kayu ringan berkualitas rendah, atap nipah, dan berlantai tanah. Dilihat dari segi konstruksinya, rumah para responden itu pada umumnya merupakan rumah yang berbentuk sederhana dan tidak memiliki ruangan yang cukup bagi kebutuhan anggota keluarga.

Keadaan perumahan seperti itu sudah barang tentu dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk mendirikan rumah yang terpendang baik, masih sangat terbatas. Dengan perkataan lain, penghasilan mereka yang sangat rendah tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah yang lebih layak dari apa yang mereka miliki itu, apalagi dengan rumah permanen.

Demikian pula jika dilihat dari luas rumah yang mereka miliki itu maka keadaannya belum memadai sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga mereka. Singkatnya ukuran rumah yang pada umumnya mereka miliki adalah rata-rata 25–30 m². Dengan luas sedemikian itu maka ruang/kamar yang mereka miliki rata-rata hanya dua ruang de-

ngan ukuran yang kecil pula. Dalam kaitannya dengan ruang ini tampaknya di kalangan responden itu relatif belum menyadari pentingnya ruang/kamar rumah dalam rangka kehidupan keluarga yang sehat serta kehormatan penghuni rumah yang bersangkutan. Dinyatakan demikian, selain kenyataannya yang umum terlihat di rumah-rumah para responden itu juga dari hasil wawancara terhadap mereka, diperoleh keterangan bahwa ruang/kamar rumah hanya mempersempit luas rumah. Hal ini dapat dimaklumi sesuai dengan ukuran luas rumah mereka yang relatif kecil. Karena itu yang lebih praktis bagi mereka sebagai pengganti kamar adalah berupa sampiran kain.

Sekeliling rumah mereka pada umumnya belum bersih, masih ada genangan-genangan air dan tumpukan-tumpukan kayu bekas dan sampah. Demikian juga pekarangannya belum menampakkan kebersihan dan ketertiban, seperti tidak adanya pagar sebagai pembatas antara rumah-rumah. Kalau pun ada rumah yang memiliki pagar jumlahnya relatif sangat sedikit.

Mata pencaharian pokok para responden tidak lagi bertumpu pada kegiatan bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan tempat tinggal mereka yang tidak lagi memungkinkan untuk mereka melakukan pekerjaan serupa itu. Jadi, sungguhpun semula mereka berasal dari daerah pedesaan, kini mereka sudah memilih mata pencaharian yang sifatnya cenderung pada kegiatan-kegiatan jasa, industri, dan jual beli.

Selanjutnya dilihat dari tingkat pendapatan, mereka mempunyai tingkat pendapatan yang tergolong rendah. Jelasnya bahwa rata-rata pendapatan mereka pada umumnya kurang lebih 10.000 rupiah. Jika diperinci pendapatan mereka per harinya, pada umumnya sebesar kurang lebih tiga ratus rupiah.

Dengan tingkat pendapatan yang sedemikian itu secara umum mungkin dianggap berpenghasilan cukup, bila dikaitkan dengan kedudukan mereka dalam strata sosial yang terbawah. Akan tetapi jika ditelusuri secara lebih mendasar dalam kaitannya dengan melonjaknya kebutuhan hidup sehari-hari seperti dirasakan dewasa ini akan terlihat bahwa penghasilan mereka itu sangat rendah.

Mengingat bahwa kebutuhan pokok sehari-hari terutama yang bersifat pangan maka penghasilan semacam itu belum dapat menanggulangi kebutuhan pangan mereka. Belum lagi dikaitkan dengan kebutuhan mereka terhadap sandang dan perumahan yang merupakan pula kebutuhan-kebutuhan pokok, di samping pangan itu. Lebih memprihatinkan lagi bagi responden yang mempunyai banyak anggauta keluarga yang sedang sekolah, rata-rata membutuhkan cukup banyak biaya.

c. Biaya hidup

Secara kualitatif pendapatan mereka setelah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga per bulan, ternyata menurut mereka sangat kurang. Persentase yang menyatakan demikian ini melebihi dari separuh jumlah para responden itu (55%). Di samping itu ada pula yang menyatakan kurang (30%). Sebagian besar responden merasakan bahwa pendapatan mereka belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Adapun dilihat dari jenis-jenis biaya pengeluaran mereka itu secara garis-garis besarnya meliputi biaya hidup sehari-hari, biaya untuk perlengkapan pakaian, biaya untuk perlengkapan rumah tangga, biaya untuk anak yang sekolah, biaya untuk upacara/pesta, biaya untuk keperluan sosial, dan biaya untuk keperluan beribadat. Para responden sesungguhnya tidak mengetahui atau menetapkan perincian secara ketat terhadap pengeluaran yang menurut jenis-jenis biaya tersebut.

Sebagian besar dari penghasilan mereka digunakan untuk biaya hidup sehari-hari terutama untuk kebutuhan makan minum. Oleh karena seperti dikatakan terdahulu bahwa mereka pada dasarnya tidak membuat perencanaan atau perincian jenis-jenis biaya hidup mereka. Pendapatan mereka hampir semua digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Bahkan ada di antara mereka itu ada yang menyatakan tidak cukup untuk dikonsumsi oleh keluarga.

Sesuai dengan kondisi kehidupan para responden itu maka pembiayaan untuk pakaian, seperti juga dengan biaya hidup sehari-hari, sulit untuk dipastikan besarnya dalam angka absolut. Hal ini disebabkan antara lain bahwa pengadaan pakaian, pada umumnya para responden itu tidak secara tentu berbelanja pakaian. Dengan perkataan lain dalam ekonomi rumah tangga mereka masalah pakaian ini pun pengadaannya tidak direncanakan. Lagi pula bahwa para responden itu tidak mengingat atau mengadakan pencatatan terhadap biaya yang mereka keluarkan untuk membeli pakaian tersebut.

Pada umumnya para responden itu mengganti pakaiannya secara tidak menentu yaitu kecuali pakaian yang mereka gunakan benar-benar sudah tidak dapat terpakai lagi. Bahkan terdapat di antara mereka itu yang cenderung memiliki pakaian dari penjual di pinggir jalan (pedagang loak). Besarnya biaya untuk pengadaan pakaian sukar dapat ditentukan secara pasti.

Para responden pada umumnya tidak mengetahui berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk perlengkapan rumah tangga. Responden sangat jarang mengeluarkan biaya untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga. Bahkan masih ada di antara mereka yang tidak memiliki perlengkapan rumah tangga yang memadai. Perlengkapan yang mereka miliki seperti peralatan dapur tergolong sederhana. Pengadaan peralatan tersebut rata-rata setahun atau beberapa tahun sekali. Selama peralatan itu masih bisa dimanfaatkan, mereka tidak membeli yang baru. Contoh perlengkapan rumah yang mereka miliki adalah satu atau dua buah kursi kayu sekedar tempat duduk jika sewaktu-waktu ada tetangga atau kerabat datang berkunjung. Pengadaan kursi tersebut pada umumnya tidak mengeluarkan biaya khusus sebab mereka sendiri yang membuatnya. Sama halnya dengan perlengkapan tempat tidur yang pada umumnya hanya berupa balai-balai terbuat dari kayu secara sederhana. Kebanyakan perlengkapan rumah tangga tersebut dibuat sendiri. Jadi, tidak mengeluarkan biaya khusus untuk pengadaannya.

Responden yang mengatakan bahwa mereka mempunyai pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan anak pada umumnya mempunyai anak yang sekolah pada tingkat sekolah dasar. Pembiayaan meliputi untuk pembelian buku dan alat tulis serta sumbangan yang diminta melalui Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan (BP₃). Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan para responden, relatif masih termasuk rendah. Walaupun masih rendah biaya yang mereka keluarkan, namun mereka sudah memiliki perhatian akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Seperti terdapat di kalangan masyarakat pada umumnya, penduduk di kampung ini juga memiliki kecenderungan untuk mengadakan upacara-upacara, baik suka maupun duka. Upacara kegembiraan antara lain pada waktu sunatan, selamat, perkawinan, dan upacara pesta lain. Pengeluaran pembiayaan tersebut relatif besar dibandingkan dengan pendapatan mereka. Dengan berbagai upaya mereka mengusahakan untuk mengadakan pembiayaannya. Masih menggejala di kalangan para responden, suatu sikap yang bersifat konsumtif dan mempertahankan kehormatan di mata masyarakat sekitarnya. Hal ini berakar dari kebiasaan turun-temurun yang cenderung berpesta secara berlebih-lebihan dibandingkan dengan pendapatan mereka.

Pada saat kedukaan seperti kematian atau kemalangan yang menimpa tetangga, para responden selalu berusaha untuk datang memberikan hiburan dan sumbangan. Sumbangan itu tidak selalu berupa

uang tetapi dapat juga berupa bahan pangan ataupun sumbangan tenaga. Lagi pula masih hidup kepercayaan di antara mereka, bahwa sumbangan yang diberikan dalam kedukaan tidak patut disebut jumlahnya. Hal ini merupakan perwujudan keyakinan agama yang mereka anut.

Menyangkut sumbangan untuk RT dan RK serta keamanan jumlahnya masih kecil tergantung kepada kemampuan masing-masing keluarga. Ada pula di antara responden yang tidak mampu memberikan sumbangan. Jadi jumlah sumbangan uang secara absolut dari masing-masing responden sukar terukur.

Demikian pula mengenai biaya untuk keperluan beribadat, relatif tidak tetap besar jumlahnya. Hal ini tergantung dari ada tidaknya, besar kecilnya uang atau benda lain yang mereka miliki pada waktu adanya kebutuhan beribadat. Jadi pada saat mereka tidak memiliki uang, mereka menahan diri tidak memberikan sumbangan (dana) pada waktu beribadat.

d. Besarnya rumah tangga

Yang dimaksud dengan besarnya rumah tangga dalam uraian ini adalah jumlah anggota keluarga termasuk kepala keluarga di kalangan responden. Jumlah anggota keluarga keseluruhan responden berjumlah 84 jiwa. Dengan demikian, rata-rata setiap rumah tangga mempunyai 4 anggota keluarga. Jumlah rata-rata anggota keluarga tersebut belum bersifat kritis. Namun kenyataannya, masih ada rumah tangga responden yang memiliki anggota keluarga sebanyak 10 orang. Hal ini berarti bahwa di kalangan responden masih terdapat adanya keluarga yang memiliki anggota demikian banyak.

Di samping itu terdapat pula kenyataan bahwa sudah terdapat di kalangan responden itu yang memiliki besar anggota rumah tangga yang terpendang sebagai ukuran keluarga kecil, yaitu 2 orang. Dan, mereka ini tergolong penduduk dalam batas usia kurang lebih 35 tahun. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa di kalangan para responden itu telah terlihat adanya kesesuaian dengan program pemerintah kita dewasa ini yang menganjurkan adanya keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan jumlah yang kecil. Walaupun dalam penelitian ini, terhadap keluarga kecil di kalangan responden itu belum dapat dipastikan sebagai pengaruh langsung dari program Keluarga Berencana. Melalui penelitian ini diperkirakan bahwa adanya keluarga demikian itu dengan melihat kondisi umur mereka dan partisipasi

mereka untuk mengikuti program ini, sedikit banyaknya adalah hasil dari program tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh adanya Pos-Pos KB di kampung ini dan dekatnya dengan Rumah Sakit serta makin intensifnya penyuluhan program tersebut yang secara langsung diterima oleh para responden.

Dari uraian ini menunjukkan bahwa besarnya rumah tangga di kalangan para responden itu masih terpandang dalam ukuran yang wajar. Dalam hal ini dilihat dari modus rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 orang itu. Namun tentunya jika ditilik secara lebih mendalam tentang pendapatan mereka yang rendah maka dengan jumlah anggota rumah tangga sedemikian itu pada dasarnya mulai memprihatinkan keadaannya.

e. Stabilitas hubungan perkawinan

Mengawali uraian tentang stabilitas hubungan perkawinan bagi para responden, lebih dahulu dikemukakan bahwa dari 20 orang responden itu terdiri dari 80% pria dan 20% wanita. Dari sejumlah mereka ini, dilihat dari status perkawinan mereka, yang berstatus kawin adalah pula sebesar 80%, dan lainnya berstatus janda, yaitu sebesar 20% pula.

Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini yang tergolong dalam status kawin tersebut adalah mereka yang berjenis kelamin pria. Sedangkan mereka yang berstatus janda adalah mereka yang berjenis kelamin wanita sebesar 20%. Dalam pada itu dilihat dari segi umur mereka ternyata 60% di antara mereka itu berumur 39 tahun ke bawah dan selebihnya (40%) berumur 40 tahun ke atas (Tabel IV.1).

Para responden itu memperlihatkan suatu ciri di mana yang berstatus kawin atau sedang menjalankan/memimpin keluarga adalah jauh lebih banyak dari pada yang tergolong bercerai. Ini berarti bahwa kestabilan hubungan perkawinan di antara para responden itu pada umumnya tampak dalam keadaan yang baik. Kemungkinan jika dilihat dalam kaitannya dengan umur mereka, maka responden yang tergolong dalam status janda adalah mereka yang telah mencapai umur 50 tahun ke atas. Dan, status perkawinan yang mereka miliki sekarang (janda), disebabkan oleh kematian suami. Dengan demikian berdasarkan data ini memperkuat lagi keterangan bahwa hubungan perkawinan bagi para responden itu pada dasarnya tergolong stabil.

Petunjuk lain yang menerangkan tentang kestabilan hubungan perkawinan bahwa dari para responden yang menyatakan berstatus

kawin adalah status perkawinan yang pertama. Konkritnya, 95% dari mereka itu termasuk memiliki status perkawinan yang pertama. Hanya sebesar 5% dari mereka itu yang menyatakan bahwa status perkawinan yang mereka jalani sekarang adalah yang kedua kalinya. Terjadinya perkawinan yang kedua kali karena pasangan mereka meninggal dunia. Hal ini pun memberikan petunjuk bahwa mereka memiliki suatu hubungan perkawinan yang tergolong stabil. Perceraian yang terjadi dalam keluarga di kampung ini yang diakibatkan oleh hal-hal seperti percekocokan dan faktor-faktor sosial lainnya relatif amat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan perceraian karena kematian.

f. Pola hubungan keluarga

Hubungan keluarga di kalangan para responden tersebut pada dasarnya terdiri dari keluarga yang melebar, tidak hanya pada ayah dan ibu serta anak-anak kandung mereka tetapi juga meliputi keluarga-keluarga lain seperti mertua, menantu, keponakan, dan lain-lain keluarga terdekat. Hal ini menunjukkan bahwa di kalangan para responden itu tidak hanya menanggung beban anak-anak kandungnya sendiri tetapi juga terdapat kerabat-kerabat lain. Baik anak-anak kandung tersebut maupun kerabat lain yang serumah dengan para responden itu keseluruhannya dianggap sebagai anggota keluarga. Karenanya beban tanggungan mereka secara ekonomi tergolong berat.

Adapun dilihat dari segi hubungan dengan lingkungan keluarga terdapat ciri bahwa yang menjadi pemimpin rumah tangga adalah ibu dan bapak. Hubungan antara ibu dan bapak ini dari segi adat mereka, bapak merupakan pemimpin dan pelindung utama, sedangkan ibu sebagai pendamping dan pendidik anak-anak yang paling menonjol.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tampaknya karena kesibukan sang ayah melaksanakan pekerjaannya dan juga beberapa dari isteri mereka dengan kesibukannya membantu penghasilan keluarga di samping urusan rumah tangga yang bersifat rutin, maka kebiasaan mengobrol dan berbincang-bincang cenderung mulai berkurang. Hanya 45% dari mereka itu yang menyatakan bahwa mereka sering berbincang-bincang atau santai dengan keluarga.

Timbul suatu permasalahan rumah tangga, seperti kesulitan keuangan pada umumnya para responden itu mengandalkan tanggung jawab bapak sendiri. Terdapat 35% dari mereka itu menyatakan bahwa terjadi hal serupa itu bapak dan ibu membicarakannya guna men-

cari jalan keluarnya. Hanya sebesar 5% dari mereka yang menyatakan bahwa tanggung jawab ibu sendiri. Responden yang demikian ini sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala rumah tangga (berstatus janda).

Selain itu dilihat dari kedudukan kedua orang tua (ibu dan bapak) di hadapan anak-anaknya tampaknya bahwa wibawa dan kehormatan orangtua relatif masih dapat terpelihara. Anak-anak mereka relatif masih bersifat patuh terhadap ajaran dan perintah orangtua. Suatu pertanda lain tentang rasa hormat anak terhadap orangtuanya tampak pada takutnya anak untuk menyebut nama langsung dari kedua orangtuanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola hubungan keluarga di kalangan para responden itu khususnya dilihat dari hubungan bapak-ibu-anak-anak masih memperlihatkan suatu hubungan yang berdasarkan hubungan kewibawaan. Hubungan seperti ini dan terbinanya adanya hubungan rasa tanggung jawab antara ibu-bapak terhadap anak-anaknya, sebaiknya rasa hormat antara anak-anak terhadap ibu-bapaknya.

g. Pendidikan anak dan peranan tetangga

Seperti dikemukakan terdahulu bahwa pola hubungan keluarga di kalangan para responden itu tampaknya masih dapat dikuasai oleh kedua orangtua khususnya dalam membina kehidupan anak-anaknya. Dengan demikian pendidikan anak, sesuai dengan sifat kodrati dari kedua orangtua relatif masih tetap berlangsung dan terbina secara baik. Dalam hal ini sudah barang tentu menurut ukuran kehidupan mereka dalam artinya yang luas.

Pandangan para responden tentang perilaku anak-anaknya yang sekaligus mencorakkan pendidikan yang diberikan kepada anak, dapat dikategorikan pada segi kepatuhan dan kebebasan anak. Sebagian besar responden (90%) menyatakan bahwa anak harus patuh pada perintah dan nasehat orangtua. Hanya 10% di antara mereka itu yang **menyatakan bahwa a** menyatakan bahwa anak harus mempunyai sikap sendiri setelah mendengar pandangan orangtua.

Bila ditinjau dari latar belakang pendidikan responden sebagai orangtua, bahwa terdapat 35% responden yang tidak pernah sekolah, 25% tidak tamat SD dan hanya 30% yang tamat SD. Pendidikan yang lebih ke atas hanya sampai pada tingkat SMTP dan SMTA dengan persentase yang kecil yaitu masing-masing tingkat pendidikan ter-

akhir ini adalah sebesar 5% dari jumlah para responden itu. Demikian pula dilihat dari jenis pendidikan agama para responden itu, sebagian besar dari mereka (70%) yang tidak pernah memiliki pendidikan formal tentang keagamaan. Cara mendidik anak dengan sendirinya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan kebiasaan turun temurun.

Peranan tetangga terhadap pendidikan anak, terlihat bila terjadi perkelahiran anak-anak, para tetangga relatif masih bersikap positif. Jelasnya bahwa 90% dari mereka itu tidak mencampuri perkelahiran anak mereka. Dari sudut pendidikan hal ini merupakan suatu lingkungan yang di satu segi dapat memperkembangkan suasana ketenteraman yang amat dibutuhkan bagi pertumbuhan kepribadian yang sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut, para responden itu (75%) juga mempunyai pandangan dalam hal kenakalan anak-anak mereka bahwa tetangga boleh memarahinya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan yang positif dalam rangka mewujudkan suasana lingkungan yang tentram demi perkembangan kepribadian anak yang baik. Istilah "memarahi" pada dasarnya mengandung tujuan untuk memperbaiki atau merubah kelakuan anak. Di samping itu terdapat pula beberapa responden (25%) yang menyatakan jika sewaktu-waktu anak-anak mereka berbuat nakal tetangga boleh menyampaikan perihal kenakalan yang diperbuat. Sikap yang demikian ini bersifat positif dan merupakan bantuan bagi orangtua anak yang bersangkutan dalam rangka memperbaiki kelakuan anaknya di lingkungan masyarakat. Kehidupan bertetangga di kalangan para responden itu pada dasarnya bernilai positif, khususnya dilihat dari segi pendidikan.

Mengenai pendidikan formal bagi anak-anaknya, kebanyakan para responden (65%) menghendaki agar anak-anaknya memasuki sekolah umum dan juga belajar agama. Mereka ini berpendapat bahwa pendidikan sekolah tidak hanya menitik beratkan pada kepandaian saja tetapi juga keseimbangan dengan aspek mental spiritual. Pada kenyataannya, walaupun para responden itu sangat terbatas kemampuannya untuk menyekolahkan anak-anak mereka, tetapi cita-cita mereka cukup tinggi untuk menjadikan anak mereka sebagai manusia yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsanya.

Dalam mewujudkan cita-citanya, nampak pula dalam memberikan tugas terhadap anak-anak mereka. Memang sebagian besar responden (75%) memberikan tugas membantu jika tidak mengganggu

tugas-tugasnya di sekolah. Namun, masih ada beberapa responden (25%) yang mengharuskan anak-anaknya membantu pekerjaannya. Mereka ini termasuk yang penghidupannya sangat rendah dibandingkan dengan yang lainnya itu dan tingkat pengetahuan serta pendidikannya tergolong rendah.

h. Peran serta keluarga dalam perkumpulan

Sesuai dengan kondisi kehidupan para responden yang tergolong tidak berkecukupan, maka peranserta keluarga dalam hal perkumpulan yang bersifat formal, tampaknya masih terlihat tidak aktif. Hal ini dipengaruhi oleh kesibukan dalam pekerjaan atau dalam usaha-usaha lain untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga. Selain itu tentunya tidak luput pula dari pengaruh rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman mereka dalam kegiatan perkumpulan.

Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa para responden itu tidak ada yang memasuki perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Sungguhpun tidak diperoleh angka yang bersifat absolut tentang jumlah anggota keluarga responden yang memasuki perkumpulan, tetapi yang pasti bahwa di kampung para responden ini telah ada kegiatan-kegiatan perkumpulan, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun yang didirikan atas prakarsa masyarakat kampung ini sendiri. Perkumpulan-perkumpulan antara lain Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), arisan dan lain-lain.

Peran serta keluarga para responden itu pada pokoknya belum tumbuh dari prakarsa atau kesadaran sendiri. Akan tetapi tampaknya mereka itu masih lebih banyak didorong oleh prakarsa atau perintah dari pimpinan kampung dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Timbulnya keadaan yang sedemikian itu bersangkut-paut dengan lingkungan kehidupan mereka yang belum membudaya kegiatan-kegiatan berorganisasi. Hal ini tentunya dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan dan pengalaman mereka yang relatif kurang.

Namun demikian potensi yang ditandai kebiasaan bergotong-royong dan relatif masih terbinanya rasa kebersamaan di kalangan mereka itu, dapat menggiatkan hidup berorganisasi. Dalam hal ini tentunya diharapkan peranan yang lebih aktif dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Tetapi pada saat ini peranserta para keluarga di kalangan para responden itu dalam segi perkumpulan relatif belum terlihat secara memadai.

j. Prospek kehidupan di masa mendatang

Lingkungan tempat tinggal responden berada di pusat kota Kendari yaitu sentrum pemerintahan di Propinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi di propinsi ini. Dengan lingkungan tempat tinggal demikian, memungkinkan bagi penduduk yang berkualitas hidup rendah akan terdesak oleh perkembangan kemajuan, khususnya dari penguasaan tempat oleh penduduk yang tergolong berkecukupan (kaya). Namun, di pihak lain dengan makin suksesnya pembangunan, dan penyuluhan-penyuluhan yang makin intensif di bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, memungkinkan pula bagi penduduk yang berkualitas hidup rendah untuk dapat meningkatkan taraf hidup.

Sungguhpun para responden itu tergolong miskin, tetapi pada kenyataannya mereka relatif telah memiliki sebidang tanah kendati dalam ukuran yang sempit. Rumah tempat tinggal mereka terlihat masih sangat darurat. Dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat dengan adanya bantuan-bantuan untuk perbaikan rumah pada khususnya dan perbaikan kampung pada umumnya, maka keadaan darurat secara bertahap dapat diatasi.

Para responden itu pada dasarnya memiliki kegiatan-kegiatan mata pencaharian tertentu. Salah satu hal yang membatasi pendapatan mereka itu antara lain karena pengalaman dan ketrampilan dalam lapangan kerja yang mereka peroleh relatif sangat rendah serta modal pendidikan yang mereka miliki relatif rendah pula (Tabel IV.1).

Meskipun demikian dengan berbagai usaha pemerintah dewasa ini, seperti pemerataan kesempatan belajar bagi usia sekolah, dan adanya program pendidikan luar sekolah seperti Program Kelompok Belajar (Kejar), Kelompok Pengetahuan Dasar (KPD), untuk mengatasi buta aksara, buta pengetahuan dasar, dan buta bahasa Indonesia, maka keadaan yang demikian itu memungkinkan untuk dapat teratasi. Banyak responden (45%) telah mengikuti salah satu atau beberapa kursus keterampilan. Semuanya itu merupakan modal untuk lebih dapat meningkatkan taraf hidup.

Pada saat ini, sekitar 75% responden menyatakan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan kurang memuaskan. Hal ini berkaitan dengan penghasilan yang mereka peroleh belum dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya ketidak cukupan ini, mereka berusaha untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Rasa ketidakpuasan tersebut terjelma pula de-

ngan keinginan mereka agar anak-anaknya kelak dapat memperoleh pekerjaan yang bersifat lebih produktif dan lebih mensejahterakan dari apa yang mereka capai sekarang ini.

8. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang Kampung Benu-Benu tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Dilihat dari lokasi dan keadaan fisik Kampung Benu-Benu yang termasuk salah satu perkampungan di pusat kota Kendari memiliki letak yang sangat strategis. Kestrategisannya tidak hanya pada letak alamnya melainkan juga letak ekonominya. Kenampakan keadaan perkampungan masih tergolong sebagai perkampungan yang belum seluruhnya memperlihatkan sanitasi lingkungan sehat. Lagi pula keadaan tanahnya bersifat kering dan di sana sini masih terdapat genangan air, baik yang berasal dari laut maupun dari air kali.

Sejarah kelahiran kampung ini menunjukkan bahwa kampung ini merupakan daerah permukiman tertua di kota Kendari. Penduduknya sejak dahulu menunjukkan corak yang majemuk. Kemajemukannya, terlihat dengan adanya berjenis-jenisnya suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan lain-lain aspek sosial ekonomi yang terdapat di kampung ini.

Sekarang, kampung tersebut merupakan salah satu wilayah permukiman di kota Kendari yang tergolong berpenduduk padat. Secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Benu-Benu dengan status rukun kampung serta terbagi menjadi beberapa RT. Sesuai dengan kedudukan wilayahnya di pusat kelurahan tersebut, maka kampung ini merupakan pula pusat pemerintahan kelurahan.

Keadaan ekonomi Kampung Benu-Benu ini ditandai oleh kehidupan ekonomi penduduk yang berciri urban. Mata pencaharian penduduk sudah bergeser dari ciri mata pencaharian pedesaan menjadi ciri mata pencaharian di perkotaan, seperti kegiatan-kegiatan di sektor jasa, jual-beli, dan lain-lainnya. Selain itu pola perbelanjaan para penduduknya pada dasarnya bermutu pada ekonomi pasar. Dan, secara umum kondisi taraf ekonomi penduduk masih tergolong berpenghasilan rendah.

Penghasilan penduduk belum dapat untuk menutupi kebutuhan seluruh keluarga. Pengeluaran biaya yang paling pokok adalah untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Walaupun pendapatan setiap keluarga rendah, namun masih tampak gejala pola hidup

konsumtif. Dalam hal ini, terlihat jelas bila mereka akan mengadakan hajatan pesta. Mereka kurang memperhitungkan bahwa pendapatannya kecil. Dalam melaksanakan pesta mereka berusaha memperoleh biaya dengan berbagai cara.

Sementara itu dilihat dari kondisi fisik kampung, tampak kondisi jalan, sekolah, pembuangan air kotor dan sampah, serta sumber air bersih di kampung ini masih tergolong belum memadai dikaitkan dengan terbinanya kesehatan lingkungan. Sehubungan dengan itu tampak pula kondisi rumah dan pekarangan di kalangan penduduk relatif belum memadai seperti yang dipersyaratkan oleh suatu rumah yang sehat dan memenuhi kesejahteraan keluarga. Juga kondisi tempat berkumpul dan kegiatan-kegiatan sosial serta tempat bermain anak-anak belum memperlihatkan suatu keadaan yang benar-benar dapat menciptakan kehidupan penduduk yang maju.

Kehidupan sosial di kalangan penduduk kampung ini memperlihatkan suatu suasana pola kehidupan tolong menolong dan kebersamaan. Persaingan dan konflik sosial yang timbul pada dasarnya belum menjurus pada hal-hal yang sifatnya berbentuk kejahatan. Juga pola kepemimpinan dalam kampung ini tampak dijiwai oleh kepemimpinan yang berlandaskan kekeluargaan. Hubungan antara pemimpin masyarakat kampung ini dengan warga kampungnya, demikian pula sebaliknya, masih terjalin dalam suatu hubungan masyarakat mufakat yang dijiwai oleh rasa kekeluargaan.

Penduduk kampung ini pada umumnya menganut agama Islam dan Kristen. Penduduk masih menampilkan perhatian akan pentingnya beribadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat tampak antara pemeluk agama yang berbeda itu dapat membina suatu kerukunan hidup yang dilandasi oleh saling pengertian tentang kebenaran agamanya masing-masing. Dalam pelaksanaan ibadah agama, mereka juga memiliki benda-benda keagamaan sesuai dengan agama yang mereka anut seperti peralatan-peralatan yang dipakai dalam melakukan ibadah, baik di rumah maupun di tempat ibadah. Walaupun demikian, masih terdapat di antara responden yang mempercayai makhluk halus dan kekuatan gaib.

Pandangan penduduk mengenai seorang pemimpin yang baik bila pemimpin itu dapat mengurus dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan segala sepak terjangnya mencerminkan nilai-nilai luhur keagamaan. Dengan demikian keyakinan beragama di kalangan penduduk ini tampak dalam citra mereka terhadap seorang pemimpin masyarakat.

B. KAMPUNG LEPO-LEPO

Pokok-pokok uraian tentang Kampung Lepo-Lepo ini seperti halnya dengan uraian Kampung Benu-Benu (di pusat kota Kendari).

1. Pendahuluan

a. Masalah

Kampung Lepo-Lepo sebagai kampung yang menggambarkan perkampungan miskin di pinggiran kota Kendari. Keadaan miskin ini dipengaruhi pula oleh berbagai faktor, seperti kondisi fisik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi.

Pengaruh kondisi fisik bersangkutan dengan lokasinya yang terletak di pinggiran kota dengan kondisi alam yang belum terbenahi pembangunannya secara baik. Pengaruh dari faktor sosial, antara lain berkenaan dengan kepadatan penduduk kampung ini yang jarang. Berbarengan dengan hal itu, penduduk Kampung Lepo-Lepo ini pada umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif rendah. Kondisi ekonomi penduduk bertumpu pada usaha bercocok tanam yang belum intensif.

Sungguhpun penduduk kampung ini secara umum tergolong berpenduduk jarang tetapi persebarannya pada setiap kepala keluarga memiliki anggauta keluarga yang besar. Akibatnya kepala keluarga di kampung ini, memiliki beban tanggungan yang berat. Sedangkan dari pihak penduduk itu sendiri tampaknya masih mengacuhkan hal tersebut itu. Kebanyakan penduduk memandang masa depan sebagai sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana untuk mendapatkan kebutuhan hidup sekarang ini. Oleh sebab itu penduduk cenderung hanya mencari kebutuhan untuk keperluan yang sifatnya sementara. Wujud lain dari pengaruh sosial yang bersifat kurang menguntungkan adalah masih terdapatnya kecenderungan sikap yang meremehkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup, sebab alam di sekitarnya secara mudah memberikan bahan untuk dikonsumsi.

Bertolak dari gambaran keadaan fisik, sosial dan ekonomi penduduk Kampung Lepo-Lepo, maka yang menjadi pokok masalah penelitian adalah seberapa jauh kehidupan penduduk kampung ini memiliki corak kebudayaan kemiskinan.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan di kampung ini pada pokoknya sama dengan penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Benu-Benua. Secara garis besarnya penelitian lapangan di kampung ini dikemukakan sebagai berikut.

Sebelum melakukan penelitian langsung, Tim mengunjungi Kantor Kelurahan Lepo-Lepo untuk mendapatkan data sekunder yang berkaitan dengan Kampung Lepo-Lepo. Data sekunder ini dikumpulkan untuk lebih melengkapi data sekunder yang diperoleh dari kantor Kota Administratif Kendari dan juga pada Kantor Wilayah Kecamatan Mandonga sebagai wilayah kecamatan yang melingkupi Kampung Lepo-Lepo.

Sesudah data sekunder terkumpul, kemudian Tim melakukan penelitian lapangan di kampung ini. Dalam hal ini terlebih dahulu dilakukan observasi umum mengenai kampung ini, khususnya mengenai lingkungan fisik perkampungan dan keadaan sosial ekonomi. Kegiatan observasi ini diselenggarakan setelah izin penelitian dari pemerintah kota Kendari, Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga, dan Kepala Kelurahan Lepo-Lepo. Semuanya ini merupakan kegiatan awal sebelum melakukan penelitian atau pengumpulan data terhadap para responden di kampung ini.

Setelah persiapan-persiapan dapat dirampungkan, selanjutnya Tim melakukan penelitian langsung selama sekitar tiga minggu. Pada hari-hari pertama merupakan masa orientasi untuk mengenal kampung ini secara umum, termasuk pula pembuatan peta kampung ini. Pembuatan peta diusahakan sedemikian rupa sehingga benar-benar mendekati dan sesuai dengan kondisi lingkungan fisik kampung ini. Untuk itu pembuatan peta ini dilakukan secermat mungkin. Cara penentuan lokasi responden di Kampung Lepo-Lepo tidak sama dengan penentuan lokasi responden di Kampung Benu-Benua, pusat kota. Karena pemukiman penduduk Lepo-Lepo berkelompok-kelompok yang diselingi dengan semak belukar maka area sampling tidak dapat dikenakan di kampung ini. Pemilihan responden di kampung ini dilakukan secara acak.

Kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan data terhadap responden tersebut dengan menggunakan "Daftar Pertanyaan" yang telah dipersiapkan lebih dahulu untuk kampung ini. Pengedaran "Daftar Pertanyaan" dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan responden. Untuk hal ini, penelitian membacakan pertanyaan yang termuat di dalam kuesioner dan jawaban dari responden itu ditulis oleh

peneliti sesuai dengan model kuesioner itu. Hal ini dilakukan mengingat para responden itu pada umumnya tidak dapat membaca sendiri dan mencatat jawaban kuesioner. Data primer juga dijangkau melalui wawancara dengan para informan. Informan di sini adalah tokoh masyarakat kampung yang banyak mengetahui tentang seluk beluk kehidupan di kampung ini.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

c. Susunan karangan

Hasil penelitian terhadap Kampung Lepo-Lepo ini disajikan dalam suatu susunan karangan yang terdiri dari pokok-pokok uraian, yaitu (1) Pendahuluan; (2) Gambaran Umum; (3) Kondisi Fisik Kampung; (4) Keadaan Ekonomi; (5) Kehidupan Sosial; (6) Pola kehidupan beragama; (7) Keluarga; dan (8) Kesimpulan. Kedelapan pokok uraian ini intinya mengacu kepada diskripsi tentang corak kebudayaan di kampung ini.

Pada uraian tentang pendahuluan berintikan pembeberan masalah yang secara faktual nampak dalam kehidupan penduduk di kampung ini. Konkritnya, dikaitkan dengan permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu seberapa jauh gambaran kehidupan dan corak kebudayaan di kampung ini. Setelah itu dikemukakan pula secara umum langkah-langkah penelitian yang dilakukan sehubungan dengan permasalahannya.

Yang dimaksud dengan gambaran umum, adalah uraian perihal lokasi dan kondisi fisik, sejarah, kependudukan, administrasi dan pemerintahan di kampung ini. Hal ini dimaksudkan untuk melukiskan selang pandang tentang pengenalan kampung ini sebagai pengantar untuk tiba pada gambaran yang lebih مخصوص tentang corak kebudayaan yang terdapat di kampung ini.

Pada seksi uraian tentang kondisi fisik, dikemukakan hal-hal yang menyangkut kondisi jalan dan sanitasi lingkungan, kondisi rumah/pekarangan, kondisi tempat berkumpul, kegiatan-kegiatan sosial serta arena permainan anak-anak.

Pada seksi uraian tentang keadaan ekonomi, dikemukakan hal-hal yang menyangkut: Pola kehidupan, Mata pencaharian, Pola perbelanjaan, Pola kebiasaan makan-minum, dan Kondisi umum taraf hidup.

Pada uraian tentang kehidupan sosial meliputi penjelasan tentang pola kehidupan sosial, pola kepemimpinan dalam kampung dan pola hubungan sosial. Sedangkan pada pola kehidupan beragama meliputi uraian tentang kewajiban dan penunaian ibadah agama, benda-benda keagamaan, keyakinan kepada makhluk gaib dan pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan.

Pada uraian tentang keluarga mengetengahkan ulasan tentang kondisi rumah tempat tinggal, mata pencaharian dan tingkat pendapatan, biaya hidup, besarnya rumah tangga, stabilitas hubungan perkawinan, pola hubungan keluarga, pendidikan anak dan peranan tangga, peran serta keluarga dalam perkumpulan, dan prospek kehidupan di masa mendatang. Uraian mengenai keluarga ini lebih banyak bertumpu pada data primer, baik dari responden maupun informan.

Akhirnya keseluruhan uraian itu ditutup dengan suatu kesimpulan yaitu rumusan tentang uraian yang berkenaan dengan corak kebudayaan penduduk kampung Lepo-Lepo yang berfokus pada corak kebudayaan.

2. Gambaran Umum

a. Lokasi dan keadaan fisik

Mengenai lokasi dan keadaan fisik Kampung Lepo-Lepo berikut ini menyangkut segi-segi: letak, batas, luas, bentuk, tanah, air, dan iklim. Dilihat dari segi letak alamnya, Kampung Lepo-Lepo merupakan suatu wilayah perkampungan di dataran rendah pedalaman yang terletak di pinggiran kota Kendari. Jaraknya dari pusat kota Kendari kurang lebih 20 km. Kampung ini berada di sekitar Sungai Lepo-Lepo yang relatif besar dan panjang.

Dipandang dari segi ekonomi, Kampung Lepo-Lepo tergolong memiliki letak yang strategis. Hal ini melihat letaknya yang agak terpojok dari jalan protokol (Kendari – Bandar Udara Wolter Monginsidi) dan belum dihubungkan dengan jalan aspal. Oleh sebab itu relatif masih mengalami kesulitan dalam melancarkan kegiatan ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan posisi kurang strategisnya kampung ini, dari segi orbitasi perekonomian di kota ini.

Sebagai suatu kesatuan wilayah perkampungan, Kampung Lepo-Lepo memiliki batas-batas sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Poasia sebelah selatan berbatas dengan RK IX Kelurahan Lepo-Lepo;

sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wua-Wua; dan sebelah barat berbatasan dengan RK I Kelurahan Lepo-Lepo.

Wilayah Kampung Lepo-Lepo kurang lebih 500 ha. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Kelurahan Lepo-Lepo yang melingkupinya luas 4.203 ha, maka kampung ini menempati luas wilayah kelurahan $\pm 11,90\%$. Jika dibandingkan dengan luas kecamatan yang melingkupinya (Kecamatan Mandonga) yang memiliki luas ± 23.461 ha, maka kampung ini menempati luas wilayah kecamatannya $\pm 2,13\%$ (Kotif Kendari, 1982; dan Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, 1982).

Kampung Lepo-Lepo memiliki bentuk perkampungan yang memanjang. Bentuk yang memanjang tersebut lebih menonjol pada arah perbatasan utara dan selatan. Demikian pula keadaan perumahan penduduk juga berbentuk memanjang dari utara ke selatan itu. Jika dilihat secara umum, tampaknya perkampungan ini merupakan sebagai suatu wilayah perkampungan yang dikelilingi oleh tanaman pohon kelapa dan lainnya berupa hutan yang bersemak-semak serta bercampur alang-alang.

Kampung Lepo-Lepo memiliki permukaan tanah yang sebagian besar berbentuk datar. Keadaan tanahnya bersifat gembur, namun terdapat pula sebagian tanah liat yang bercampur pasir-pasir halus/kerikil. Tanah gembur ini pada umumnya terdapat di daerah pinggiran sungai, sedangkan tanah liat pada umumnya terdapat di daerah yang relatif berjauhan dengan sungai.

Sumber air di Kampung Lepo-Lepo ini pada dasarnya cukup baik dan cukup tersedia, baik berupa sumber air kali maupun sumber air tanah. Khususnya sumber air yang bersumber dari kali itu, baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan tetap berair dengan deras. Pada bagian hulu kali, airnya kelihatan jernih. Tetapi pada bagian muara terlihat keruh. Dengan demikian penduduk kampung ini, terutama yang berdekatan dengan kali tersebut tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh air minum. Adapun yang dapat dikatakan agak mengalami kesulitan dalam mendapatkan air minum adalah penduduk yang berjauhan dengan sumber air tersebut dan tidak memiliki sumur sendiri.

Iklim yang berlaku di kampung ini serupa dengan iklim yang berlaku di kota Kendari pada umumnya. Rata-rata suhu udara di atas 20°C . Curah hujan sekitar rata-rata 2.000 mm per tahun (Kantor Kotif Kendari, 1982). Musim penghujan pada umumnya berlangsung pada bulan Nopember sampai dengan Maret, dan musim kemarau berlangsung antara bulan Juni sampai dengan September.

b. Sejarah

Menurut data yang terdapat pada Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, kampung ini termasuk salah satu kampung tua di kota Kendari. Sejak tahun 1914 kampung ini telah ada sebagai suatu kampung yang dipalai oleh seorang kepala kampung. Pada saat itu kampung ini merupakan bagian wilayah dari Kerajaan Konawe yang pada saat itu berkuasa di daerah Kendari.

Pada saat itu kampung ini secara keseluruhan didiami oleh penduduk asli, yaitu suku bangsa Tolaki. Jumlah mereka relatif sedikit, di kampung ini sebagian besar wilayahnya masih merupakan hutan. Rumah-rumah mereka itu juga masih amat jarang dan antara satu dengan yang lain relatif berjauhan. Bentuk rumah mereka seluruhnya merupakan rumah panggung yang bahan ramuannya terdiri dari kayu bulat, bambu, daun nipah/daun sagu, dan bahan-bahan lainnya yang dihasilkan di kampung setempat.

Ketika penjajahan Belanda datang menguasai daerah Kendari, seperti halnya dengan sejarah Kampung Benu-Benu terdahulu, kampung ini pun mendapatkan pengaruh langsung. Berbarengan dengan itu, penduduk dari luar yang mendatangi daerah Kendari makin banyak, seperti suku Bugis dan lain-lain suku bangsa di daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara (Buton dan Muna). Suku bangsa yang datang itu, terutama suku bangsa Bugis, sebagian di antaranya ada yang menempati perkampungan ini. Dari segi jumlah (tidak terdapat angka yang pasti), mereka ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk aslinya (suku bangsa Tolaki). Pada saat itu rintisan jalan yang menghubungkan pelabuhan Kendari dengan daerah pedalaman, khususnya yang menuju ke Bandar Udara Wolter Mongisidi sekarang ini, mulai dibuka. Dengan demikian kampung ini juga menjadi semakin dikenal oleh penduduk, baik dari penduduk di daerah Kendari sendiri maupun penduduk dari luar daerah ini.

Pada waktu pemerintahan Jepang menggantikan kekuasaan penjajahan Belanda (tahun 1942), kampung ini tampak makin meluas. Perumahan penduduk makin bertambah karena pendatang suku bangsa Bugis ke kampung makin meningkat. Dari segi status administrasi masih tetap merupakan suatu kampung yang kepala pemerintahannya disebut kepala kampung dan menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Konawe.

Selanjutnya, pada masa awal Kemerdekaan Indonesia kampung ini secara berangsur-angsur mulai tampak sebagai pemukiman yang

menetap. Dan dari segi administratifnya sudah diatur oleh suatu pemerintahan yang disebut Distrik (Distrik Kendari). Tegasnya bahwa kampung ini merupakan salah satu bagian atau kampung dari Distrik Kendari.

Ketika terbentuknya Kabupaten Kendari sekarang ini (tahun 1959) dengan ibukotanya di Kendari, kampung ini makin ramai dilintasi oleh kendaraan-kendaraan dari Kendari menuju daerah pedalaman utama dan Bandar Udara. Meskipun demikian dilihat dari segi keadaan perkampungan pada umumnya dan khususnya perumahan penduduk serta kondisi sosial ekonomi, relatif belum banyak berubah dari keadaan-keadaan sebelumnya.

Dalam peredaran waktu selanjutnya yaitu pada tahun 1962, terbentuklah desa Lepo-Lepo sebagai salah satu wilayah pemerintahan di bawah Kecamatan Kendari. Dalam penataan desa ini selanjutnya, maka wilayah desa ini dibagi pula menjadi beberapa rukun kampung yang masing-masing rukun kampung itu diurus oleh seorang ketua rukun kampung. Mulai pada saat itu Kampung Lepo-Lepo merupakan salah satu dari rukun kampung di desa ini.

Setelah terbentuknya Propinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 1964 kampung itu tetap merupakan salah satu rukun kampung dari desa yang melingkupinya itu. Dari segi keadaan kampung pada umumnya khususnya menyangkut kondisi sosial ekonomi, tampaknya kampung itu mulai memperlihatkan perkembangan-perkembangan seperti makin jelas wilayah perkampungannya di mana sebelumnya relatif masih ditutupi oleh hutan. Perumahan penduduk sungguhpun masih berbentuk rumah panggung, tetapi tampaknya tidak seperti gubuk-gubuk pada masa lampau.

Pada saat itu kampung tersebut dengan adanya pembagian RK-RK, maka kampung ini berkedudukan sebagai RK II di desa tersebut. Keadaan ini berlangsung hingga peralihan desa tersebut menjadi kelurahan (tahun 1981 hingga sekarang). Dengan demikian kampung ini sekarang lebih dikenal dalam pemerintahan tersebut sebagai RK II Lepo-Lepo.

Sesuai dengan keadaan terakhir ini di sekeliling kampung ini sudah terdapat pula bangunan-bangunan permanen, jembatan-jembatan permanen, namun di dalam wilayah kampung itu sendiri masih menampakkan kehidupan penduduk dan lingkungan perkampungannya yang berkualitas rendah.

c. Kependudukan

Menurut data tahun 1981, penduduk Kampung Lepo-Lepo tercatat sebesar 273 jiwa. Dengan demikian, dibandingkan dengan luas wilayahnya sekitar 500 ha, maka tingkat kepadatan penduduk kampung ini hanya mencapai ± 1 orang per ha. Sedangkan dilihat dari perbandingannya dengan jumlah penduduk Kelurahan Lepo-Lepo pada tahun yang sama yaitu sebesar 2.648 jiwa, maka penduduk kampung ini hanya mencapai $\pm 10,30\%$ -nya. Demikian pula jika dibandingkan dengan penduduk Kecamatan Mandonga pada tahun yang sama, yaitu sebesar 28.377 jiwa, maka penduduk kampung ini hanya sebesar $0,96\%$ -nya. Dan, bersifat lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan penduduk kota Kendari pada tahun yang sama pula yaitu sebesar 85,082 jiwa. Jelasnya, dengan perbandingan terhadap penduduk kota ini, ternyata penduduk kampung tersebut hanya sebesar $0,32\%$ (Kantor Kelurahan Lepo-Lepo). Kesemuanya ini menunjukkan pengertian bahwa penduduk kampung ini termasuk dalam jajaran kampung yang jarang penduduknya di wilayah kota Kendari.

Dilihat dari pertambahan penduduk kampung ini khususnya pada beberapa tahun terakhir ini (1979–1981) rata-rata kenaikannya kurang dari 2% . Ini berarti bahwa kenaikan penduduk di kampung ini tergolong kenaikan penduduk yang bersifat lamban dan berada di bawah kenaikan penduduk secara alami ($2,4\%$). Jadi, kenaikan penduduk di kampung ini, dilihat dari kenaikan rata-rata penduduk kota Kendari setiap tahunnya sebesar $4,1\%$ dan dengan kecamatan yang melingkupinya (Kecamatan Mandonga) yaitu sebesar $\pm 17\%$, maka kenaikan penduduk di kampung ini terpendang amat rendah.

Kemudian dilihat dari jenis kelamin, penduduk di kampung ini, pada tahun tersebut terdiri dari $55,68\%$ laki-laki dan $44,32\%$ perempuan. Ciri kependudukan yang dimiliki oleh kampung ini dalam hal jenis kelamin, tampaknya mengikuti ciri kependudukan kota Kendari di mana mayoritas penduduk kota ini adalah laki-laki. Dengan demikian di kampung ini pun secara kuantitatif potensi tenaga kerja lebih besar pada golongan laki-laki daripada perempuan (Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, 1982, dan Kotif Kendari, 1982).

Selanjutnya dilihat dari golongan umur, penduduk kampung ini pada umumnya termasuk penduduk muda. Golongan usia 10 tahun ke bawah yang tergolong sebagai usia penduduk yang belum produktif tercatat sebesar $\pm 42\%$. Dengan demikian hanya $\pm 58\%$ yang berada dalam golongan usia di atas 10 tahun. Namun jika diperhitungkan

kan dengan masih terdapatnya penduduk yang berusia 60 tahun ke atas sebagai golongan penduduk yang tergolong secara ekonomis mulai kurang produktif, maka jumlah penduduk di kampung ini yang tergolong produktif tersebut. Dengan demikian rata-rata penduduk di kampung ini pun memiliki beban tanggungan yang berat.

Petunjuk lain tentang kependudukan di kampung ini adalah masih rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh penduduk. Hanya sebesar 25% yang menamatkan SD. Terdapat 5% yang tidak tamat SMTP dan yang berhasil menamatkan pendidikan tingkat pendidikan ini adalah sebesar 5%. Selebihnya yaitu 35% tergolong tidak tamat SD dan yang tidak pernah dan belum sekolah sebesar 30%. Dengan demikian di kalangan mereka itu tidak dijumpai adanya yang berpendidikan SMTA, Akademi dan Sarjana (Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, 1982).

d. Administrasi dan pemerintahan

Kampung Lepo-Lepo dilihat dari segi administratif dapat digolongkan sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Kelurahan Lepo-Lepo. Jadi, merupakan salah satu rukun kampung dari kesembilan buah rukun kampung yang ada di kelurahan ini.

Untuk memudahkan pengurusan masyarakat setempat dan sekaligus memberikan peranan secara langsung dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, maka kampung ini terbagi pula wilayahnya atas beberapa rukun tetangga. Di lingkungan kampung ini terdapat lima rukun tetangga. Sesuai dengan pengaturan wilayah kampung tersebut di atas, maka yang bertindak sebagai pimpinan kampung adalah Ketua RK. Ketua RK ini dalam kegiatannya sehari-hari mengurus masyarakat kampung ini, merupakan perangkat pembantu di kelurahannya. Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya itu mendapatkan petunjuk-petunjuk atau pengarahan-pengarahan dari kepala kelurahannya. Sehubungan dengan itu, maka ia bertanggung jawab kepada kepala kelurahan.

Mengenai pemilihan dan pengangkatan RK tersebut pada dasarnya tidak dilakukan menurut ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan administratif yang pada umumnya dilakukan untuk pengangkatan pejabat resmi. Pertimbangan-pertimbangan yang pada umumnya dilakukan dalam penunjukkan ketua rukun kampung tersebut, selain menyangkut kemampuan dan pengalamannya untuk memimpin masyarakat serta kesetiaan pengabdianya kepada masya-

rakat dan dapatnya bekerja sama dengan kepala keluarga. Selain itu juga dipertimbangkan dari segi keteladanan pribadi utamanya yang menyangkut dengan nilai-nilai luhur keagamaan dan adat istiadat mereka.

Sedangkan yang menyangkut ketua rukun tetangga, merupakan perangkat pembantu dari ketua RK ini. Karena itu para ketua rukun tetangga ini pun harus selalu berkonsultasi dengan ketua rukun kam-

pung dalam rangka mereka bersama-sama membantu kepala keluarganya untuk mengurus masyarakat kampung. Seperti halnya dengan penunjukan atau pengangkatan ketua rukun kampung tersebut juga ketua rukun tetangga ini bersifat penunjukkan dari kepala keluarga ini dengan pertimbangan-pertimbangan seperti pada penunjukkan ketua rukun kampung itu.

Dilihat dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk kampung ini maka setiap ketua rukun tetangga tersebut rata-rata mempunyai luas wilayah sebesar 50 ha. Demikian pula dilihat dari jumlah penduduk kampung ini yaitu sebesar 273 jiwa, maka setiap RT tersebut rata-rata memiliki jumlah penduduk sebanyak 55 jiwa.

Dari segi administrasi dan pemerintahan kampung ini, kampung ini pun pada dasarnya mempunyai sistem kepemimpinan yang pada umumnya berlaku di masyarakat pedesaan.

3. Kondisi Fisik Kampung

a. Kondisi lingkungan

Uraian mengenai kondisi lingkungan, berisi hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jalan, selokan, pembuangan sampah dan kotoran lain, air bersih, udara serta kebisingan. Kondisi jalan di dalam lingkungan kampung ini pada umumnya belum semuanya tergolong memadai. Di kampung ini masih terdapat ruas-ruas jalan tanah yang belum diperkeras, dapat dilewati kendaraan roda dua. Akibatnya transportasi penduduk dalam memasarkan hasil produksi mereka ke pasar-pasar umum yang berada di pusat kota Kendari relatif masih banyak mengalami hambatan.

Sejalan dengan keadaan jalan tersebut, tampak sebagian responden (55%) mempunyai kebiasaan membuang sampah di selokan dan kali. Dan sebagian responden lainnya membuang dan membakar sampah di halaman rumahnya. Dalam hal pembuangan sampah, ternyata sebagian besar responden belum memiliki tempat sampah yang teratur.

Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi keperluan penduduk sehari-hari pada dasarnya kampung ini memiliki sumber air dari sungai. Selain dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sungai yang mengalir melalui kampung ini juga dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Usaha penduduk untuk menjaga kebersihan air sungai tersebut relatif belum memadai, karena masih banyak penduduk yang membuang sampah di sungai. Dengan demikian, sungguhpun air sungai ini cukup untuk dijadikan sumber air bagi kebutuhan keluarga, akan tetapi dengan adanya tindakan-tindakan serupa itu menyebabkan air sungai tidak dapat dipertahankan kebersihannya. Para responden belum dapat mengusahakan sumur sendiri yang sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Kalaupun ada beberapa responden (5%) yang memiliki sumur timba sendiri, pembuatannya juga bersifat sederhana.

Hal lain yang berkenaan dengan kondisi fisik adalah kebersihan udara dan kebisingan. Mengenai hal ini agaknya belum merupakan sesuatu yang bersifat sangat kritis dan mengganggu bagi kehidupan penduduk kampung ini. Sesuai dengan lingkungan alamnya yang secara alami masih ditumbuhi oleh pohon-pohon, baik yang berupa tanaman perkebunan mereka maupun pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya. Hal ini masih berpengaruh baik bagi kesehatan udara yang amat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Tambahan pula hal-hal yang dapat menimbulkan polusi seperti pabrik-pabrik belum terdapat di kampung ini. Masalah kebisingan belum merupakan suatu gangguan bagi ketentraman penduduk setempat. Hal ini disebabkan karena belum adanya gangguan kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan gangguan kebisingan serta bengkel-bengkel dan industri-industri yang menimbulkan kebisingan.

Memperhatikan semuanya itu, maka kondisi fisik kampung yang menyangkut pembuangan air kotor dan sampah serta keadaan jalan di lingkungan kampung ini terlihat belum memenuhi harapan bagi terbinanya lingkungan hidup yang sehat. Tetapi dalam hal kebersihan udara dan kebisingan, kampung ini masih tergolong bersih.

b. Kondisi rumah dan pekarangan

Mengenai kondisi rumah dan pekarangan yang diuraikan di sini dibatasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan bentuk rumah, kondisi bangunan, dan kondisi pekarangan.

Dipandang dari segi jenis rumah penduduk di kampung ini, secara umum dapat digolongkan atas rumah tunggal, rumah petak, ruang

dan kamar bagian rumah tinggal. Hampir semua penduduk memiliki jenis rumah bersifat terpisah antara keluarga satu dengan yang lain. Hanya beberapa keluarga saja yang masih tampak menumpang pada rumah keluarga lain. Bentuk perumahan Kampung Lepo-Lepo sebagian besar berbentuk rumah panggung. Dan sebagian kecil nampak kelompok perumahan yang dibangun tapas tanah (di atas tanah langsung). Jadi, sebagian besar penduduk kampung relatif belum melepaskan bentuk rumah yang secara tradisional yang telah dikenal sejak dahulu, yaitu rumah panggung.

Bahan ramuan dinding rumah penduduk kampung ini dari papan, gedek (anyaman bambu), atau bahan dinding lainnya. Kebanyakan rumah penduduk kampung dindingnya terbuat dari gedek dan yang ber dinding papan masih dalam jumlah yang terbatas. Secara umum dapat dikatakan sebagian besar kondisi rumah penduduk masih tergolong sebagai rumah darurat. Mengenai kelengkapan rumah berupa kamar mandi dan jamban, masih sedikit rumah yang memilikinya. Kebanyakan penduduk kampung memanfaatkan kamar mandi dan jamban umum. Kalaupun ada rumah yang dilengkapi dengan kamar mandi, itupun dalam bentuk bangunan sederhana sekali yaitu dari dinding gedek.

Dalam hal penerangan rumah pada malam hari, hampir semua rumah mempergunakan lampu minyak. Beberapa keluarga yang mampu, mempergunakan lampu patromak untuk penerangan malam hari.

Luas bangunan rumah, berkisar antara 25–30 m². Hanya sekitar 5% perumahan penduduk memiliki luas sekitar 40–50 m². Sesuai dengan ukuran luas bangunan rumah, maka banyak ruang atau kamar yang dimiliki oleh rumah-rumah di kampung ini rata-rata memiliki dua ruangan. Ada pula beberapa rumah penduduk memiliki tiga ruang. Tetapi masih pula terlihat beberapa rumah yang hanya memiliki satu ruangan saja.

Halaman pekarangan perumahan penduduk Kampung Lepo-Lepo pada umumnya mempunyai batas berupa pagar hidup (pagar dari tanaman). Luas halaman yang mereka miliki bervariasi antara 11–40 m². Kebanyakan luas halaman yang mereka miliki sempit dengan ukuran sekitar 11 – 20 m². Penduduk yang mempunyai halaman luas (21–40 m²) tidak begitu banyak.

c. Kondisi tempat berkumpul

Aspek lain yang berhubungan dengan perihal kondisi fisik Kampung Lepo-Lepo berkenaan dengan tempat berkumpul, tempat ke-

giatan-kegiatan sosial dan tempat anak-anak bermain. Menyangkut tempat berkumpul bagi para responden, terutama pada waktu-waktu senggang, pada umumnya menggunakan tempat-tempat, seperti di rumah sendiri, di rumah tetangga dan lain-lainnya. Tempat berkumpul di sini merupakan tempat pertemuan antar warga untuk melepaskan lelah setelah selesai melakukan pekerjaan. Tampaknya penduduk menyenangi rumah tetangga untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul. Pada umumnya rumah tetangga yang dipilih sebagai tempat berkumpul adalah rumah tetangga yang sifatnya lebih lapang dan aman untuk didatangi.

Selanjutnya mengenai tempat-tempat kegiatan sosial di kalangan warga kampung pada dasarnya dapat dikelompokkan atas kegiatan yang bersifat kemasyarakatan pada umumnya dan urusan keagamaan. Mengenai tempat kegiatan-kegiatan sosial yang berkenaan dengan urusan kemasyarakatan dapat dilakukan di Balai Kelurahan atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sedangkan menyangkut tempat kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat keagamaan pada umumnya dilakukan di mesjid dan langgar atau gereja. Selain itu, biasa pula dilakukan pertemuan di rumah kepala kelurahan, di rumah pemuka agama dan di rumah tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Adapun yang dimaksudkan dengan kegiatan-kegiatan sosial di sini antara lain berupa kegiatan-kegiatan kerja sama untuk kepentingan bersama melalui usaha-usaha yang bersifat kegotong-royongan, atau kegiatan-kegiatan penyuluhan dari pemerintah setempat untuk masyarakat di kampung ini. Dalam pada itu mengenai tempat anak-anak bermain dapat disebutkan antara lain halaman rumah sendiri, halaman rumah tetangga, dan tempat-tempat lainnya. Tempat anak-anak bermain yang bersifat menonjol adalah di halaman rumah tetangga yang dianggap cukup luas. Ada pula anak-anak yang bermain di jalan kampung.

Dalam kenyataannya tempat anak-anak bermain tersebut tidak hanya ditempati oleh anak-anak dari suatu rukun tetangga, tetapi juga terdapat anak-anak dari rukun tetangga yang lain di lingkungan kampung ini, bahkan dari luar kampung ini. Hal ini berarti bahwa melalui arena permainan anak-anak itu secara tidak langsung terbina keakraban hubungan antar anak di kalangan penduduk kampung. Sebab dengan makin sering mereka berkumpul, bermain-main di satu segi mereka dapat mengembangkan kepribadian juga secara tidak langsung mulai tersalur dorongan kebutuhan hidup bermasyarakat.

4. Keadaan Ekonomi

a. Pola kehidupan ekonomi

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa penduduk Kampung Lepo-Lepo masih memperlihatkan suatu kualitas kehidupan yang masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas hidup ini banyak dipengaruhi oleh suatu keadaan perekonomian yang relatif masih rendah pula. Dari kedua puluh orang responden dalam penelitian ini terlihat 55% berpenghasilan kecil, rata-rata Rp. 10.000,-. Dengan penghasilan serupa ini jika diperinci lebih jauh, maka responden yang berpenghasilan demikian rata-rata dalam seharinya memperoleh penghasilan \pm Rp 300,-. Walaupun demikian, ada juga responden yang berpenghasilan rata-rata Rp 666,-/hari (35%) dan sekitar Rp. 900,-/hari (10%). Penghasilan yang demikian ini belum dapat untuk menutup kebutuhan hidup keluarga yang rata-rata anggotanya terdiri dari 4 orang. Dengan makin meningkatnya harga kebutuhan pokok sehari-hari, pada umumnya penghasilan mereka belum dapat menjamin kebutuhan hidup sekeluarga.

Rendahnya tingkat pendapatan itu pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi. Faktor-faktor itu antara lain belum berkembangnya usaha-usaha di kalangan para responden itu untuk mencari lapangan kerja yang lebih produktif, baik dengan memanfaatkan potensi alamnya maupun usaha-usaha untuk lebih meningkatkan keterampilan berusaha. Di samping itu tidak luput pula pengaruh dari faktor-faktor prasarana ekonomi seperti kelancaran transportasi yang menembus kampung mereka sehingga lebih melancarkan hasil produksi mereka. Memang diakui bahwa di lingkungan kampung ini pada dasarnya telah dijangkau oleh transportasi umum. Bahkan untuk menyeberang sungai, masih harus melewati jembatan darurat yang hanya terdiri dari dua papan kurang lebih sepanjang 5 meter. Pola kehidupan ekonomi di Kampung Lepo-Lepo ini masih berada pada suatu kondisi yang belum cukup diukur dari pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

b. Mata pencaharian

Ditelusuri dari segi mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk kampung ini, terlihat bahwa mereka itu pada umumnya masih bergerak dalam bidang pertanian. Dari jumlah responden yang memiliki pekerjaan ternyata hampir keseluruhan dari mereka itu masih me-

lakukan kegiatan bercocok tanam. Sebagian dari mereka itu menggarap sawah dan berladang.

Meskipun demikian, dilihat dari pekerjaan penduduk kampung ini tampaknya di antara mereka itu telah ada yang menjuruskan diri pada usaha-usaha pertukangan dan pengolahan hasil hutan. Frekuensi dari responden yang berusaha serupa ini agaknya masih terlampau kecil dibandingkan dengan polusi penduduk kampung ini. Lagipula pada kenyataannya, bagi mereka yang dalam usahanya mengalami kegagalan akhirnya kembali pada kegiatan bercocok tanam itu. Dengan demikian, penduduk kampung ini pada umumnya cenderung masih mendambakan pekerjaan sebagai petani dari pada bergerak di sektor-sektor usaha seperti jasa dan industri.

Dilihat dari penduduk yang melakukan usaha bercocok tanam itu, tampaknya banyak dilakukan oleh penduduk lama di kampung ini. Adapun penduduk yang relatif baru bermukim di kampung ini terutama yang berasal dari luar daerah ini dengan pengalaman mereka di tempat asal, mereka sudah mulai usaha-usaha kerajinan seperti pertukangan kayu, pembuatan batu bata, dan kerajinan rumah tangga lainnya.

c. Pola perbelanjaan

Pola perbelanjaan di kalangan penduduk di Kampung Lepo-Lepo ini, menunjukkan bahwa tempat berbelanja untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang tidak dapat diproduksi di tempat, dilakukan di pasar (seminggu sekali), di warung (menurut kebutuhan yang mendesak) dan tempat-tempat penjualan umum baik yang ada di lingkungan kampung mereka maupun di pusat kota Kendari. Dapat ditambahkan bahwa pengertian berbelanja di sini tidak dapat diartikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecukupan. Akan tetapi bagi mereka ini yang berbelanja ke warung semata-mata untuk membeli barang-barang makanan pokok karena tidak dapat dihasilkan dari kegiatan usaha mereka sendiri seperti garam, gula, dan minyak tanah. Dari segi frekuensi perbelanjaan mereka tergolong amat jarang. Demikian pula dengan berbelanja ke pasar. Hal ini dipengaruhi oleh selain daya beli mereka yang amat rendah juga mereka pada dasarnya dari segi konsumsi makanan sehari-hari relatif amat sederhana sesuai dengan penghasilan mereka dan kebiasaan lingkungan mereka.

Pada umumnya penduduk kampung relatif berbelanja besar jika sewaktu-waktu ada kebutuhan yang penting harus dilakukan seperti

pada keperluan sunatan, hajatan dan selamatannya serta perkawinan. Namun pembelanjaan sesuai dengan kondisi kemampuan mereka.

Selain dari pembelanjaan yang bersifat rutin tersebut, penduduk juga harus mengeluarkan biaya kebutuhan khusus seperti untuk keperluan sosial, pendidikan anak, membantu kerabat dan lain-lainnya. Untuk kepentingan sosial misalnya berupa sumbangan, berupa uang atau makanan yang biasanya diminta oleh mereka dari tokoh-tokoh masyarakatnya secara sukarela dalam melakukan kerja bakti atau gotong-royong di kampung mereka. Pengeluaran untuk pendidikan anak selain untuk kebutuhan pakaian sekolah, juga iuran pendidikan anak-anak mereka di sekolah seperti sumbangan BP3. Pengeluaran untuk membantu kerabat misalnya bila sewaktu-waktu di kalangan kerabat ada yang mengalami kesulitan sedangkan mereka memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan guna membantu kesulitan kerabat tersebut. Kendatipun demikian, ini tidak berarti bahwa mereka menyisihkan dana khusus untuk keperluan itu. Akan tetapi keadaannya bersifat temporal dan menurut kemampuan mereka pada saat hal-hal tersebut memerlukan pengeluaran. Sehingga pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan ketiadaan uang, hal itu mereka tidak melakukannya.

d. Pola kebiasaan makan minum

Sesuai dengan keadaan kehidupan penduduk Kampung Lepo-Lepo, makanan pokok mereka pada umumnya campuran dari bahan-bahan makanan seperti sagu, dan beras. Pengadaan bahan makanan pokok bagi mereka yang bekerja sebagai petani dapat mereka hasilkan sendiri. Pada waktu-waktu tertentu, jika hasil pertanian mereka gagal terpaksa mereka membeli, baik melalui tetangga yang memilikinya maupun di pasar yang terdekat.

Kebiasaan yang menyangkut frekuensi makan pada setiap harinya, mereka mempunyai pola kebiasaan makan dua kali dalam sehari yakni di siang hari dan malam hari. Tampaknya mereka ini masih kurang memperhatikan akan pentingnya makan pagi. Hal ini dipengaruhi selain oleh keterbatasan ekonomi untuk dapat mengadakannya, juga karena kebiasaan yang ada. Pada umumnya mereka itu relatif memandang bahwa makan pagi tidak seberapa penting yang terpenting adalah di siang hari tatkala selesai bekerja. Bagi mereka sudah merasa cukup pada pagi hari dapat meneguk secangkir kopi atau teh.

Dilihat dari komposisi makanan mereka sehari-hari, tampaknya mereka belum banyak memperhatikan susunan makanan sehat. Ma-

sih ada anggapan di antara mereka bahwa makanan sehat adalah makanan yang mahal harganya. Mereka belum dapat memanfaatkan sumber-sumber makanan yang berupa sayur-mayur untuk melengkapi bahan makan pokok. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak mampu mengadakan sayur-mayur. Sayur-mayur merupakan hasil tanaman mereka sendiri. Penduduk kurang mengerti akan adanya sumber-sumber makanan yang bergizi dan berprotein. Di pihak lain dimungkinkan pula oleh dorongan untuk memanfaatkan seluruh hasil tanaman mereka sebagai barang jualan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini agaknya hal tersebut relatif mulai makin disadari penduduk. Sehingga telah terdapat di antara mereka yang memanfaatkan pekarangan berupa untuk penanaman sayur-mayur dan beberapa jenis tanaman sebagai apotik hidup. Hal ini dimungkinkan oleh telah adanya penyuluhan-penyuluhan, baik yang diberikan oleh pemerintah kota setempat dan petugas-petugas kesehatan maupun melalui wadah penggerak PKK. Namun belum dapat dikatakan bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan serupa ini telah dapat merubah kebiasaan, tetapi secara umum hal tersebut berangsur-angsur akan merubah cara mengatur dan mengadakan makanan sehat.

Hal lain yang menyangkut pola kebiasaan makan minum itu terlihat cirinya berupa masih adanya penduduk yang belum memanfaatkan pertemuan di saat makan sebagai salah satu media pendidikan dan merukunkan kehidupan keluarga. Sungguhpun hal ini belum dapat diperoleh angka absolut tentang jumlah responden yang kurang memanfaatkan hal ini, akan tetapi terdapat indikasi di mana orang tua beranggapan bahwa makan bersama dengan anak bersifat kurang sopan. Pada hal sesungguhnya hal ini adalah media pendidikan bagi anak-anak pada khususnya dan keluarga pada umumnya.

e. Kondisi umum taraf hidup

Melalui uraian terdahulu khususnya menyangkut kehidupan ekonomi, pola perbelanjaan dan pola makan minum, secara umum telah menyiratkan pengertian tentang kondisi umum taraf hidup penduduk di kampung ini. Dengan penghasilan rata-rata sebanyak kurang lebih tiga ratus rupiah per hari yang merupakan modus penghasilan di kalangan mereka itu, oleh mereka sendiri merasakannya sebagai penghasilan yang rendah. Terdapat sejumlah 15% responden yang menyatakan cukup, 35% yang menyatakan kurang, dan 50% menyatakan sa-

ngat kurang untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Ketidak mampuan ini menimbulkan sikap merasa kurang puas terhadap penghasilan mereka itu. Sebagian besar dari mereka itu menyatakan bahwa penghasilan mereka sangat kurang khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh anggota keluarga mereka.

Bila mereka mengalami kesulitan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka cenderung meminta bantuan tetangga dan kerabat lain. Dilihat dari segi kerukunan, hal ini menyiratkan pengertian bahwa di kalangan penduduk masih bersifat terbuka untuk meminta bantuan dari tetangga dan kerabat lain. Tetangga dan kerabat yang dimintai bantuan itu pada saat mereka mengalami kesulitan juga akan meminta bantuan yang serupa itu. Berdasarkan semuanya itu dapat ditarik pengertian bahwa kondisi umum taraf hidup para responden itu pada khususnya dan penduduk kampung ini pada umumnya masih terpendang sangat rendah.

5. Kehidupan Sosial

Uraian mengenai kehidupan sosial akan difokuskan pada aspek-aspek yang berkenaan dengan pola kehidupan sosial, pola kepemimpinan dalam kampung, dan pola hubungan sosial.

a. Pola kehidupan sosial

Mengenai pola kehidupan sosial yang dimaksudkan di sini ditujukan pada uraian tentang kehidupan sosial para responden itu berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sosial, hubungan tolong menolong, persaingan dan konflik sosial, serta gosip. Sebagian besar dari responden itu (75%) menyatakan saling kenal-mengenal antar sesama warga kampung. Hanya sebagian kecil penduduk kampung yang mengenal antarsesama warga hanya secara umum, dalam arti sekedar tahu sebagai warga satu kampung.

Hubungan penduduk dengan warga se kampung diluar rumah tetangganya masih memperlihatkan corak hubungan yang luas. Hal terlihat dari 75% jawaban responden menyatakan mengenal sebagian besar penduduk sekampung di luar RT-nya, sedangkan yang mengenal sebagian penduduk di RT-nya itu tercatat sebesar 25%. Meluasnya hubungan sosial ini tidak hanya di kalangan para responden itu sendiri tetapi juga di kalangan anak-anak mereka. Hubungan pembauran secara kawin mawin, ternyata bahwa para responden (75%) itu bersikap terbuka dalam segi pandangan dan sikap tentang perkawinan

luar suku bangsanya. Mereka ini setuju akan adanya perkawinan silang antarsuku bangsa (Tabel IV. 26). Ini merupakan suatu indikasi bahwa hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan para responden itu tidaklah bersifat sempit. Perkawinan yang mereka setuju tidak harus sesuku bangsa.

Jenis-jenis kegiatan yang sifatnya dapat mendorong terbinanya keakraban para responden itu adalah berupa arisan, gotong-royong dan lain-lainnya. Melalui kegiatan ini yang paling menonjol diikuti adalah kegiatan gotong-royong dan berikutnya adalah olahraga serta arisan (Tabel IV. 29). Keikutsertaan kegiatan gotong-royong tidak hanya menampak di kalangan para responden itu sendiri melainkan juga dengan anggauta-anggauta rumah tangga mereka.

Para responden yang selalu ikut serta dalam kegiatan sosial sebesar 75%, kalau ada waktu sebesar 20%, yang tidak sama sekali sebesar 5%. Tentang anggauta keluarga mereka dalam hal yang serupa itu, tercatat bahwa yang selalu mengikuti sebesar 65% dan yang menyatakan hanya mengikuti kalau ada waktu sebesar 35%.

Tempat-tempat para responden itu meminta bantuan bila dalam ketiadaan uang atau kebutuhan sehari-hari adalah pada kerabat, tetangga, teman dan lainnya. Dari tempat-tempat mereka meminta bantuan itu ternyata bahwa kerabat mempunyai persentase yang tertinggi (55%) dari pada yang lainnya. Demikian juga bila mengalami kesulitan uang karena ada anggauta keluarga yang sakit, tumpuan tempat meminta bantuan adalah kerabat dekat dan tetangga. Kehidupan sosial di kampung ini masih dijiwai oleh rasa kesetia kawan dan kebersamaan.

Keadaan para responden itu dalam hal ketiadaan uang tetapi didesak oleh suatu kepentingan untuk memperoleh barang kebutuhan yang bersifat penting. Di sini terlihat bahwa umumnya para responden itu menghindari kebiasaan berhutang. Cara yang umumnya mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan semacam itu adalah dengan cara mencari barang yang murah sesuai dengan daya beli mereka (75%) melalui tukang loak. Cara yang mereka tempuh relatif bersifat positif, dilihat dari kondisi perekonomian mereka yang tergolong miskin. Ciri lainnya tampak pula dalam peristiwa hajatan dan selamatan. Dalam pelaksanaan hajatan dan selamatan banyak (90%) dibantu oleh kerabat dan tetangga.

Bila pada sewaktu-waktu terjadi kasus-kasus seperti pencurian dan tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang hendak mengganggu ketenteraman dan keselamatan rumah tangga, maka para responden

melakukan tindakan berupa mengusir atau menolong tetangga yang mengalami kasus serupa itu atau memanggil tetangga yang lain untuk memberikan bantuan. Persentase jumlah responden yang menyatakan diri melakukan pertolongan kepada tetangga baik dengan cara mengusir atau meminta tolong, masing-masingnya sebesar 85% dan 15%. Hubungan tolong menolong di kalangan para responden itu, tampaknya tidak hanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat bersuka cita melainkan juga pada peristiwa-peristiwa kedukaan atau mengalami gangguan keamanan.

Mengenai masalah persaingan dan konflik sosial di kalangan para responden ini, tidak menjurus pada pertentangan yang bersifat berat. Sumber-sumber yang cenderung dapat menimbulkan konflik sosial di kalangan para responden itu di antaranya adalah menyangkut perihal anak, hutang piutang dan kehiruk pikukan. Dari kesemua sumber penyebab itu hanya sebagian kecil (5%) dialami oleh para responden itu. Dengan perkataan lain bahwa 95% dari mereka itu tidak mengalami konflik yang ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab sedemikian itu (Tabel IV. 19 dan IV. 20). Di kalangan para responden tersebut relatif masih dapat mencegah diri untuk tidak terlibat dalam hal-hal persengketaan.

Tentang cara penyelesaian yang dilakukan para responden yang mengalami sengketa dua cara penyelesaian yaitu secara kekeluargaan tanpa bantuan orang lain, dan secara kekeluargaan dengan bantuan orang lain (Tabel IV. 21 dan IV. 22). Dari cara-cara yang ditempuh para responden itu dapat ditarik pengertian bahwa mereka pada umumnya cenderung menyelesaikan persengketaan secara damai. Responden yang terlibat dalam persengketaan relatif kecil.

Dalam kaitannya dengan masalah sengketa tersebut, maka para responden itu tampaknya amat berhati-hati di dalam hidup bertetangga terutama dengan yang berlainan bahasa dan adat istiadat. Pada umumnya para responden itu berusaha menghindari adanya persengketaan yang timbul karena kesalah pahaman bahasa dan adat istiadat orang lain. Mereka berusaha mengenal bahasa dan adat istiadat orang lain atau tetangganya, dengan maksud agar dapat melakukan hubungan sosial dengan suku bangsa yang berbeda secara sebaik-baiknya. Selain itu, ada pula yang melakukan usaha berupa memperkenalkan bahasa dan adat istiadat yang dimilikinya kepada tetangganya atau penduduk sekampungnya, dengan maksud yang serupa (Tabel IV. 23).

Pergunjungan atau gosip merupakan salah satu ciri yang menearangkan kehidupan sosial yang berlaku di kalangan suatu masyarakat. Dengan melihat beberapa gejalanya seperti kebiasaan berbincang-bincang, dan obyek perbincangan serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan di kalangan responden Kampung Lepo-Lepo. Hampir semua responden (90%) menyatakan sering berbincang-bincang dengan tetangga atau sesama warga kampungnya. Tentang tempat perbincangan telah dijelaskan terdahulu bahwa mereka sering melakukan hal tersebut di rumah tetangga. Mengenai obyek perbincangan pada dasarnya menyangkut antara lain pengalaman hidup masing-masing dan lainnya. Hanya 15% yang memperbincangkan masalah-masalah lain yang bersifat umum. Dengan demikian terlihat bahwa tampaknya mereka itu cenderung memusatkan perhatian mengenai kehidupan mereka sendiri tanpa membicarakan pribadi orang lain.

Dilihat dari waktu-waktu yang digunakan untuk berbincang-bincang tersebut, biasanya para lelaki melakukan di saat-saat luang seperti di sore hari atau di malam hari. Yang paling sering dilakukan adalah perbincangan pada malam hari. Sedangkan bagi para wanita (ibu-ibu rumah tangga mereka) umumnya tidak menentu waktunya, biasanya tatkala bertemu di sumur, di kali atau di rumah tetangga. Obyek perbincangan mereka adalah ke rumah tetangga pada umumnya. Responden tampaknya memanfaatkan waktu luang mereka untuk berbincang-bincang dengan para tetangga ataupun sekampungnya.

Masalah keamanan, biasanya merupakan salah satu bahan perbincangan disamping hal-hal lainnya yang menyangkut pengalaman hidup masing-masing. Dalam memperbandingkan keamanan kampung mereka dengan kampung lain, mereka menyatakan bahwa sama amannya dan ada pula yang menyatakan lebih aman.

b. Pola kepemimpinan dalam kampung

Yang tergolong sebagai pemimpin atau tokoh warga masyarakat di kampung ini adalah ketua rukun kampung dan tokoh adat serta agama. Khusus ketua rukun kampung ini, bertindak sebagai perangkakat pembantu kepala kelurahan yang mengurus masyarakat kampungnya. Dalam menjalankan kegiatan kepengurusan masyarakat, di samping dibantu oleh ketua rukun tetangga di lingkungannya, juga dibantu pula oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya yaitu seperti tokoh agama dan tokoh adat.

Tokoh agama membantu ketua rukun kampung tersebut, terutama dalam hal-hal kehidupan beragama. Yang dimaksud dengan tokoh agama seperti tokoh agama Islam dan agama Kristen. Jadi, sesuai dengan agama yang dianut oleh mereka itu maka di kampung ini dikenal adanya imam mesjid, khotib (sebagai tokoh agama Islam) dan Pendeta (sebagai tokoh agama Kristen). Sedang yang dimaksud dengan tokoh adat adalah mereka yang banyak mengetahui seluk-beluk adat yang berlaku di kampung ini. Dilihat dari segi umur tokoh adat ini pada umumnya telah memiliki umur yang lanjut dan relatif telah lama berdomisili di kampung ini.

Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, merupakan hubungan yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. Jadi, sesuai dengan kedudukan mereka sebagai pemimpin informal. Sebaliknya, dari pihak warga masyarakat kampung ini memandang para pemimpinnya sebagai pribadi yang memiliki kelebihan baik dilihat dari segi usia maupun dari segi pengalaman. Singkatnya mereka itu memandang pemimpinnya sebagai tokoh pelindung dan pembimbing dalam kehidupan mereka. Di sini tampak bahwa agaknya para pemimpin tersebut memiliki kewibawaan yang bersifat kodrat. Kemudian dilihat dari segi peranan mereka tampaknya para pemimpin itu cukup memperlihatkan suatu peranan yang berarti bagi kehidupan masyarakat kampung ini, terutama yang menyangkut perdamaian dan ketertiban masyarakat. Pada umumnya para pemimpin itu berperan dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di kalangan para responden, secara kekeluargaan cukup besar. Munculnya keadaan demikian ini merupakan perwujudan dari kesadaran perlunya membina kerukunan hidup yang sedikit banyaknya ditumbuhkan oleh para pemimpin mereka tersebut.

Dari hasil pengamatan dalam penelitian ini ditemukan bahwa para pemimpin itu cukup mempunyai pengaruh terhadap warga kampung seperti dalam mendorong mereka untuk memperhatikan kesejahteraan hidup mereka, dalam hidup keagamaan, dan menegakkan norma-norma kemasyarakatan. Selain itu juga tampak dalam urusan-urusan kesejahteraan materiel, seperti dalam berkoperasi dan arisan. Kendatipun belum dapat disajikan di sini tentang seberapa banyak yang menjadi anggota koperasi (KUD), tetapi wadah ini telah terdapat di kampung para responden. Demikian pula mengenai arisan jumlah yang mengikutinya masih dalam persentase relatif masih kecil (15%).

Dalam kaitan dengan kerukunan hidup beragama tampaknya para pemimpin itu berperan dalam membina dan mendorong tumbuhnya saling pengertian dari pemeluk agama yang berbeda. Hal ini misalnya terlihat makin terwujudnya saling tolong menolong dan kerja-sama antar pemeluk agama yang berbeda dalam urusan-urusan kemasyarakatan dan saling kunjung mengunjungi pada hari-hari besar keagamaan.

c. Pola hubungan sosial

Pola hubungan sosial di antara para responden pada dasarnya diwarnai oleh kemajemukan tempat asal, alasan pindah dan perbedaan tempat lahir, serta perbedaan agama. Meskipun masyarakat penduduk kampung menunjukkan ciri majemuk tetapi agaknya tidak menjadi penghambat bagi terbinanya suatu kerukunan hubungan sosial. Pola hubungan sosial para responden itu juga diwarnai oleh suatu kecenderungan untuk mematuhi adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Dalam hal penentuan kedudukan dan kehormatan seseorang, pada umumnya para responden bertitik tolak pandangan dari segi amal dan budi pekertinya serta ketaatan beragama. Sedangkan pandangan responden mengenai hubungan pergaulan antara kaum muda di kampung dengan para orang tua, cukup baik. Hampir semua kaum muda/remaja kampung menghormati dan patuh kepada orang tua masing-masing dan orang-orang tua di kalangan masyarakat kampung. Dalam pergaulan sehari-hari para responden menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa nasional (bahasa Indonesia) dan bahasa daerah. Pemakaian dari kedua bahasa tersebut disesuaikan dengan kondisi dan siapa yang diajak bicara. Biasanya untuk mencerminkan suatu keakraban sesama suku, mereka gunakan bahasa daerah.

6. Pola Kehidupan Beragama

Yang dimaksudkan dengan pola kehidupan beragama di sini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan (1) kewajiban, amal, dan ibadah agama, (2) benda-benda keagamaan. (3) keyakinan pada makhluk gaib; dan (4) pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan. Dalam hal ini ditunjukkan kepada responden Kampung Lepo Lepo.

a. Kewajiban, amal dan ibadah agama

Mengenai kewajiban, amal dan ibadah agama di kalangan para responden dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu selalu ditempat ibadah, sebanyak 10%, di rumah saja sebanyak 50%, dan pada waktu tertentu di tempat ibadah sebanyak 40%. Sebagian besar responden telah menjalankan ibadah yang pada pelaksanaannya dilakukan di rumah. Adapun yang telah melakukan di rumah dan kadang-kadang di mesjid adalah menempati urutan yang kedua setelah kategori yang tersebut pertama itu. Tampaknya kecenderungan penunaian ibadah di kampung ini relatif cukup positif karena, sebagian besar mereka itu menyatakan menunaikan ibadah. Dalam hal ini menurut keyakinan agama yang dianut oleh mereka itu. Dalam uraian ini belum dapat dinyatakan seberapa jauh pelaksanaan ibadah itu benar-benar telah sesuai dengan syariat agama yang mereka anut, karena masalah ini sifatnya adalah masalah pribadi dan bathiniyah.

Hampir semua penduduk Kampung Lepo-Lepo menganut agama Islam. Bagi responden yang dapat membaca Kitab Suci Al Qur'an, pada umumnya setiap malam khususnya malam Jum'at meluangkan waktu untuk membaca Al Qur'an (mengaji). Biasanya yang melakukan pengajian setiap malam atau setiap tiga hari sekali adalah orang-orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Hanya sekitar 20% responden yang menyatakan tidak membaca kitab suci. Mereka ini tergolong orang-orang yang sibuk kerja atau buta aksara Al Qur'an.

Kemudian dipandang dari segi perwujudan tanggung-jawab untuk membekali anak-anak mereka berupa pengetahuan agama, terungkap bahwa sebagian besar responden (75%) menyatakan kadang-kadang mengajar mereka membaca kitab suci Al Qur'an. Baru sekitar 10% responden yang mengatakan hampir setiap malam memberi pelajaran mengaji pada anak-anaknya. Responden yang tidak mengajar mengaji pada anak-anaknya relatif kecil jumlahnya. Responden yang demikian ini, mungkin yang tergolong tidak adanya waktu dan atau buta aksara Al Qur'an.

b. Benda-benda keagamaan

Yang dimaksud dengan benda-benda keagamaan di sini adalah sarana untuk melakukan ibadah sehari-hari, seperti sajadah, kitab suci, sarung, rukuh, dan lain sebagainya. Menyangkut Kitab Suci Al Qur'an yang secara umum dapat dimasukkan sebagai peralatan penting dalam memahami dan mendalami tuntunan agama, agaknya be-

lum semua para responden yang memilikinya. Pemilikan kitab suci tersebut bukanlah satu-satunya ukuran kelengkapan peralatan ibadah, akan tetapi ditinjau dari sudut penumbuhan dan usaha memper-tebal keyakinan terhadap Tuhan, maka hal ini pada dasarnya amat penting untuk dimiliki oleh setiap umat Islam. Pada umumnya, para responden tidak memiliki peralatan peribadatan secara lengkap.

Di beberapa rumah keluarga responden terlihat adanya hiasan dinding yang bermotif serta bertuliskan kalimat-kalimat ayat suci Al Qur'an dan almanah yang gambar-gambarnya bernafaskan Islam. Secara umum, dapat dikatakan bahwa belum semua responden memiliki benda-benda keagamaan sebagai sarana untuk melaksanakan ibadah. Karena kondisi ekonomi mereka yang rendah, juga oleh tingkat kebutuhan untuk memiliki hal itu agaknya belum banyak mendapat perhatian mereka.

c. Keyakinan pada makhluk gaib

Di samping keyakinan agama sesuai dengan apa yang diterangkan terdahulu, ada juga beberapa responden (65%) agaknya mempercayai adanya makhluk dan kekuatan gaib. Berarti, kepercayaan bersifat mitos masih hidup di kalangan mereka. Hal ini juga dikarenakan oleh pemilikan tingkat pengetahuan dan pendalaman ajaran kitab suci relatif belum mantap. Adanya kepercayaan terhadap makhluk gaib tampak pada upacara dalam bidang pertanian dan pendirian rumah.

Pada kegiatan pertanian, terlihat masih adanya di kalangan para responden yang menggunakan mantra-mantra atau semacam sesaji kepada kekuatan gaib. Sesajian itu dengan maksud agar usahanya terhindar dari hal-hal yang merusak atau mengganggu tanaman sehingga hasilnya berlipat ganda. Umumnya mantera demikian itu disebut sebagai doa penolak bala. Demikian pula pada waktu panen juga diucapkan mantra-mantra. Pada waktu mendirikan rumah, memanggil dukun untuk mengusir roh roh halus yang mengganggu ketentraman penghuni rumah. Selain itu juga terkandung maksud agar penghuninya berolah kesehatan dan rejeki yang murah.

Semua mantra dan sesajian yang mereka adakan merupakan permohonan atau permintaan kepada kekuatan gaib untuk tidak mengganggu kehidupan mereka dan memperoleh rezeki yang berlimpah. Dewasa ini dengan intensifnya penyuluhan-penyuluhan keagamaan, relatif makin meningkatkan pengetahuan mereka tentang apa sesungguhnya kekuatan gaib. Dengan harapan mulai menipis gejala yang menjurus pada pemujaan terhadap makhluk dan kekuatan gaib itu.

Walaupun kepercayaan serupa itu belum dapat dikatakan terhapus semua. Mereka masih mempunyai kecenderungan memuja makhluk gaib bila mengalami kegagalan atau kemacetan usaha. Mereka merasa karena tidak dilakukannya persembahan terhadap kekuatan gaib itu. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib itu seolah-olah merupakan pelajaran dari kegagalan yang sering dialami dalam hidup ini. Selain membaca mantra-mantra, mereka sering melepaskan hewan atau memotongnya guna pengorbanan terhadap makhluk gaib itu, mengunjungi kubur keramat dan lain-lain. Pada umumnya yang masih memegang teguh kepercayaan itu adalah golongan penduduk yang sudah berumur lanjut.

di Pengaruh keyakinan agama terhadap pola kepemimpinan

Tokoh agama di sini disamping mempunyai peranan sebagai pendidik masyarakat di bidang keagamaan juga sebagai pemimpin merupakan tekanan pemimpin formal khususnya yang berada di tingkat kelurahan yang meliputi kampung ini. Kepala kelurahan setempat atau ketua rukom kampung ini dalam kegiatan kepemimpinan masyarakat sewaktu-waktu meminta pertimbangan pada pemimpin informal dalam rangka memajukan kehidupan masyarakat. Sumbangan sumbangan tokoh masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mengurus kehidupan masyarakat kampung yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dititik pengertian bahwa pemimpin formal, dan pemimpin informal dalam masyarakat kampung ini terdapat suatu iklim kerja sama yang relatif cukup tampak gejala positif.

Pada kepemimpinan masyarakat kampung ini masih memperhatikan nilai-nilai keagamaan menurut apa yang diamanatkan oleh penduduk setempat. Oleh karena kerja sama seperti ini menyangkut masalah yang sifatnya kualitatif, maka penelitian yang bersifat eksploratif masih sulit untuk membuktikan secara akurat tentang hasil kerja sama itu. Hanya yang pasti dapat dilihat dari proses pembentukan pemimpin dalam masyarakat kampung ini turut diwarnai oleh keyakinan agama penduduk yang bersangkutan. Masyarakat kampung ini cenderung lebih bersikap respek, baik sesama warga kampung maupun dengan para tetamu yang menampakkan perilaku keagamaan. Seseorang akan mendapat perlakuan dan penghormatan bila dalam perilakunya memperlihatkan kepatuhan terhadap agama.

7. Keluarga

a. Kondisi rumah tempat tinggal

Kondisi rumah tempat tinggal responden pada umumnya memiliki kualitas rumah darurat. Hal ini ditandai oleh bahan-bahan ramuan rumah yang tidak dapat tahan lama, yaitu jenis kayu yang berkualitas rendah, bambu, daun nipah, dan daun sagu. Bentuk rumah sederhana dan tidak memiliki ruangan yang cukup bagi kebutuhan anggota keluarga (Tabel IV. 4).

Keadaan rumah tersebut tidak dapat terlepas dari pengaruh kemampuan mereka untuk mendirikan rumah. Penghasilan mereka yang sangat rendah tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah yang lebih layak seperti yang umumnya dimiliki oleh golongan penduduk yang berpenghasilan cukup. Dilihat dari ukuran luas rumah keadaannya belum memadai sesuai dengan banyaknya anggota keluarga mereka. Ukuran luas rumah yang mereka miliki rata-rata 30 m² ke bawah (Tabel IV. 7). Dengan luas seperti ini maka banyaknya kamar yang mungkin mereka miliki hanya dua ruang dengan ukuran yang kecil pula. Bahkan ada rumah yang hanya terdiri dari satu ruang saja (Tabel IV. 4). Sekeliling rumah mereka, cenderung belum memperlihatkan suasana lingkungan bersih dan tertib. Hal ini tampak dari kebiasaan pemakaian jamban dan pemubangan sampah. Jamban dan kamar mandi belum banyak dimiliki penduduk (Tabel IV. 6).

b. Mata pencaharian dan tingkat pendapatan

Mata pencaharian penduduk di kampung ini khususnya di kalangan responden masih lebih terpusat pada kegiatan bercocok tanam. Sesuai dengan ciri perkampungan di pinggiran kota pada umumnya masih bergerak di bidang usaha di sektor pertanian, baik berupa perkebunan maupun pertanian pangan. Teknik yang digunakan dalam usaha pertanian masih lebih mencirikan suatu kegiatan yang bersifat tradisional.

Rata-rata pendapatan mereka setiap bulannya berkisar sepuluh ribu rupiah. Apabila diperinci pendapatan mereka per hari ternyata hanya mencapai sekitar tiga ratus rupiah. Tingkat pendapatan tersebut bila dikaitkan dengan beban tanggungan keluarga, relatif amat rendah. Dengan makin meningkatnya biaya hidup sehari-hari, pendapatan mereka tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan (Tabel IV. 9).

Penduduk di kampung ini masih tergolong pada kelompok penduduk yang memiliki perekonomian sangat lemah.

c. Biaya hidup

Pada umumnya, para responden menghabiskan pendapatan mereka terutama untuk kebutuhan pangan baru menyusul kebutuhan sandang. Pemenuhan kebutuhan sandang pada dasarnya hanya sewaktu-waktu saja. Di samping pemenuhan kedua macam kebutuhan tersebut, responden juga memiliki pengeluaran biaya khusus seperti biaya pendidikan anak, biaya untuk perlengkapan rumah tangga, dan biaya untuk keperluan sosial.

Salah satu akibat yang timbul dari ekonomi keluarga yang relatif rendah itu adalah tidak terdapatnya sisa dari pendapatan yang dapat dijadikan sebagai tabungan. Kalau pun ada frekuensinya sangat kecil dari suatu populasi masyarakat yang tergolong miskin. Lagi pula sisa yang dapat ditabung relatif amat kecil sehingga tampaknya tidak berarti bila dibandingkan bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.

Kebiasaan penduduk di kampung ini berbelanja pakaian hampir setiap setahun sekali. Bahkan sebenarnya sukar diukur dari segi waktu maupun dana yang dikeluarkan atau yang dipersiapkan untuk kebutuhan ini. Sungguhpun pada dasarnya mereka tidak mampu, tetapi berusaha untuk mengganti pakaian keluarga mereka. Dalam hal ini mereka melakukannya (berbelanja pakaian) menurut ukuran daya beli mereka. Pada umumnya mereka berbelanja pakaian menurut kebutuhan yang sangat mendesak dan dalam jangka waktu yang lama serta mereka tidak dapat memprogramkan pengeluaran dengan pendapatan mereka yang amat kecil. Namun yang pasti bahwa di kalangan penduduk atau para responden secara rata-rata masih dapat mengadakan kebutuhan pakaian bagi keluarganya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam hal biaya untuk perlengkapan rumah tangga amat sulit dipenuhi oleh para responden. Hal ini terlihat dari perlengkapan rumah tangga yang amat sederhana (Tabel IV. 8). Pengadaannya pada beberapa responden membuatnya sendiri. Hal ini serupa karena ketidakmampuan mereka untuk membeli di toko atau di tempat-tempat penjualan yang khusus. Barang-barang serupa ini seperti kursi kayu dibuat secara sederhana, tempat tidur dan kelengkapan dapur lainnya. Adapun bagi mereka yang tidak mampu menghasilkannya sendiri, terpaksa karena kepentingannya berusaha membeli menurut ukuran daya beli mereka.

Menyangkut biaya untuk pendidikan, mempunyai sasaran pada perbelanjaan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka di sekolah. Mereka itu pada umumnya hanya berkemampuan untuk menyekolahkan anak di tingkat sekolah dasar yang ada di lingkungan kampung mereka dengan ukuran pembiayaan yang relatif tergolong murah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan sekolah adalah pengaduan pakaian sekolah pada waktu tertentu. Karena pengaduan pakaian seragam sekolah tidak setiap saat dilakukan. Pakaian seragam anak-anak mereka dapat dipakai selama satu atau tiga tahun, maka pengeluaran untuk ini pada dasarnya bersifat temporer. Sesuai dengan taraf kemampuan, mereka mempunyai pengeluaran biaya untuk pendidikan. Dalam hal ini bagi responden yang memiliki anak yang sedang bersekolah.

Bagi para responden (65%) yang memperkirakan adanya kekuatan makhluk atau roh dan kekuatan gaib biasanya mengusahakan biaya untuk mengadakan upacara sesajinan. Maksud upacara tersebut untuk menghindarkan dari gangguan dan supaya dapat memperoleh ketenteraman atau hasil berlimpah. Pelaksanaan upacara bersifat amat jarang, mungkin setahun sekali atau beberapa tahun sekali.

Upacara yang bersifat memadam biaya besar buat mereka itu adalah bila terjadi upacara pesta perkawinan. Sungguhpun mereka berstatus sosial ekonomi rendah, bila sewaktu-waktu melaksanakan perkawinan keluarga tetangga atau anak kandung sendiri mereka cenderung mengeluarkan biaya yang demikian besar. Di kalangan mereka ini tampaknya memperlihatkan suatu masyarakat yang selalu memperalihkan atau mempertinggi status sosial bila terjadi upacara serupa itu. Akibatnya terkadang memaksakan kemampuan untuk menyediakan biaya yang cukup besar. Berhubung kegiatan seperti ini pun sukar diramalkan terjadinya dan bersifat amat jarang, maka pengeluaran biaya untuk keperluan ini pun relatif sulit untuk ditentukan secara pasti.

Biaya untuk keperluan sosial di kalangan responden masyarakat Kampung Lopo-Lopo ini terlihat gejalanya pada peristiwa seperti kematian, sumbangan terhadap rukun tetangga dan rukun kampung, keamanan, dan lain-lain semacamnya. Biaya untuk keperluan seperti itu di kalangan para responden tersebut tidak dapat pula ditentukan secara absolut. Ini disebabkan karena keperluan ini pun bersifat temporer. Tambahan pula besarnya biaya untuk keperluan ini disesuaikan dengan kondisi pemilik yang pada saat-saat terjadinya peristiwa semacam itu.

Pada saat kedukaan atau kematian, para responden yang mengetahuinya berusaha untuk mengunjungi keluarga yang berduka. Di saat itu, mereka memberikan sumbangan menurut kemampuan mereka. Jika dalam ketiadaan uang, mereka menyumbangkan tenaga. Dalam konteks demikian itu menunjukkan bahwa biaya untuk keperluan sosial di kalangan para responden itu, pada dasarnya tidak terprogram.

Menyangkut sumbangan rukun tetangga dan rukun kampung serta keamanan pada umumnya amat kecil jumlahnya menurut kemampuan yang ada. Oleh karena hal ini pun sifatnya sukarela, maka tidak dapat terukur secara pasti tentang jumlah pengeluaran mereka untuk keperluan sosial itu.

Dengan biaya untuk keperluan ibadat yang dimaksudkan disini, adalah pengeluaran yang ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan ibadat yang pada umumnya bersifat rutin. Pengeluaran atau terlaksananya ibadat yang dilakukan secara sebaik-baiknya. Contohnya pengeluaran-pengeluaran yang menyangkut pembelian alat-alat perlengkapan ibadat dan dana sukarela. Dalam hal ini disesuaikan dengan agama yang dianut oleh para responden tersebut.

Pengeluaran biaya untuk peribadatan, juga tergantung kepada ada tidaknya uang yang tersedia. Bila mereka tidak memiliki uang, mereka tidak memaksakan diri untuk memberi sumbangan. Tetapi, bagi umat Islam selalu menyediakan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan masing-masing, terutama pada hari raya Idul Fitri.

d. Besarnya rumah tangga

Yang dimaksud dengan besarnya rumah tangga dalam uraian ini adalah jumlah anggota keluarga termasuk kepala keluarga itu sendiri. Dalam hal ini ditujukan pada responden di Kampung Lepo-Lepo. Besarnya rumah tangga bagi para responden itu secara keseluruhannya berjumlah 75 jiwa. Dengan demikian setiap keluarga responden di kampung ini rata-rata sebesar kurang lebih 4 jiwa.

Berdasarkan angka rata-rata tersebut terlihat adanya petunjuk bahwa di kalangan para responden di Kampung Lepo-Lepo ini nampakkan pula suatu pemilikan besarnya rumah tangga yang kecil. Namun di antara keluarga para responden ada beberapa responden (10%) yang memiliki 10 orang anggota keluarga. Anggota keluarga responden berkisar antara dua sampai sepuluh orang. Anggota keluarga ini, selain anak-anak kandung sendiri juga termasuk kerabat,

baik dari pihak suami maupun istri. Biasanya orang tua yang sudah uzur menjadi tanggungan anak kandung yang sudah berkeluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tipe keluarga responden itu termasuk dalam kategori keluarga besar (extended family). Ada pula beberapa keluarga responden yang besar rumah tangganya masih tergolong kecil (anggauta rumah tangga sejumlah dua orang). Di lingkungan kampung ini utamanya di daerah sekitarnya terdapat Puskesmas Pembantu dan Pos-Pos Keluarga Berencana. Sarana kesehatan ini tampaknya turut melayani kebutuhan-kebutuhan penduduk kampung ini khususnya yang berkenaan dengan program kependudukan.

Dari uraian ini menunjukkan bahwa besarnya rumah tangga di kalangan para responden itu pada prinsipnya masih tergolong dalam ukuran yang kecil. Dalam hal ini berdasarkan kecenderungan modus rata-rata anggauta keluarga tersebut (rata-rata 4 orang per KK). Meskipun bila ditilik secara lebih mendasar tentang pendapatan mereka yang rendah, maka dengan jumlah anggauta rumah tangga sebesar itu pada dasarnya mulai memprihatinkan keadaannya.

e. Stabilitas hubungan perkawinan

Mendahului uraian tentang stabilitas perkawinan para responden di Kampung Lepo-Lepo, perlu dikemukakan bahwa mereka itu terdiri dari 100% ($f = 20$) pria. Dari jumlah mereka itu dilihat dari status perkawinan mereka terdiri dari 95% berstatus perkawinan yang pertama dan 5% status perkawinan yang kedua. Menurut komposisi umumnya, 70% responden berusia 39 tahun ke bawah dan 30% berusia 40 tahun ke atas.

Kestabilan hubungan perkawinan di antara para responden itu pada umumnya tampak pada frekuensi status perkawinan yang mayoritas merupakan perkawinan yang pertama. Bagi responden yang berstatus perkawinan kedua bukan disebabkan cerai hidup dengan pasangannya tetapi semua disebabkan karena salah satu pasangannya meninggal dunia. Hubungan perkawinan di kalangan pasangan suami-istri responden pada dasarnya terpendang stabil. Perceraian yang terjadi di kalangan keluarga Kampung Lepo-Lepo yang disebabkan oleh hal-hal seperti percekocokan dan faktor-faktor sosial lainnya relatif amat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan perceraian karena kematian.

f. Pola hubungan keluarga

Hubungan keluarga di kalangan para responden tersebut (di kampung Lepo-Lepo) pada umumnya terdiri dari keluarga besar, yaitu ayah, ibu dan anak-anak kandung serta mereka yang termasuk kerabat keluarga, seperti mertua, menantu, keponakan dan sepupu. Jadi di kalangan responden Kampung Lepo-Lepo tidak hanya menanggung beban biaya untuk anak-anak kandungnya sendiri melainkan juga kerabat keluarga lain.

Adapun dilihat dari segi hubungan dalam lingkungan keluarga terdapat ciri bahwa yang menjadi pemimpin rumah tangga adalah ibu dan bapak. Hubungan itu dan bapak ini adalah merupakan sebagai pemimoin dan pelindung utama, sedangkan ibu sebagai pendamping dan pendidik anak-anak yang paling menonjol. Dalam pergaulan hidup sehari-hari tampaknya karena kesibukan sang ayah melaksanakan pekerjaan maka kebiasaan berbincang dalam keluarga bersama jarang dilakukan. Hal ini juga sering terjadi karena kesibukan beberapa ibu rumah tangga sibuk mencari tambahan penghasilan di luar rumah. Kesibukan mencari nafkah, baik dari pihak ayah maupun ibu, menyebabkan kekurangan frekuensi perbincangan antar anggota dalam keluarga. Bila terjadi hal-hal yang merupakan masalah rumah tangga seperti kesulitan keuangan, pada umumnya para responden itu mengandalkan tanggung jawab bersama dari ibu dan bapak (suami/isteri) Tabel IV. 27). Demikian pula bila anak-anak mengalami masalah maka penyelesaiannya banyak bertumpu pada bapak dan ibu sebagai pimpinan rumah tangga.

Kedudukan kedua orangtua (ibu dan bapak) di hadapan anak-anaknya agaknya terdapat petunjuk bahwa wiabawa dan kehormatan orangtua relatif masih dapat terpelihara. Anak-anak mereka relatif masih menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran dan nasehat orangtua. Suatu indikasi lain tentang rasa hormatnya anak kepada orang tuanya terdapat pada kebiasaan takutnya anak untuk menyebut nama langsung dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, tersimpul bahwa pola hubungan keluarga para responden itu khususnya dilihat dari hubungan bapak, ibu dan anak-anak masih memperlihatkan adanya kewibawaan orang tua.

g. Pendidikan anak dan peranan tetangga

Seperti telah dikatakan terdahulu, bahwa pola hubungan keluarga di kalangan para responden Kampung Lepo-Lepo masih dapat di-

kuasai oleh kedua orangtua. Dengan demikian pendidikan anak, sesuai dengan sifat kodrati dari kedua orangtua relatif masih tetap berlangsung dan terbina secara baik. Pandangan para responden tersebut tentang perilaku anak-anaknya yang sekaligus mempolakan pendidikan yang diberikan kepada anak, dapat dikategorikan pada: anak harus patuh pada perintah dan nasehat orangtua (85%); anak harus mempunyai sikap sendiri (5%); dan setelah mendengar pandangan orangtua, anak dapat berbuat menurut pertimbangannya (10%). Cara responden mendidik anak-anaknya dipengaruhi oleh kebiasaan turun temurun dan latar belakang tingkat pendidikan yang mereka miliki

Tetangga ikut berperan pada pendidikan anak terutama bila terjadi perkelahian antar anak pada waktu bermain. Untuk saling menjaga suatu suasana yang dapat mendukung terbinanya kerukunan hidup bertetangga, biasanya tetangga yang melihat perkelahian anak tersebut akan melerai tanpa memihak.

Dalam hal kenakalan anak-anak, pada umumnya para responden (65%) bersikap memarahi anak. Istilah "memarahi" pada dasarnya bertujuan untuk merubah tingkah anak yang dianggap kurang baik dan mengarahkan ke hal-hal yang positif. Pandangan responden dalam hal keikutsertaan tetangga bila anak-anaknya nakal, sebagian besar responden menyatakan bahwa tetangga boleh ikut menegur dan memarahinya. Tetapi dalam hal perkelahian anak-anak, baik para responden maupun tetangga hampir semua tidak mau mencampurinya. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan anak-anak yang harus diselesaikan sendiri. Namun demikian, mereka selalu mengarahkan pada anak-anak untuk menyelesaikannya secara damai. Biasanya anak-anak tersebut cepat damai dan bermain bersama kembali.

Masih dalam menghadapi kenakalan anak, ada pula sebagian responden (30%) yang menyatakan bahwa tetangga sama sekali tidak boleh mencampurinya. Menurut mereka, para tetangga hanya boleh melaporkan peristiwa kenakalan anak pada orang tua yang bersangkutan (Tabel IV. 23). Dan yang berhak menegur ataupun memarahinya adalah orangtua masing-masing.

Dalam kehidupan masyarakat Kampung Lepo-Lepo, keikutsertaan tetangga/warga kampung dalam proses sosialisasi anak akan nampak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal tersebut dimungkinkan karena tempat bermain anak kebanyakan dilakukan di luar halaman rumah sendiri (halaman tetangga, jalan, dan tempat lain). Di tempat-tempat itu peran tetangga/warga kampung bila terjadi ke-

nakalan ataupun perkelahian antar anak ikut menegur dan memberi pengarahannya yang baik. Teguran mereka terhadap anak-anak yang bersangkutan pada umumnya bersifat positif. Teguran semacam ini merupakan bantuan bagi orang tua yang bersangkutan dalam rangka memperbaiki kelakuan anak di lingkungan masyarakat.

Mengenai pemilihan sekolah anak, sebagian besar responden sudah mengikut sertakan anak untuk menentukan (Tabel IV. 28). Hanya sebagian kecil responden (25%) yang menentukan ke mana anaknya harus sekolah. Secara umum, mayoritas responden (75%) mengikuti pendidikan sekolah umum dan belajar agama. Mereka menginginkan anak-anaknya memahami dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Para responden menghendaki anak-anaknya memperoleh pendidikan, baik umum maupun agama melebihi orang tuanya. Oleh sebab itu kebanyakan orang tua tidak memberikan tugas anak di rumah, bila hal itu mengganggu pelajaran sekolah. Walaupun demikian, masih ada responden (25%) yang mengharuskan anaknya membantu tugas di rumah. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya pembantu sedang kedua orang tua sibuk mencari nafkah. Jadi anak-anak harus ikut serta mengerjakan pemeliharaan rumah, seperti membersihkan rumah, dan membantu pekerjaan bapak atau ibu. Walaupun cita-cita para responden cukup tinggi untuk menyekolahkan anak tetapi karena keterbatasan dana, mereka hanya mampu menyekolahkan anak pada tingkat sekolah dasar dan ada beberapa yang mampu hingga tingkat lanjutan.

h. Peran serta keluarga dalam perkumpulan

Di Kampung Lepo-Lepo telah ada kegiatan-kegiatan perkumpulan, seperti arisan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta kegiatan olahraga. Dan ada kegiatan yang sewaktu-waktu dikerahkan oleh pihak pimpinan kampung untuk bergotong royong demi kepentingan bersama. Kecuali kegiatan bergotong royong, peran serta responden ataupun anggauta keluarganya tampaknya kurang aktif. Hal ini disebabkan karena kesibukan mereka dalam pekerjaan atau usaha-usaha lain untuk mencari nafkah. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa di antara responden tidak mengikuti kegiatan perkumpulan di kampung. Walaupun dalam jumlah yang kecil sudah nampak keikutsertaan di antara mereka, seperti arisan (15%) dan kegiatan olahraga (45%).

Peran serta responden dalam perkumpulan tersebut cenderung masih didorong oleh prakarsa atau perintah pimpinan kampung dan tokoh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena tingkat pengetahuan mereka relatif rendah dan tidak tersedianya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

j. Prospek kehidupan di masa mendatang

Dengan makin berkembangnya kota Kendari pada masa mendatang, Kampung Lepo-Lepo kelak akan berada dalam orbitasi pusat kota. Dilihat dari segi pendidikan, pada umumnya penduduk kampung ini tergolong berpendidikan yang relatif rendah. Akan tetapi dengan berbagai usaha pemerintah dewasa ini, seperti: (1) perluasan dan kesempatan belajar bagi penduduk usia sekolah; serta (2) kursus-kursus untuk mengatasi buta aksara, buta pengetahuan dasar, buta bahasa Indonesia, dan kursus berbagai keterampilan; maka keadaan tersebut dapat teratasi. Rupanya usaha pemerintah mendapat sambutan masyarakat kampung walaupun masih dalam persentase yang kecil. Kursus keterampilan yang mereka peroleh ini akan merupakan modal dasar untuk lebih meningkatkan taraf hidup.

Sekarang ini, mayoritas penduduk menyatakan kurang puas terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini merupakan perwujudan adanya keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Rasa ketidakpuasan tersebut membuka pikirannya akan perlunya pendidikan. Tumpuan peningkatan kehidupan yang lebih baik tercermin pada keinginan mereka agar anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang mereka lakukan sekarang. Keinginan ini merupakan pendorong bagi penduduk untuk menyekolahkan anak sesuai dengan kemampuan dana yang ada.

8. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai Kampung Lepo-Lepo tersebut, dapat disajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kampung Lepo-Lepo merupakan salah satu pemukiman yang sudah tua. Dahulu, mayoritas penduduk terdiri dari penduduk asli (suku bangsa Tolaki). Namun kini dengan adanya kemudahan transportasi, penghuni Kampung Lepo-Lepo menunjukkan adanya kemandirian suku bangsa. Walaupun demikian, penduduk Kampung Lepo-Lepo masih tergolong jarang.

Secara administratif, kampung ini berstatus sebagai rukun kampung merupakan salah satu RK dan Kelurahan Lepo-Lepo. Sesuai dengan letaknya di pinggiran kota, kampung ini masih bercirikan pedesaan. Kegiatan perekonomian penduduk mayoritas bertumpu di bidang pertanian.

Sementara itu, kondisi kampung yang tampak dari keadaan jalan kampung, selokan, pembuangan air kotor dan sampah, dan perumahan belum memadai. Penggolongan pemukiman ini sebagai salah satu kampung miskin, diperkuat pula oleh taraf hidup ekonomi penduduknya masih terpendang sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.

Kehidupan sosial di kalangan penduduk memperlihatkan suatu pola kehidupan yang mencerminkan adanya suasana tolong menolong dan kebersamaan. Persaingan dan konflik sosial yang timbul pada dasarnya belum menjurus pada hal-hal yang berbentuk kejahatan. Semua persengketaan yang terjadi di kalangan penduduk dapat diselesaikan secara kekeluargaan, baik oleh kedua belah pihak yang bersangkutan maupun dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang ikut berperan dalam penyelesaian suatu persengketaan, biasanya pimpinan formal (RT/RK) ataupun pemuka/tokoh masyarakat (adat atau agama).

Mayoritas penduduk Kampung Lepo-Lepo menganut agama Islam. Selebihnya ada yang menganut agama Kristen. Antara kedua pemeluk agama tersebut sudah terbina adanya kerukunan tanpa saling mengganggu. Landasan kehidupan beragama di kalangan penduduk tercermin pada ketaatan beribadat dan citra mereka terhadap penentuan seorang pemimpin. Di samping keyakinan agama tersebut, di kalangan penduduk kampung ini masih ada yang mempercayai adanya kekuatan gaib. Hal ini tampak dengan adanya berbagai upacara dengan mantera-mantera untuk menolak bala dan minta rezeki serta kunjungan ke makam leluhur disertai sesajian.

Walaupun penghasilan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tampak adanya gejala pola hidup konsumtif. Dalam hal ini, terlihat jelas bila mereka akan mengadakan pesta. Untuk melaksanakan suatu pesta, mereka berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan biaya yang cukup besar.

Dewasa ini, keadaan warga masyarakat Kampung Lepo-Lepo memperlihatkan corak kebudayaan masing-masing suku bangsa. Pada masa mendatang kemungkinan adanya percampuran kebudayaan antara penduduk asli (suku bangsa Tolaki) dengan penduduk pendatang.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam bab kesimpulan ini akan disajikan perwujudan corak kebudayaan masyarakat kampung di kota Kendari yang dalam penelitian ini ditujukan pada pemukiman penduduk (RK) yang tergolong miskin. Kampung Benu-Benu mewakili kampung yang berada di pusat kota dan Kampung Lepo-Lepo mewakili kampung di pinggiran kota. Perwujudan corak kebudayaan di kampung miskin di kota Kendari adalah sebagai berikut.

A. CORAK CARA HIDUP KEBIASAAN WARGA MASYARAKAT KAMPUNG

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kampung di kota ini tampaknya masih cenderung pada kebiasaan yang masih diwarnai oleh cara-cara kehidupan yang kurang maju, baik dilihat dari segi pemanfaatan waktu maupun dalam bersikap mengatur hidup. Menyangkut pemanfaatan waktu, agaknya warga kampung belum dapat mengisi waktu senggang dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengarahkan pencapaian tingkat kesejahteraan keluarga. Kurangnya pendidikan dan pengalaman mempengaruhi warga kampung dalam hal bagaimana memanfaatkan waktu secara efektif.

Hal lain yang menyangkut corak cara hidup kebiasaan masyarakat kampung ini tampak masih adanya kecenderungan sikap konsumtif terutama dalam mengadakan hajatan. Hal ini terlihat pula pada waktu mereka memperoleh penghasilan lebih, akhirnya tidak tersisa dalam bentuk tabungan untuk masa mendatang. Di antara warga kampung masih banyak yang beranggapan bahwa rezeki hari ini adalah untuk hari ini dan untuk hari esok adalah kemudian.

Dalam pada itu di kalangan warga masyarakat kampung ini tampaknya masih terbina cara hidup yang didasari prinsip memberi dan menerima. Di satu pihak hal ini mengandung unsur positif dan merupakan perwujudan dari azas kekeluargaan dan kebersamaan. Tetapi, di pihak lain mempunyai akibat sampingan di kalangan beberapa warga yang seolah-olah mendambakan uluran tangan dan pemberian dari orang lain.

Dari segi kesehatan, tampak adanya kebiasaan yang masih belum memadai dengan kehidupan lingkungan keluarga yang sehat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pola kebiasaan turun temurun. Dalam kebiasaan makan-minum cenderung ditafsirkan sebagai sekedar menghilangkan lapar serta beranggapan bahwa makanan yang sehat adalah yang mahal harganya.

B. KAITAN ANTARA KONDISI LINGKUNGAN DENGAN TINGKAT PENDAPATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kondisi lingkungan warga kampung di kota ini pada dasarnya dapat dikelompokkan atas kondisi lingkungan yang berciri urban (perkotaan) dan berciri rurak (pedesaan). Penduduk yang tinggal di pusat kota mempunyai kondisi lingkungan urban, pada umumnya kegiatan penduduk bersifat heterogen menjurus pada sektor usaha, jasa, dan industri. Sedangkan penduduk yang berada di pinggiran kota, kondisi lingkungannya bersifat rural pada umumnya kegiatan penduduk masih bertumpu pada sektor kegiatan pertanian. Baik penduduk yang berada di lingkungan urban maupun rural tersebut masih memperlihatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang relatif rendah. Berarti, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi penduduk masih berada dalam kategori miskin. Salah satu indikatornya adalah adanya tingkat penghasilan yang bermodus pada besar antara sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah rata-rata per keluarga dalam setiap bulan. Rata-rata pendapatan keluarga sekitar tiga ratus rupiah per hari. Tingkat pendapatan yang demikian ini tidak dapat menjamin kebutuhan keluarga yang anggautanya terdiri antara 2–10 orang.

Tingkat pendapatan yang rendah ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain (1) relatif masih rendahnya pengalaman dan keterampilan kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilakukan penduduk kampung ini; (2) rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk kampung, (3) penduduk belum dapat memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi yang ada di lingkungannya secara efektif untuk meningkatkan penghasilan mereka; (4) relatif belum dimilikinya beberapa modal dasar penting seperti peralatan teknis dan atau dana yang dapat menopang produktivitas usaha; (5) relatif masih terbatasnya sektor lapangan kerja yang terbuka di lingkungan mereka yang dapat dilakukan sesuai dengan pengalaman dan keterampilan mereka; dan (6) pengaruh sikap konsumtif masih terda-

pat di kalangan penduduk. Meskipun demikian, predikat ketunaan seperti tuna karya, tuna wisma, dan tuna tertib tidak dapat dikenakan di kampung ini. Pada umumnya penduduk kampung mempunyai pekerjaan walaupun pendapatan mereka relatif rendah. Di samping itu, penduduk kampung pada umumnya memiliki tempat tinggal yang menetap walau masih berstatus darurat. Kebanyakan bangunan rumah sudah dimiliki sendiri walau dengan luas bangunan dan tanah yang relatif sempit.

Penduduk kampung, pada umumnya masih memperhatikan aturan dan norma hidup bermasyarakat. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Mereka tampaknya setia dan mengamalkan ajaran agamanya.

C. POLA-POLA HUBUNGAN SOSIAL

Pola hubungan antar warga kampung didasari azas kekeluargaan dan kebersamaan. Pola hubungan sosial memperlihatkan suatu kondisi kerukunan dan saling tolong menolong. Bila terjadi persaingan atau konflik antar warga pada dasarnya bukan karena penonjolan individu akan tetapi lebih banyak disebabkan karena kesalahpahaman, pinjam meminjam, dan kenakalan anak.

Dewasa ini, penduduk kampung di pusat kota, agaknya telah terdapat gejala yang cenderung berpola mementingkan pribadi. Gejala ini tampak nyata pada sebagian penduduk kampung pusat kota yang berada dalam suatu peralihan tata nilai kebudayaan dari kehidupan kekeluargaan ke dalam bentuk individual. Ciri lain yang mencerminkan pola hubungan sosial adalah yang bercorak keagamaan. Masyarakat kampung di kota ini masih mendukung nilai-nilai luhur keagamaan yang mereka anut. Perwujudannya terlihat pada penilaian terhadap seseorang selalu ditinjau dari sikap-sikap yang berlandaskan keagamaan. Terhadap sesama warga kampung yang memeluk agama yang berbeda nampak adanya sikap saling hormat menghormati. Demikian juga dalam penentuan seorang pemimpin juga berdasarkan pada ketaatan beragama.

D. STRUKTUR RUMAH TANGGA DAN KESTABILAN KELUARGA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

Tipe keluarga kampung di kota ini pada umumnya memperlihatkan adanya tipe keluarga luas. Susunan keluarga di kampung ini ti-

dak hanya terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak kandung saja tetapi termasuk pula kerabat lain seperti kakek-nenek baik dari pihak ibu maupun bapak, paman, bibi, keponakan, dan saudara sepupu. Dalam kehidupan sehari-hari peranan bapak-ibu tidak hanya pencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga melainkan juga sebagai pelindung dan pendidik. Pendidikan anak-anak lebih dititik beratkan pada peranan ibu. Hal ini disebabkan karena peran bapak sebagai kepala rumah tangga dan sebagai tulang punggung keluarga pada pemenuhan kebutuhan hidup sekeluarga. Dengan adanya dukungan lingkungan yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan, maka kehidupan para keluarga itu pada dasarnya dapat saling berusaha untuk menciptakan ketenteraman. Warga masyarakat kampung ini sedikit banyak telah ada yang menyadari bahwa kebahagiaan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kebendaan. Kestabilan kehidupan keluarga terlihat dengan adanya frekuensi perceraian hidup antar suami-istri relatif jarang terjadi.

E. SISTEM NILAI

Pada umumnya warga masyarakat kampung di kota ini mempunyai pandangan bahwa hidup itu untuk bekerja guna mendapatkan rezeki sehingga dapat melangsungkan hidup bagi keluarganya serta untuk beramal. Sistem nilai hidup bagi mereka pada dasarnya bertumpu dari kenyataan hidup bahwa hanya dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun secara sosial ekonomi keadaan mereka miskin tetapi sesuai dengan kemampuannya, sewaktu-waktu mereka dapat memberikan pertolongan kepada sesama warga yang memerlukan. Jika tidak memiliki uang, mereka menyumbangkan tenaga. Saling tolong menolong antar sesama warga kampung merupakan perwujudan amal bakti sebagaimana yang diperintahkan melalui keyakinan agama yang mereka anut. Mereka tampaknya sangat mendahulukan kepentingan pangan sedangkan keperluan sandang hanya kadangkala saja.

Dalam pergaulan sehari-hari, hampir sebagian besar warga kampung saling mengenal. Antarwarga dapat bergaul tanpa melihat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, dan agama. Dengan warga yang berlainan suku bangsa dalam pergaulan sehari-hari dengan mempergunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan antarwarga sesama suku bangsa untuk lebih akrabnya dengan mempergunakan bahasa daerah sukunya. Penduduk kampung di pinggiran kota ke-

banyakan terdiri dari penduduk asli (suku bangsa Tolaki), jadi pergaulan sehari-hari lebih banyak terdengar dalam bahasa Tolaki. Sedangkan penduduk kampung di pusat kota lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di samping bahasa suku mereka masing-masing. Kemajemukan suku bangsa lebih nampak jelas di kampung pusat kota.

Secara keseluruhan, corak kebudayaan kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh Oscar Lewis belum nampak pada kehidupan masyarakat kampung kota Kendari. Dasar kehidupan beragama yang kuat dan prinsip hidup saling tolong menolong antar warga kampung, mewarnai kehidupan masyarakat kampung di kota Kendari. Walaupun ada beberapa penduduk di kalangan masyarakat kampung yang memiliki kepasrahan nasib dan menggantungkan bantuan pada orang lain. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan pendidikan, keterampilan yang mereka miliki sehingga lapangan kerja yang dapat dijangkau juga terbatas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bappeda Tk. I. Sulawesi Tenggara, 1979, "Gambaran Umum Sulawesi Tenggara", Kendari.
- Departemen Penerangan RI. 1978. *Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/78)*. Jakarta. Percetakan Negara RI.
- Departemen Perindustrian, Kantor Wilayah Propinsi Sultra, "Laporan Tahun 1979/1980", Kendari.
- DPRD I Sulawesi Tenggara. 1979. "Dokumenta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara".
- Statistik Prop. Sulawesi Tenggara. 1980. "Sulawesi Tenggara Dalam Angka", Kendari.
- Lipton Michael & Mick Moore. 1980, *Metodologi Studi Pedesaan Di Negara-Negara Berkembang* (Terjemahan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial), Jakarta.
- Republik Indonesia. 1979. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980 - 1983-1984* Jakarta. Percetakan Negara RI.
- Republik Indonesia. 1982. *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*. Jakarta.
- Pemda. Kab. Dati II Kendari. 1978. "Kota Kendari Selayang Pandang". Kendari.
- Pemda. Tingkat I Sultra. 1979. "Pola Dasar Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara", Kendari.
- Sabari, Hadi. 1977. "Beberapa Pandangan Tentang Konsepsi Wilayah". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Fakultas Geografi.
- Sarjono. 1976. "Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Utama Dalam Pembangunan Perumahan Rakyat". Jakarta. Prisma.
- Soedjatmoko. 1979. "Nilai-Nilai Budaya Dalam Masalah Pemukiman", Jakarta: Prisma.
- William H. Frederick. 1982. "Kesatuan Dan Keanekaragaman Dalam Dua Kebudayaan". Jakarta. Prisma.
- Zen, MT. (ed.). 1980. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia.

TABEL II.1

**JUMLAH KELURAHAN, LUAS RUMAH TANGGA
DAN PENDUDUK RATA-RATANYA PER KELURAHAN,
DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA PADA TIGA KECAMATAN
DI KOTA KENDARI, 1979 – 1981**

Kec/Tahun	J u m l a h				Rata-rata		
	Kel	Luas/km ²	Rt	Pend	P/K	P/km ²	A/Rt
Kendari Kota							
1979	9	36	4 933	33 962	3 744	943	7
1980	9	36	5 429	40 399	4 489	1 122	7
1981	9	36	6 096	42 147	4 683	1 172	7
Mandongga							
1979	7	42,34	3 842	18 311	2 616	432	5
1980	7	42,34	4 756	27 196	3 885	842	6
1981	7	42,34	4 823	28 377	4 054	670	6
Poasia							
1979	10	87,32	1 891	11 778	1 178	135	6
1980	10	87,32	2 394	14 062	1 406	161	6
1981	10	87,32	2 397	14 558	1 456	167	6
Jumlah (Kota Kendari)							
1979	26	166	10 666	64 051	2 464	386	6
1980	26	166	12 579	81 657	3 141	492	6
1981	26	166	13 316	85 082	3 272	513	6

Sumber: *Kantor Administratif Kendari, 1982; Kantor Statistik Prop. Sultra, 1980; Kantor Pembangunan Desa Dati II Kendari, 1982*

Keterangan: Kec = Kecamatan
 Kel = Kelurahan
 Rt = Rumah tangga
 Pend = Penduduk
 P/K = Penduduk per Kelurahan
 P/km² = Kepadatan per km²
 A/Rt = Anggota per rumah tangga

TABEL II. 2
JUMLAH PENDUDUK KOTA KENDARI PER KELURAHAN,
1979 – 1981 (Jiwa)

No.	Tahun Kelurahan	1979	1980	1981
1.	Kemaraya	6 099	9 362	10 015
2.	Tipulu	3 556	4 196	4 624
3.	Benu-Benua	4 026	4 799	4 900
4.	Sodohoa	6 327	7 417	7 472
5.	Kandai	6 982	5 937	6 395
6.	Gunung Jati	1 497	2 437	2 482
7.	Manggadua	2 096	2 519	2 582
8.	Kasilampe	2 447	2 735	2 725
9.	Mata	932	997	997
Kec. Kendari Kota		33 962	40 399	42 147
10.	Puwatu	2 110	2 533	2 553
11.	Labibia	1 839	2 022	2 065
12.	Alolama	1 130	1 421	1 521
13.	Tobuuha	2 197	3 232	3 872
14.	Mandongga	4 788	8 099	8 280
15.	Wua-Wua	4 050	7 273	7 438
16.	Lepo-Lepo	2 197	2 616	2 648
Kec. Mandonga		18 311	27 196	28 377
17.	Kambu	320	378	391
18.	Anduonobu	2 181	3 032	3 203
19.	Anggoea	1 157	1 549	1 567
20.	Abeli	1 489	1 693	1 713
21.	Tobimeita	1 235	1 383	1 402
22.	Lapulu	1 394	1 748	1 862
23.	Talia	1 265	1 276	1 293
24.	Bungkutoko	1 152	1 205	1 215
25.	Nambo	727	848	881
26.	Sambuli	858	950	1 031
Kec. Poasia		11 778	14 062	14 558
Kota Kendari		64 051	81 657	85 082

Sumber: *Kantor Administratif Kendari, 1982; dan Kantor Pembangunan Desa Dati II Kendari, 1982.*

TABEL II.3

**JUMLAH PENDUDUK KOTA KENDARI PER KECAMATAN
MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN, 1980**

Golongan Umur (Tahun)	L	P	Jumlah
0 - 4	3 176	3 095	6 271
5 - 9	2 790	2 649	5 439
10 - 14	2 507	2 319	4 826
15 - 24	5 761	5 150	10 911
25 - 49	5 860	4 991	10 851
50 +	1 046	1 055	2 101
Kec. Kendari Kota	21 140	19 259	40 399
0 - 14	2 474	2 308	4 782
5 - 9	2 144	2 022	4 166
10 - 14	1 620	1 459	3 079
15 - 24	3 739	3 483	7 222
25 - 49	3 827	2 924	6 751
50 +	653	543	1 196
Kec. Mandonga	14 457	12 739	27 196
0 - 4	1 226	1 134	2 360
5 - 9	1 111	1 114	2 225
10 - 14	996	760	1 756
15 - 24	1 556	1 545	3 101
25 - 49	1 897	1 818	3 715
50 +	459	446	905
Kec. Poasia	7 245	6 817	14 062
0 - 4	6 876	6 537	13 413
5 - 9	6 045	5 785	11 830
10 - 14	5 123	4 538	9 661
15 - 24	11 056	10 178	21 234
25 - 49	11 584	9 733	21 317
50 +	2 158	2 044	4 202
Kota Kendari	42 842	38 815	81 657

Sumber: *Ibid* tabel II.2.

TABEL II. 4
JUMLAH PENDUDUK WARGA ASING (CINA)
DI KOTA KENDARI, MENURUT JENIS KELAMIN
1981 – 1982

Kecamatan/Tahun	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Kendati Kota			
1981	484	489	973
1982	345	351	696
Mandongga			
1981	7	11	18
1982	12	20	32
Poasia			
1981	3	2	5
1982	1	1	2
Kota Kendari			
1981	494	502	996
1982	358	372	730

Sumber: *Ibid tabel II.1.*

TABEL II. 5**BANYAKNYA SEKOLAH DI KOTA KENDARI
MENURUT JENJANG DAN STATUSNYA, 1982**

Tingkat \ Status	Negeri	Swasta	Jumlah
STK		12	12
SD	59	3	62
SMTp	9	5	14
SMTA	10	8	18
Pendidikan Tinggi	2	—	2

Sumber: *Kantor Administratif Kendari, 1982*

TABEL II. 6**BANYAKNYA PENDUDUK KOTA KENDARI UMUR 10 TAHUN
KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN 1982**

Tingkat Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Kendari	Mondonga	Poasia	
Tidak sekolah	4 344	2 913	1 445	8 702
Tidak Tamat SD	10 859	7 282	3 613	21 754
SD/Sederajat	8 687	5 825	2 890	17 402
SMTp/Sederajat	6 616	4 369	2 168	13 153
SMTA/Sederajat	2 172	1 457	725	4 354
Sarjana Muda	435	292	15	742
Sarjana	217	146	7	370
Jumlah	33 330	22 284	10 863	66 477

Sumber. *Ibid tabel II.5*

TABEL II. 7
PERSENTASE PENDUDUK KOTA KENDARI
UMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT LAPANGAN USAHA,
1981

No.	Lapangan Usaha	
1.	Pertanian	30,65
2.	Pertambangan	—
3.	Industri	4,51
4.	Bangunan	7,62
5.	Listrik, gas & air minum	1,81
6.	Transport & komunikasi	5,75
7.	Perdagangan	12,85
8.	Bank & Lembaga Keuangan	5,65
9.	Sewa rumah	1,75
10.	Pemerintahan	10,69
11.	Jasa-jasa	18,72

Sumber: *Kantor Adm. Kendari, 1982, dan Kantor Sensus dan Statistik Dati II Kendari, 1982.*

TABEL IV. 1
RESPONDEN MENURUT IDENTITAS

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Jenis kelamin				
Laki-laki	16	80	20	100
Perempuan	4	20	—	—
Jumlah	20	100	20	100
2. Status perkawinan				
Kawin	16	80	17	85
Janda/duda	4	20	3	15
Jumlah	20	100	20	100
3. Agama				
Islam	19	95	20	100
Kristen	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100
4. Umur				
20 – 29	6	30	5	25
30 – 39	6	30	9	45
40 – 49	4	10	3	15
50 – 59	3	15	2	10
60 +	1	5	1	5
Jumlah	20	100	20	100
5. Pendidikan umum terakhir				
Tidak pernah sekolah	7	35	6	30
SD tidak tamat	5	25	7	35
SD tamat	6	30	5	25
SMTP tidak tamat	1	5	1	5
SMTP tamat	1	5	1	5
SMTA	—	—	—	5
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV.2

**RESPONDEN MENURUT PENDIDIKAN NON FORMAL
DAN PENGALAMAN KETERAMPILAN**

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Pendidikan agama				
Tidak pernah	14	70	11	55
Mengaji/sek.Minggu	6	30	9	45
Jumlah	20	100	20	100
2. Kursus baca-tulis P B H dan sejenisnya				
Tidak kursus	7	35	5	25
	13	65	15	75
Jumlah	20	100	20	100
3. Banyak kursus keterampilan yang pernah diikuti				
Tidak kursus	13	65	18	90
Satu macam	5	25	1	5
Dua macam	1	5	1	5
Tiga macam	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100
4. Jenis pengalaman dalam bidang keterampilan				
Tidak pengalaman	13	65	18	90
Satu macam	5	25	2	10
Dua macam	2	10	—	—
Tiga macam	—	—	—	—
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV.3
RESPONDEN MENURUT TEMPAT LAHIR,
ASAL SUKU BANGSA, ASAL PENDUDUK
SEBELUM MENETAP PINDAH DI KAMPUNG
BERSANGKUTAN SERTA ALASAN PINDAH

Keterangan	Kampung Benu-Benu		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Tempat lahir				
Kota setempat	13	65	10	50
Kota lain dalam satu propinsi	3	15	2	10
Di luar propinsi	4	20	8	40
Jumlah	20	100	20	100
2. Asal suku bangsa				
Dalam propinsi	4	20	10	50
Di luar propinsi	16	80	10	50
Jumlah	20	100	20	100
3. Asal penduduk sebelum menetap				
Kampung setempat	2	10	10	50
Kampung lain dalam satu kelurahan	—	—	—	—
Kelurahan lain dalam satu kecamatan	—	—	—	—
Kecamatan lain dalam satu propinsi	3	15	3	15
Propinsi lain	15	75	7	35
Jumlah	20	100	20	100
4. Alasan pindah				
Dekat tempat kerja	3	85	10	50
Biaya murah	2	5	—	—
Lainnya	15	10	10	50
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : Data Angket

TABEL IV. 4
RESPONDEN MENURUT KEADAAN RUMAH

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Luas bangunan (m ²)				
< 20	4	20	1	5
21 – 25	2	10	5	25
26 – 30	5	25	13	65
31 – 40	3	15	1	5
41 – 50	5	25	—	—
51 – 75	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100
2. Jenis rumah				
Rumah tunggal	17	85	20	100
Rumah petak	1	5	—	—
Bagian rumah tunggal	2	10	—	—
Jumlah	20	100	20	100
3. Bentuk rumah				
Rumah panggung	2	10	5	25
Rumah di atas tanah	18	90	15	75
Jumlah	20	100	20	100
4. Bahan dinding rumah				
Tembok	1	5	—	—
Papan	8	40	5	25
Gedek bambu	11	55	10	50
Lainnya	—	—	5	25
Jumlah	20	100	20	100

5. Bahan lantai				
Semen	6	30	2	10
Tanah	14	70	12	60
Lainnya	—	—	6	30
Jumlah	20	100	20	100
6. Banyak ruang				
Satu ruang	1	5	2	10
Dua ruang	14	70	18	90
Tiga ruang	5	25	—	—
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 5
RESPONDEN MENURUT STATUS PEMILIKAN TANAH
DAN BANGUNAN

K e t e r a n g a n	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Status tanah				
Milik sendiri	1	5	18	90
Sewa	1	5	—	—
Lainnya	18	90	2	10
Jumlah	20	100	20	100
2. Status rumah				
Milik sendiri	19	95	19	95
Sewa	1	5	—	—
Lainnya	—	—	1	5
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 6

**RESPONDEN MENURUT PEMILIKAN KAMAR MANDI,
JAMBAN, PEMBUANGAN SAMPAH, SUMBER AIR BERSIH,
DAN SUMBER PENERANGAN**

K e t e r a n g a n	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Kamar mandi				
Sendiri	4	20	—	—
Menumpang	2	10	—	—
Umum	14	70	19	95
Lainnya	—	—	1	5
Jumlah	20	100	20	100
2. Jamban				
Sendiri	5	25	—	—
Umum	15	75	10	50
Lainnya	—	—	10	50
Jumlah	20	100	20	100
3. Tempat buang sampah				
Sendiri	2	10	—	—
Dibakar	—	—	8	45
Selokan/kali/jalan	—	—	12	55
Umum	18	90	—	—
Jumlah	20	100	20	100
4. Sumber air bersih				
Sumur sendiri	19	95	1	5
Pompa sendiri	1	5	—	—
Lainnya	—	—	19	95
Jumlah	20	100	20	100

5. Sumber penerangan				
Lampu minyak tanah	19	95	19	95
Petromak	—	—	1	5
Listrik	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 7

**RESPONDEN MENURUT PEMILIKAN LUAS HALAMAN,
JENIS BATAS HALAMAN, DAN BATAS DEPAN RUMAH**

K e t e r a n g a n	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Luas halaman (m ²)				
2 – 10	1	5	—	—
11 – 20	9	45	12	55
21 – 30	5	25	6	35
31 – 40	3	15	2	10
41 +	2	10	—	—
Jumlah	20	100	20	100
2. Jenis pagar				
Tidak berpagar	15	75	4	20
Pagar hidup	—	—	9	45
Pagar bambu/kayu	5	25	7	35
Jumlah	20	100	20	100
3. Batas depan rumah				
Tidak berpagar	15	75	4	20
Pagar berpintu	1	5	—	—
Pagar tanpa pintu	4	20	16	80
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 8

**RESPONDEN MENURUT PEMILIKAN ALAT RUMAH TANGGA,
DAN PERALATAN KOMUNIKASI/TRANSPORTASI**

Kampung \ Peralatan		I	II	III	IV	V	VI
Kampung Benu-Benua							
Ada	F	15	3	2	1	1	3
	%	75	15	10	5	5	15
Tidak ada	F	5	17	18	19	19	17
	%	25	85	90	95	95	85
Jumlah		F 20	20	20	20	20	20
		% 100	100	100	100	100	100
Kampung Lepo-Lepo							
Ada	F	10	—	1	—	3	—
	%	50	—	5	—	15	—
Tidak ada	F	10	—	19	—	17	—
	%	50	—	95	—	85	—
Jumlah		F 20	—	20	—	20	—
		% 100	—	100	—	100	—

Sumber: *Data Angket, 1982*

Keterangan:

- I. Kursi tamu
- II. Mesin jahit
- III. Radio
- IV. Televisi
- V. Sepeda
- VI. Sepeda motor

TABEL IV. 9

**RESPONDEN MENURUT PENGHASILAN KOTOR DAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN KELUARGA PER BULAN**

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Penghasilan kotor (rupiah)				
< 10.000	2	10	12	55
10.000 – < 20.000	—	—	6	35
21.000 – < 30.000	7	35	2	10
31.000 – < 40.000	3	15	—	—
41.000 – < 50.000	2	10	—	—
51.000 – < 60.000	3	15	—	—
61.000 – < 90.000	3	15	—	—
Jumlah	20	100	20	100
2. Pemenuhan berbagai kebutuhan keluarga				
Cukup	3	15	3	15
Kurang	6	30	7	35
Sangat kurang	11	55	10	50
Jumlah	20	100	20	100
3. Pemenuhan kebutuhan pangan				
Cukup	8	40	3	15
Kurang	12	60	6	30
Sangat kurang —	—	—	11	55
Jumlah	20	100	20	100

4. Pemenuhan kebutuhan pangan-sandang				
Cukup	6	30	1	5
Kurang	11	55	5	25
Sangat kurang	3	15	14	70
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket 1982*

TABEL IV. 10

**RESPONDEN MENURUT CARA PENAMBAHAN PENDAPATAN
DAN CARA MEMPEROLEH BANTUAN KEUANGAN**

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Penambahan pendapatan				
Berhutang	1	5	1	5
Minta bantuan kerabat	2	10	8	40
Minta bantuan tetangga	17	85	11	55
Jumlah	20	100	20	100
2. Tempat minta bantuan uang, karena kesulitan sehari-hari				
Kerabat	2	10	11	55
Tetangga	2	10	7	35
Teman	15	75	2	10
Atasan tempat bekerja	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100
3. Tempat minta bantuan uang untuk anggota keluarga yang sakit keras				
Kerabat	1	5	11	55
Tetangga	10	50	5	25
Teman	6	30	2	10
Lainnya	3	15	2	10
Jumlah	20	100	20	100

4. Cara memperoleh barang yang sangat dibutuhkan, jika kekurangan uang				
Berhutang	3	15	—	—
Membeli di tukang loak	1	5	15	75
Kredit	1	5	—	—
Lainnya	15	75	5	25
Jumlah	20	100	20	100

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 11
RESPONDEN MENURUT CARA PEMANFAATAN UANG
YANG LEBIH

Pemanfaatan penghasilan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
Menabung	3	15	—	—
Memperbaiki rumah	5	25	5	25
Membeli tanah	4	20	2	10
Tidak digunakan	7	35	13	65
Jumlah	20	100	20	100

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV.12
RESPONDEN MENURUT ADA/TIDAKNYA
DAN JENIS BIAYA KHUSUS

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	R
1. Ada/tidaknya biaya				
Ada	14	70	1	5
Tidak	6	30	19	95
Jumlah	20	100	20	100
2. Jenis pengeluaran biaya khusus	Ada		Tidak	
	F	%	F	%
Sosial	14	70	6	30
Upacara/pesta	10	50	10	50
Peribadatan	9	45	11	55
Pendidikan anak	2	10	18	90
Famili	4	20	19	80
Lainnya	1	5	10	95

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV.13
RESPONDEN MENURUT TEMPAT BELANJA KEBUTUHAN
PANGAN SEHARI-HARI

Tempat belanja Kampung	Warung		Pasar		Tukang Sayur	
	F	%	F	%	F	%
Kampung Benu-Benua						
Ya	17	85	20	100	3	15
Tidak	3	15	—	—	17	85
Jumlah	20	100	20	100	20	100
Kampung Lepo-Lepo						
Ya	13	65	17	85	—	—
Tidak	7	35	3	15	—	—
Jumlah	20	100	20	100	—	—

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 14
RESPONDEN MENURUT PENGENALAN TERHADAP
SESAMA WARGA RT, DAN KAMPUNG SERTA
BAHASA PENGANTAR YANG DIPAKAI

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Sesama warga RT				
Semua	3	15	5	25
Sebagian besar	12	60	15	75
Ketua RT dan tetangga	5	25	—	—
Jumlah	20	100	20	100

2. Sesama warga kampung	Sebagian besar	11	55	15	75
	Sebagian kecil	9	45	5	25
Jumlah		20	100	20	100
3. Bahasa pengantar	Bahasa Indonesia	19	95	10	50
	Bahasa Daerah	1	5	10	50
Jumlah		20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 15
RESPONDEN MENURUT CARA SALING MEMBANTU
TERHADAP TETANGGA BILA ADA HAJATAN
ATAU KEMALANGAN

Keterangan	Kampung Benu-Benua				Kampung Lepo-Lepo			
	ya		tidak		ya		tidak	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Bila mempunyai hajatan Kerabat ikut membantu Tetangga ikut membantu	15	75	5	20	17	85	3	15
	14	70	6	30	19	95	1	5
2. Ada perampokan/pencurian di rumah tetangga	Kampung Benu-Benua				Kampung Lepo-Lepo			
	F		%		F		%	
Menolong mengusir	15		75		17		85	
Berteriak-teriak minta tolong	5		25		3		15	
Jumlah	20		100		20		100	

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 16
RESPONDEN MENURUT KEADAAN KEAMANAN KAMPUNG

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	R
1. Dalam kampung				
Sangat aman	19	95	19	95
Tidak aman	1	5	1	5
Jumlah	20	100	20	100
2. Dibandingkan dengan kampung lain				
Lebih aman	1	5	1	5
Sama amannya	18	90	19	95
Kurang aman	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100

Sumber. *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 17
RESPONDEN MENURUT PENDAPAT TENTANG
KELAKUAN PENDUDUK KAMPUNG BERDASARKAN SEGI
AGAMA DAN ADAT

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Agama				
Sesuai	14	70	15	75
Kurang sesuai	4	20	4	20
Tidak sesuai	1	5	1	5
Lainnya	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100

2. Adat istiadat	Sesuai	19	95	17	85
	Tidak sesuai	1	5	3	15
Jumlah		20	100	20	100

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 18
RESPONDEN MENURUT PENILAIAN TENTANG REMAJA
DALAM HUBUNGAN DENGAN PARA ORANG TUA DAN
PENENTUAN KEHORMATAN/KEDUDUKAN ORANG
DI KAMPUNGNYA

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Remaja orang tua				
Menghormati	17	85	18	90
Kurang menghormati	3	15	2	10
Jumlah	20	100	20	100
2. Kedudukan seseorang				
Latar belakang keluarga	1	5	1	5
Amal/budi baik	18	80	19	95
Lainnya	1	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 19
RESPONDEN MENURUT MASALAH PENYEBAB
SENKETA DENGAN TETANGGA

Kampung \ Penyebab	Anak		Tanah		Hutang		Keributan		Lainnya	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kampung Benu-Benua										
Ya	3	15	2	10	2	10	—	—	2	10
Tidak	17	85	18	90	18	90	—	—	18	90
Jumlah	20	100	20	100	20	100	—	—	20	100
Kampung Lepo-Lepo										
Ya	1	5	1	5	—	—	1	5	3	15
Tidak	19	95	19	95	—	—	19	95	17	85
Jumlah	20	100	20	100	—	—	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982* .

TABEL IV. 20
RESPONDEN MENURUT PENGAMATANNYA TENTANG
PENYEBAB PERSENGKETAAN ANTARWARGA KAMPUNG

Kampung \ Masalah	Anak		Hutang		Tanah	
	F	%	F	%	F	%
Kampung Benu-Benua						
Ya	4	20	3	15	4	20
Tidak	16	80	17	85	16	80
Jumlah	20	100	20	100	20	100
Kampung Lepo-Lepo						
Ya	1	5	1	5	1	5
Tidak	19	95	19	95	19	95
Jumlah	20	100	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 21
RESPONDEN MENURUT CARA PENYELESAIAN SENGKETA
DENGAN TETANGGA

Cara Kampung	I		II		III		IV	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Kampung Benu-Benua								
	Ya	10 50	2 10	3 15	5 25			
Tidak								
	Tidak	10 50	18 90	17 85	15 75			
Jumlah	Jumlah	20 100	20 100	20 100	20 100			
2, Kampung Lepo-Lepo								
	Ya	19 95	5 25	— —	— —			
Tidak								
	Tidak	1 5	10 75	— —	— —			
Jumlah	Jumlah	20 100	20 100	— —	— —			

Sumber : *Data Angket, 1982*

- I. Secara kekeluargaan tanpa orang ketiga
- II. Secara kekeluargaan dengan bantuan orang-orang
- III. Secara hukum
- IV. Lainnya.

TABEL IV. 22
RESPONDEN MENURUT PENGAMATAN TENTANG
CARA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARWARGA KAMPUNG
DAN TENTANG ORANG KETIGA YANG SERING
MENYELESAIKAN

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Cara penyelesaian				
Keluargaan	11	55	19	95
Melalui orang lain	—	—	1	5
Hukum	1	5	—	—
Lainnya	8	40	—	—
Jumlah	20	100	20	100
2. Orang ketiga				
Pemuka adat	—	—	9	45
Pemuka agama	4	20	6	30
Ketua RK	13	65	5	25
Lainnya	3	15	—	—
Jumlah	20	100	20	100

Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 23
RESPONDEN MENURUT USAHA YANG DILAKUKAN DALAM
HIDUP BERTETANGGA

Usaha	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
Mengenalkan bahasa dan adat istiadat yang dimiliki	2	10	5	25
Mengenal bahasa dan adat orang lain	16	80	13	65
Saling menghormati	2	10	2	10
Jumlah	20	100	20	100

Sumber: Data Angket, 1982

TABEL IV. 24
RESPONDEN MENURUT FREKUENSI, TEMPAT, DAN BAHAN
PERBINCANGAN DENGAN TETANGGA

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Frekuensi				
Jarang	3	15	2	10
Sering	17	85	18	90
Jumlah	20	100	20	100
2. Tempat				
Rumah sendiri	4	20	6	30
Rumah tetangga	14	70	13	65
Lainnya	2	10	1	5
Jumlah	20	100	20	100

3. Bahan				
a. Barang baru yang dimiliki				
Selalu	—	—	1	5
Jarang	2	10	1	5
Tidak pernah	18	90	18	90
Jumlah	20	100	20	100
b. Menggunjingkan tetangga lain				
Kadang-kadang	1	5	3	15
Tidak pernah	19	95	17	85
Jumlah	20	100	20	100
c. Lainnya				
Pengalaman	19	95	17	85
Kehidupan tokoh masyarakat	1	5	3	15
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 25
RESPONDEN MENURUT KEBIASAAN ANAK BERMAIN,
PANDANGAN MENGENAI PERKELAHIAN ANAK
DAN TEMPAT BERMAIN

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Kebiasaan anak bermain dengan anak tetangga				
Sering	14	70	15	75
Jarang	3	15	5	25
Pernah	3	5	—	—
Jumlah	20	100	20	100
2. Mencampuri perkelahian anak				
Ya	2	10	1	5
Tidak	18	90	19	95
Jumlah	20	100	20	100
3. Bila anak nakal				
Tetangga boleh memarahi	15	75	13	65
Tetangga boleh lapor	2	10	6	30
Lainnya	3	15	1	5
Jumlah	20	100	20	100
4. Tempat anak bermain				
Halaman rumah sendiri	3	15	5	25
Halaman rumah tetangga	12	60	8	40
Jalan, depan rumah	1	5	1	5
Tempat lain	4	20	6	30
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 26
RESPONDEN MENURUT KEHIDUPAN DAN SIKAP
MENGENAI PERKAWINAN ANAK

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Status perkawinan				
Pertama	19	95	19	95
Kedua	1	5	1	5
Jumlah	20	100	20	100
2. Sebab perkawinan kedua				
Cerai	—	—	—	—
Suami/istri meninggal	1	5	1	5
Perkawinan pertama	19	95	19	95
Jumlah	20	100	20	100
3. Perkawinan anak tidak sesuku bangsa				
Setuju	19	95	15	75
Tidak setuju	—	—	4	20
Lainnya	1	5	1	5
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 27
RESPONDEN MENURUT TANGGUNG JAWAB
BILA ADA KESULITAN UANG, MASALAH ANAK,
DAN KEBIASAAN BERBINCANG DALAM KELUARGA

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Tanggung jawab bila kesulitan uang				
Bapak/Ibu	7	35	11	55
Bapak	9	45	7	35
Ibu	4	20	2	10
Jumlah	20	100	20	100
2. Tanggung jawab masalah anak				
Ibu	4	20	5	25
Ibu kemudian bapak mencampuri	2	10	5	25
Ibu dan Bapak	14	70	10	50
Jumlah	20	100	20	100
3. Kebiasaan berbincang dalam keluarga				
Tidak pernah	11	55	5	25
Jarang	5	25	6	30
Sering	4	20	9	45
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 28
RESPONDEN MENURUT MODEL PENDIDIKAN ANAK,
PERILAKU ANAK TERHADAP ORANG TUA
DAN TUGAS ANAK DI RUMAH

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Model pendidikan				
Sekolah umum dan belajar agama	13	65	15	75
Lainnya	7	35	5	25
Jumlah	20	100	20	100
2. Cara penentuan sekolah				
Terserah anak, orang tua memberi pandangan	13	65	12	60
Orang tua menentukan	6	30	5	25
Terserah anak	—	—	2	10
Lainnya	1	5	1	5
Jumlah	20	100	20	100
3. Perilaku anak terhadap orangtua				
Harus patuh kepada orang tua	18	90	17	85
Tergantung pada sikap anak sendiri	2	10	1	5
Diarahkan orang tua	—	—	2	10
Jumlah	20	100	20	100

4. Tugas anak di rumah				
Harus membantu orang tua	2	10	5	25
Pekerjaan sekolah saja	1	5	1	5
Membantu tanpa mengganggu pelajaran	15	75	10	50
Lainnya	2	10	4	20
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 29
RESPONDEN MENURUT JENIS KEGIATAN SOSIAL
YANG DIKUTINYA/ANGGOTA KELUARGANYA DALAM RT
ATAU KAMPUNG

Kegiatan Kampung	Arisan		Gotong-royong		Olahraga	
	F	%	F	%	F	%
Benu-Benu						
Ikut	12	60	14	70	2	10
Tidak	8	40	6	30	18	90
Jumlah	20	100	20	100	20	100
Lepo-Lepo						
Ikut	3	15	15	75	9	45
Tidak	17	85	5	25	11	55
Jumlah	20	100	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 30
RESPONDEN MENURUT PEKERJAAN YANG SEKARANG
DAN YANG DIINGINKANNYA

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Kepuasan kerja				
Kurang puas	15	75	16	80
Tidak puas	5	25	4	20
Jumlah	20	100	20	100
2. Kerja lain yang diinginkan				
Berwiraswasta	10	50	9	45
Pegawai Negeri	9	45	10	50
Lainnya	1	5	1	5
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 31
RESPONDEN MENURUT PEKERJAAN YANG DIINGINKAN
UNTUK ANAKNYA KELAK

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
Pegawai Negeri	17	85	8	40
ABRI	1	5	2	10
Pegawai Swasta	—	—	7	35
Guru	—	—	1	5
Pedagang	—	—	1	5
Buruh	—	—	—	—
Petani	—	—	—	—
Pengusaha	—	—	1	5
Lainnya	2	10	—	—
Jumlah	20	100	20	100

TABEL IV. 32
RESPONDEN MENURUT PANDANGANNYA
TERHADAP MAKHLUK GAIB

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Percaya				
Ya	2	10	13	65
Tidak	18	90	7	35
Jumlah	20	100	20	100
2. Upacara Gaib				
Mengadakan	1	5	7	35
Tidak	19	95	13	65
Jumlah	20	100	20	100

Sumber : *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 33
RESPONDEN MENURUT KEHIDUPAN BERAGAMA

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Tempat beribadat				
Di tempat ibadah	2	10	2	10
Di rumah	8	40	10	50
Rumah dan tempat ibadah	10	50	8	40
Jumlah	20	100	20	100
2. Membaca kitab suci				
Tiap hari	1	5	7	35
Kadang-kadang	17	85	9	45
Tidak	2	10	4	20
Jumlah	20	100	20	100
3. Mengajar anak membaca kitab suci				
Tiap hari	1	5	2	10
Kadang-kadang	14	70	15	75
Tidak sanggup	5	25	3	15
Jumlah	20	100	20	100
4. Peralatan ibadah				
Lengkap	2	10	—	—
Tidak lengkap	16	80	15	75
Tidak ada	2	10	5	25
Jumlah	20	100	20	100

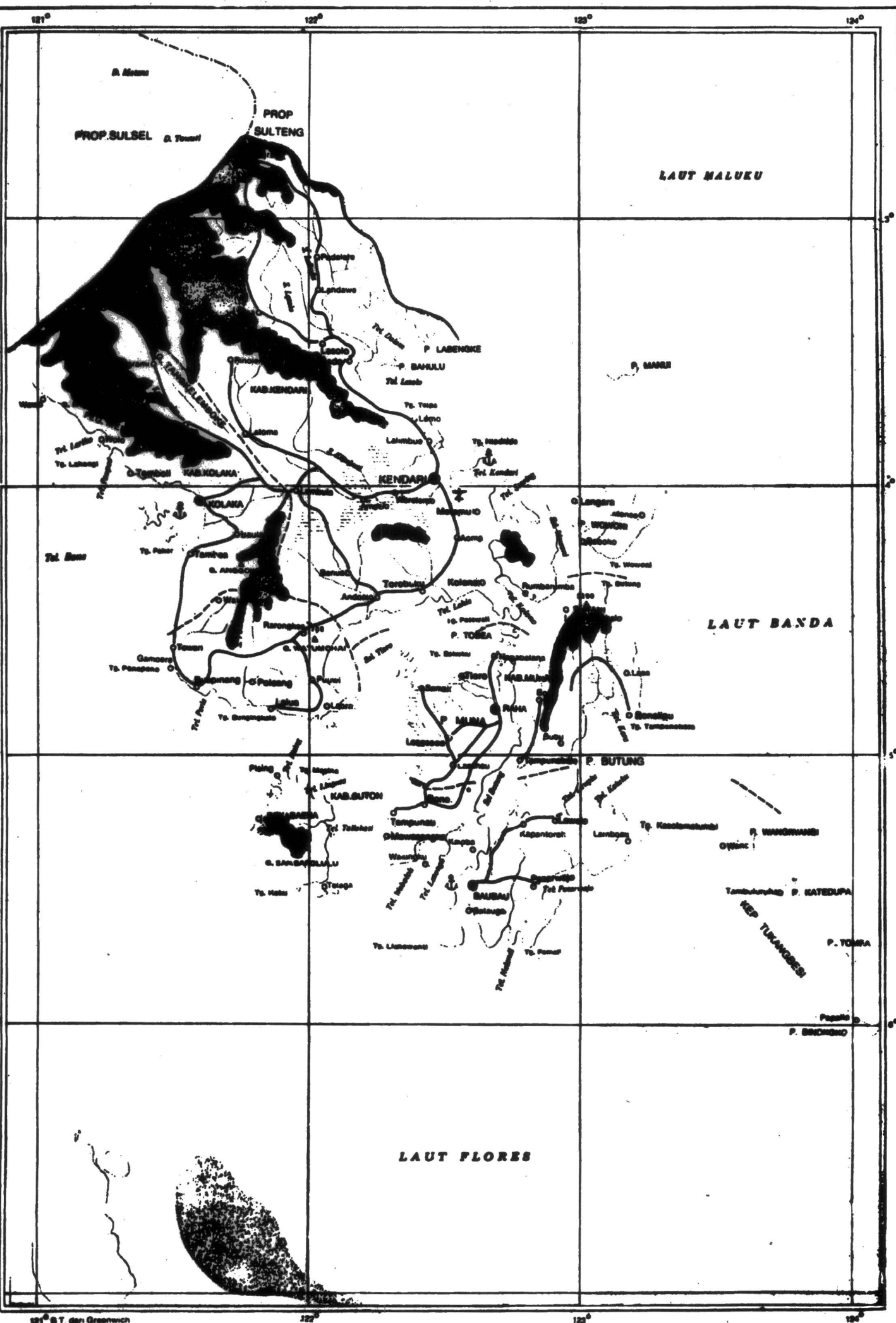
Sumber: *Data Angket, 1982*

TABEL IV. 34
RESPONDEN MENURUT SIKAPNYA
BILA ANAK NIKAH BUKAN SEAGAMA DAN KEHADIRAN
BILA ADA PESTA KEAGAMAAN YANG BERBEDA

Keterangan	Kampung Benu-Benua		Kampung Lepo-Lepo	
	F	%	F	%
1. Sikap terhadap perkawinan anaknya yang tidak seagama				
Setuju	10	50	5	25
Tidak setuju	10	50	15	75
Jumlah	20	100	20	100
2. Kehadiran pada pesta bukan seagama				
Datang	9	45	—	—
Tidak datang	2	10	—	—
Datang mewakilkan	9	45	—	—
Jumlah	20	100	—	—

Sumber : *Data Angket, 1982.*

PROPINSI SULAWESI TENGGARA



Tidak diperdagangkan untuk umum